



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 11 Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang ...

7. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019](#) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. [Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018](#) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 16);
12. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 60 Tahun 2021](#) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 60);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021-2025.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
6. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
7. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
8. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

## BAB II ARSITEKTUR SPBE

### Pasal 2

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Selain berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Arsitektur SPBE memperhatikan Arsitektur SPBE Provinsi Jawa Barat.

Pasal ...

## Pasal 3

- (1) Sistematika Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. pendahuluan;
  - b. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - c. domain arsitektur data dan informasi;
  - d. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - e. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - f. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - g. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 4

- (1) Wali Kota dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dalam menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

## REVIU

## Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan reviu Arsitektur SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
  - c. perubahan rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE; atau
  - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

BAB ...

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 Agustus 2021  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 26 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 85



LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 85 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 Agustus 2021

---

## BAB 1 Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Dalam menghadapi kondisi global saat ini, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan TIK mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Hal ini menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang didalamnya memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna. Berbagai aspek pengaturan dalam peraturan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu mewujudkan visi SPBE, yaitu “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan perencanaan yang matang supaya pembangunan TIK menjadi terarah dan sesuai dengan kebutuhan. Salah satu bentuk perencanaan yang perlu disusun adalah arsitektur SPBE.

Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres SPBE, pemerintah daerah menyusun arsitektur SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan hal itu, Pemerintah Kota Bandung berinisiatif untuk menyusun arsitektur SPBE Pemerintah Kota Bandung yang disesuaikan dengan arahan dari Perpres SPBE Nasional dan RPJMD.

## **1.2 Tujuan dokumen**

Tujuan disusunnya dokumen ini adalah:

- a. Mengikuti amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- b. Mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan Pemerintah Kota Bandung yang terintegrasi

## **BAB 2 Visi Misi SPBE Pemerintah Kota Bandung**

### **2.1 Visi Misi SPBE**

Pembangunan SPBE di daerah harus dapat mendukung target pembangunan pemerintah daerah. Target pemerintah kota Bandung pada saat ini tercantum dalam visi misi Wali Kota tahun 2018 – 2023.

Visi Wali Kota:

**“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”**

Penjelasan visi tersebut adalah “layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

Berdasarkan visi tersebut, dijabarkan beberapa misi sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.

4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan. Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan
5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi  
Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

Berdasarkan visi dan misi pemerintah Kota Bandung tersebut, maka disusunlah visi SPBE.

Visi SPBE Pemerintah Kota Bandung tahun adalah:

**“Integrasi proses dan data untuk mewujudkan SPBE yang efektif guna meningkatkan dukungan layanan publik dan kinerja aparatur”**

Beberapa kata kunci yang ditekankan, yaitu:

1. Integrasi. Ini merupakan semangat kunci yang utama yang dibawa di dalam penyelenggaraan SPBE. Integrasi berarti meningkatkan keterhubungan sehingga sistem yang dulunya terpisah-pisah, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bekerjasama dan berkolaborasi mencapai satu tujuan utama.
2. Proses dan Data. Dua komponen utama yang perlu dilakukan integrasi. Integrasi proses menyatakan bahwa seluruh rangkaian proses perlu diperhatikan secara end-to-end, suatu rangkaian yang saling terhubung. Integrasi data membawa semangat ‘Satu Data’ untuk menjaga integritas data.
3. SPBE yang Efektif. Artinya adalah SPBE dapat berjalan dengan maksimal melalui pemanfaatan TIK dan melalui integrasi proses dan data. Efektif di sini artinya dapat mengantarkan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan dan peran yang sudah didefinisikan sebelumnya.
4. Layanan Publik dan Kinerja Aparatur. Mencakup dua aspek yang dituju di dalam audience SPBE. Secara internal akan membantu dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, sedangkan untuk eksternal kepada

masyarakat akan sangat membantu dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Untuk dapat mencapai visi tersebut, ada beberapa misi yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengintegrasikan seluruh komponen TIK untuk setiap proses dalam siklus hidup TIK di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
2. Meningkatkan kompetensi dan distribusi SDM TIK di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
3. Menetapkan landasan hukum/kebijakan/regulasi serta tata kelola terkait dengan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
4. Meningkatkan layanan publik dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan SPBE untuk menuju Bandung Smart City.

## **2.2 Tujuan dan Sasaran SPBE**

Visi dan misi SPBE Pemerintah Kota Bandung tersebut bertujuan untuk mendukung tiga peran utama Pemerintah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan untuk kesejahteraan masyarakat
2. Sebagai regulator untuk meningkatkan daya saing kota
3. Menyelenggarakan pemerintahan yang aktif dan efisien

Selanjutnya tujuan yang sesuai dengan visi dan misi SPBE tersebut akan membantu atau mendukung peran Pemerintah tersebut, sehingga dapat tercapai sasaran SPBE Pemerintah Kota Bandung, yaitu:

1. Mendukung kelancaran pelayanan masyarakat
2. Mendukung fungsi Pemerintah Kota sebagai regulator
3. Memaksimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kota
4. Mendukung integrasi layanan dengan instansi pusat maupun pemerintah daerah lainnya.



## **BAB 3 Referensi Arsitektur**

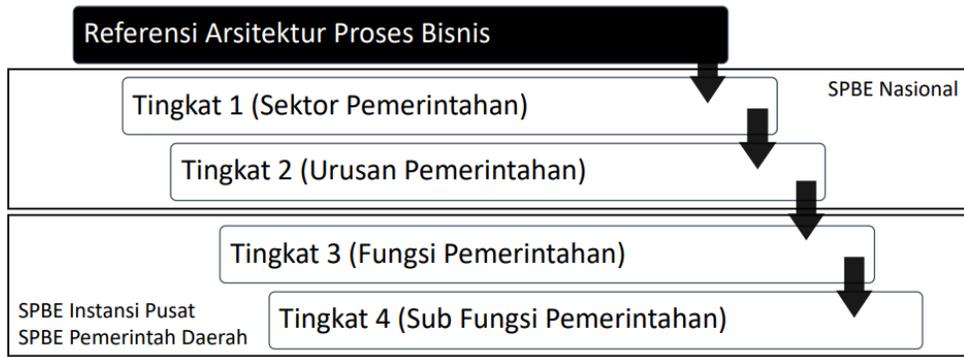
Berdasarkan amanat Perpres no. 95 tahun 2018 pada pasal 12 ayat 1, maka Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pada saat dokumen ini disusun, arsitektur SPBE Nasional belum secara resmi diatur, tetapi sudah ada rancangan Perpres yang membahas mengenai Referensi Arsitektur Nasional. Untuk memudahkan penyesuaian dikemudian hari, maka arsitektur SPBE Pemerintah Kota Bandung disusun berdasarkan Referensi Arsitektur Nasional tersebut. Dalam Referensi Arsitektur Nasional tersebut dibahas enam referensi arsitektur yang meliputi:

1. Referensi arsitektur proses bisnis
2. Referensi arsitektur data dan informasi
3. Referensi arsitektur infrastruktur
4. Referensi arsitektur aplikasi
5. Referensi arsitektur keamanan
6. Referensi arsitektur layanan

### **3.1 Referensi Arsitektur Bisnis**

Dalam Arsitektur Proses Bisnis ini, Pemerintah Kota Bandung mengacu kepada pedoman Arsitektur Bisnis SPBE Nasional dalam bentuk Referensi Arsitektur Bisnis (RAB). RAB ini memberikan referensi tentang jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Taksonomi RAB SPBE Nasional terdiri dari 9 (sembilan) sektor pemerintahan di tingkat 1 (satu) dan 46 (empat puluh enam) urusan pemerintahan di tingkat 2 (dua). Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun Arsitektur Bisnis akan melengkapi proses bisnis mulai tingkat 3 sebagaimana terlihat pada Gambar 1 di bawah ini.



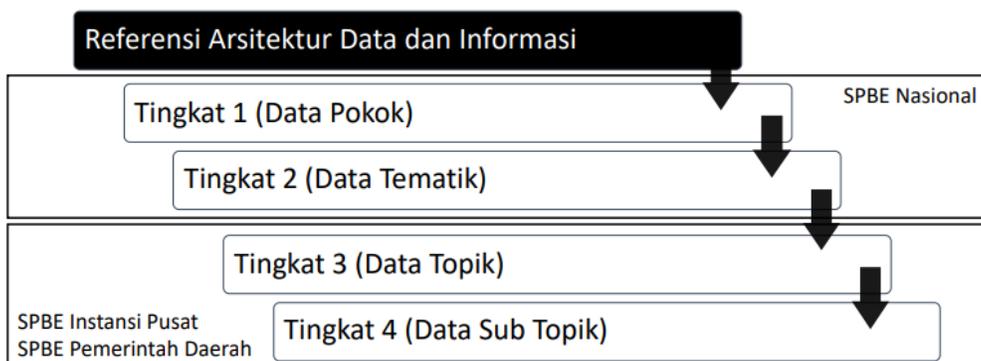
Gambar 1 Struktur RAB

### 3.2 Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Dalam Arsitektur Data ini, Pemerintah Kota Bandung mengacu kepada pedoman Arsitektur Data SPBE Nasional dalam bentuk Referensi Arsitektur Data (RAD). RAD ini memberikan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Sub Bab Pengantar Arsitektur Bisnis.

Struktur RAD SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu: 1) Data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai RAD tingkat 1 (pertama); dan 2) Data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam data urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai RAD tingkat 2 (kedua).

Taksonomi RAD SPBE Nasional terdiri dari 10 (sepuluh) data pokok di tingkat 1 (satu) dan 50 (lima puluh) data tematik di tingkat 2 (dua). Dengan demikian, Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun Arsitektur Data mengacu kepada RAD SPBE Nasional dengan melengkapi Arsitektur Datanya pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar 2.



Gambar 2 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Data dan Informasi akan menjadi masukan dalam menjalankan berbagai fungsi pada aplikasi SPBE hingga mendukung layanan pemerintah yang diharapkan.

### 3.3 Referensi Arsitektur Infrastruktur

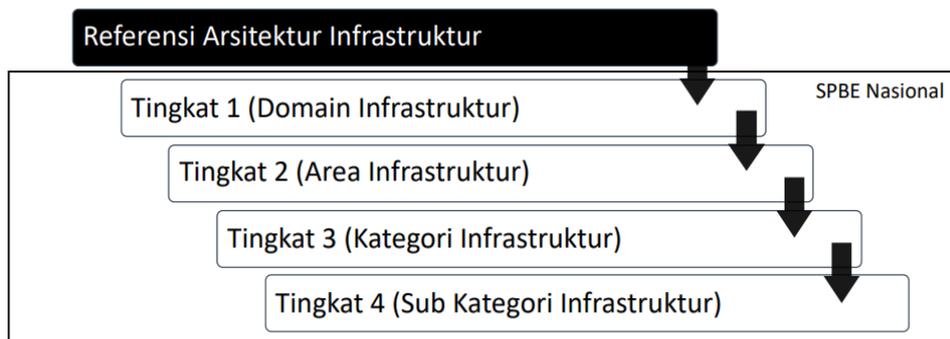
Arsitektur Infrastruktur mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya .

Dalam arsitektur infrastruktur ini, Pemerintah Kota Bandung mengacu kepada pedoman Arsitektur Infrastruktur SPBE Nasional dalam bentuk Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) dalam melakukan pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang direncanakan kedepannya, sehingga infrastruktur TIK dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilitasnya.

Struktur dari RAI SPBE Nasional pada 2 (dua) tingkat teratas, yaitu:

- 1) Domain, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain sebagai RAI tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Area, yang mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam area sesuai dengan masing-masing domain infrastrukturnya sebagai RAI tingkat 2 (kedua).

Taksonomi RAI terdiri dari 3 (tiga) domain di tingkat 1 dan 8 (delapan) area di tingkat 2, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur

Beberapa prinsip yang digunakan di dalam penyusunan Arsitektur Infrastruktur Pemerintah Kota Bandung adalah:

- 1) Taksonomi Arsitektur Infrastruktur harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
- 2) Didefinisikan sebagai hirarki elemen infrastruktur TIK;
- 3) Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- 4) Memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
- 5) Berbasis standar umum (open standard);
- 6) Dapat digunakan untuk mendukung Arsitektur Aplikasi dan Arsitektur Data melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh Arsitektur Keamanan.

### **3.4 Referensi Arsitektur Aplikasi**

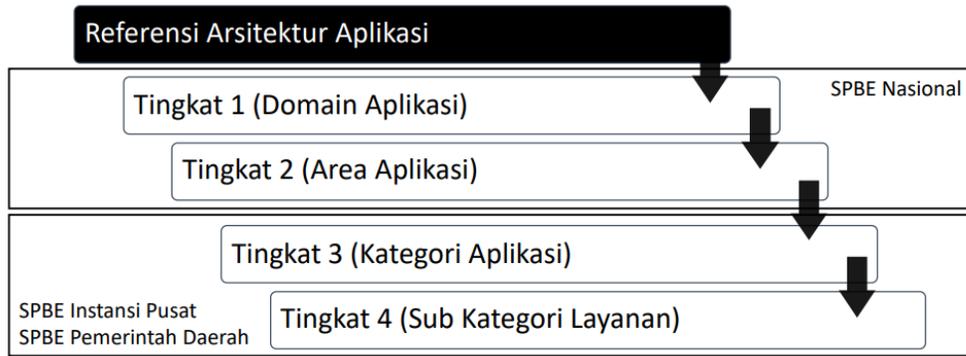
Dalam Arsitektur Aplikasi ini, Pemerintah Kota Bandung mengacu kepada pedoman Arsitektur Aplikasi SPBE Nasional dalam bentuk Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA). RAA adalah kerangka kerja untuk mengkategorikan aplikasi dalam mengidentifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi antar aplikasi. RAA juga menjadi dasar kebutuhan penyediaan infrastruktur TIK yang selanjutnya didefinisikan pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI).

Struktur RAA SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam 2 (dua) domain aplikasi sebagai RAA tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Area aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam area aplikasi sesuai dengan masing-masing domain aplikasinya sebagai RAA tingkat 2 (kedua).

Taksonomi RAA terdiri dari 2 (dua) domain aplikasi di tingkat 1 dan 3 (tiga) area di tingkat 2.

Pemerintah Kota Bandung menyusun Arsitektur Aplikasinya dengan melengkapi RAA pada tingkat di bawahnya sebagaimana terlihat pada Gambar 4 dibawah ini.



Gambar 4 Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi

Beberapa prinsip yang digunakan dalam penyusunan Arsitektur Aplikasi Pemerintah Kota Bandung adalah:

- 1) Taksonomi Arsitektur Aplikasi disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan atau pengintegrasian fungsi lain/baru dalam penyediaan kemampuan TIK;
- 2) Aplikasi yang berorientasi pada layanan;
- 3) Didefinisikan sebagai hirarki komponen aplikasi;
- 4) Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- 5) Berbasis standar terbuka (open source);
- 6) Terkorelasi dengan Arsitektur Layanan dan Arsitektur Data melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung Arsitektur Keamanan.

### 3.5 Referensi Arsitektur Keamanan

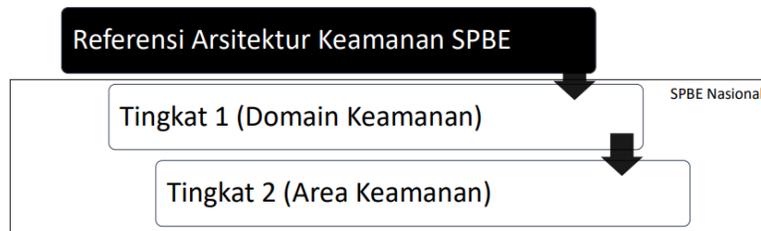
Dalam Arsitektur Keamanan ini, Pemerintah Kota Bandung mengacu kepada pedoman Arsitektur Keamanan SPBE Nasional dalam bentuk Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu dalam SPBE Pemerintah Kota Bandung.

Struktur dari RAK SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan uji kelaikan keamanan, sebagai RAK tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur SPBE sebagai RAK tingkat 2 (kedua).

Selanjutnya untuk mendefinisikan elemen didalamnya, akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE.

Taksonomi RAK terdiri dari 3 (tiga) domain keamanan di tingkat 1 dan 9 (sembilan) area keamanan di tingkat 2, sebagaimana terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5 Struktur Referensi Arsitektur Keamanan

### 3.6 Referensi Arsitektur Layanan

Dalam Arsitektur Layanan ini, Pemerintah Kota Bandung mengacu kepada pedoman Arsitektur Layanan SPBE Nasional dalam bentuk Referensi Arsitektur Layanan (RAL). RAL ini memberikan acuan dalam mengklasifikasikan layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Sub Bab Pengantar Arsitektur Bisnis.

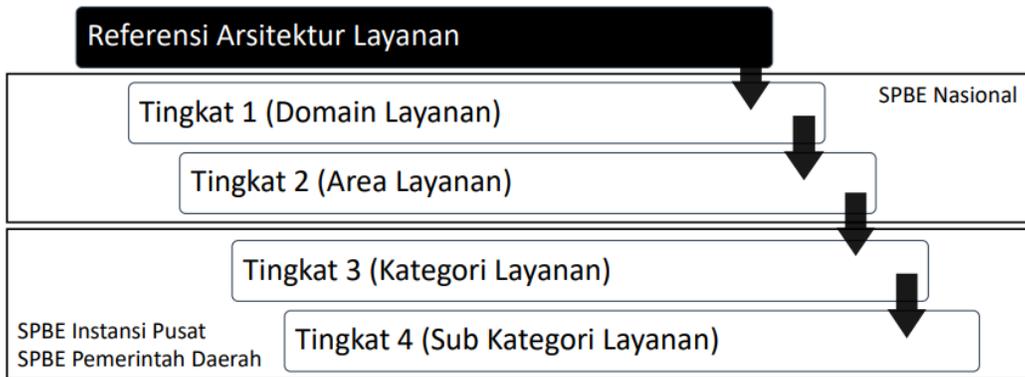
Arsitektur Layanan Pemerintah Kota Bandung didasari dari fungsi-fungsi yang ada di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan identifikasi serta mengelompokkan layanan pemerintahan yang ada, sehingga menjadi tematik layanan pemerintah Kota Bandung yang terintegrasi.

Di dalam struktur RAL SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai RAL tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai RAL tingkat 2 (kedua).

RAL terdiri dari 2 (dua) domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 40 (empat puluh) area layanan di tingkat 2 (kedua).

Pemerintah Kota Bandung menyusun Arsitektur Layanan mengacu kepada RAL SPBE Nasional, serta melengkapi Arsitektur Layanannya pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar 6.

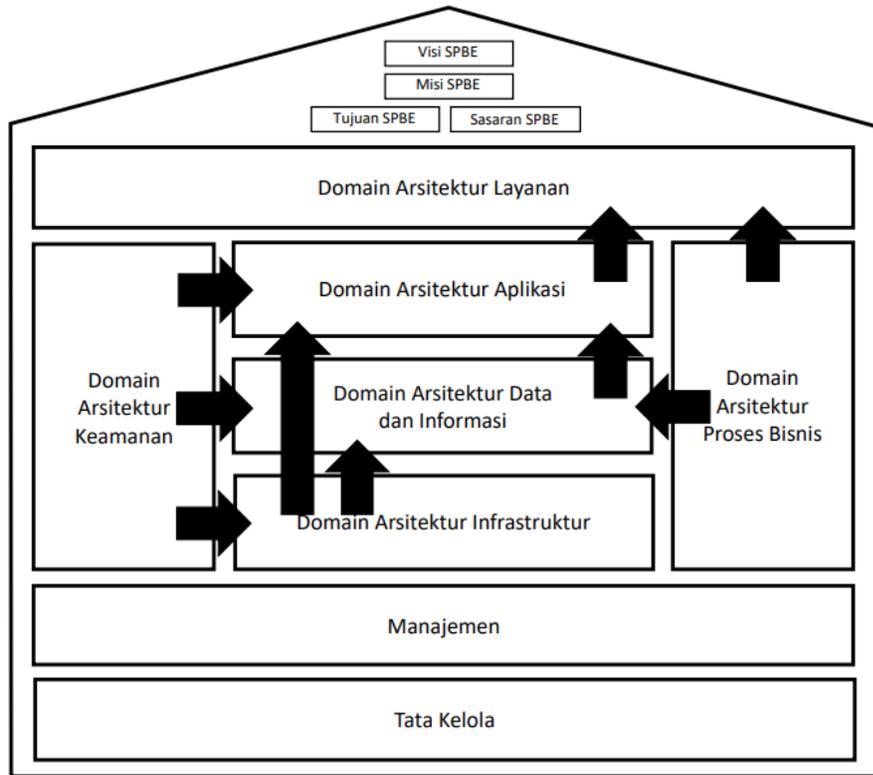


Gambar 6 Struktur Referensi Arsitektur Layanan

### 3.7 Keterkaitan Antar Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE Nasional terdapat 6 (enam) domain referensi arsitektur yang mempunyai saling keterkaitan yang erat. Keterkaitan antar referensi arsitektur dimulai dari domain proses bisnis, yakni sebuah urusan pemerintah pada dasarnya akan memiliki data dan informasi didalamnya. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, penggunaan data dan informasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan layanan, dimana layanan akan berbasis elektronik, berupa aplikasi yang berjalan diatas infrastruktur TIK berbagi pakai yang handal dan aman. Keterkaitan antar domain tersebut, dapat terlihat dalam kerangka kerja SPBE sebagaimana pada Gambar 7.

Setiap organisasi pemerintah, perlu mendefinisikan dengan jelas komponen-komponen ataupun entitas yang terkait dalam penyelenggaraan urusan yang diembannya. Dengan demikian, dapat dilakukan pemetaan semua entitas tersebut secara terintegrasi dengan lingkup nasional pada seluruh domain arsitektur SPBE. Kompleksitas yang ada dalam sistem pemerintahan sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pengaturan yang baik secara konvensional (non-digital).



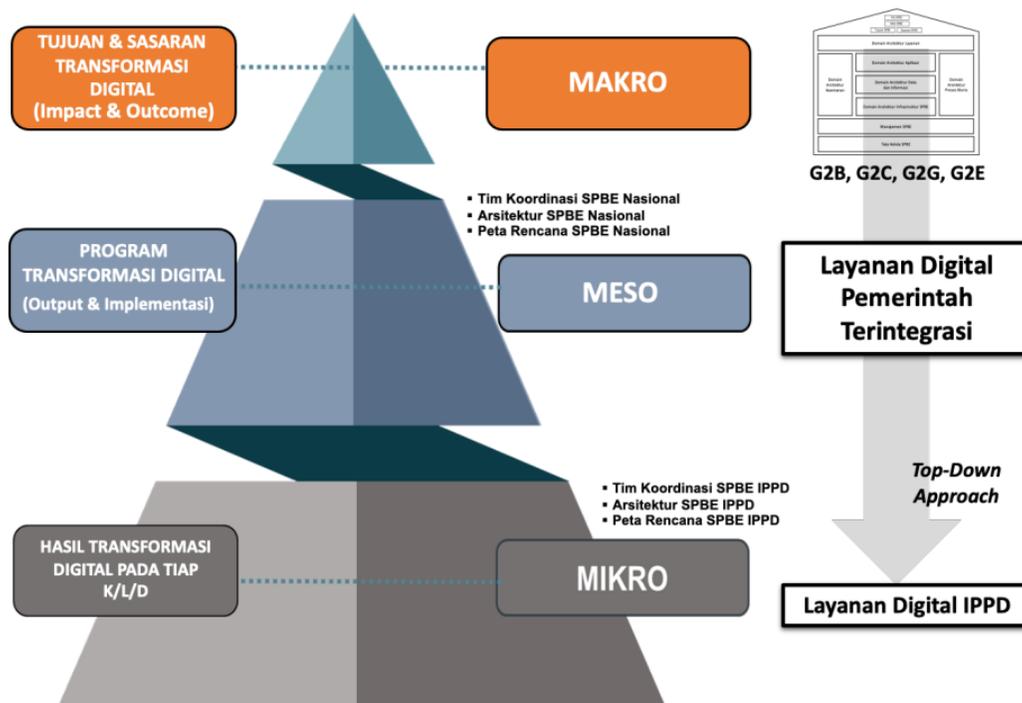
Gambar 7 Keterkaitan antar referensi arsitektur SPBE

Pemetaan entitas di atas akan menghasilkan sebuah peta arsitektur SPBE yang menyeluruh. Ini akan memberikan peluang untuk melihat apakah terdapat duplikasi fungsi yang tidak diperlukan. Dengan meminimalkan duplikasi yang ada akan mengurangi terjadinya pemborosan pembiayaan secara signifikan. Dikarenakan cakupan yang menyeluruh, maka arsitektur SPBE akan dapat mempermudah pendefinisian proses bisnis baru, penyederhanaan proses bisnis, pembentukan layanan yang inovatif, efisiensi penggunaan infrastruktur dengan berbagi pakai, efisiensi pengembangan aplikasi yang diperlukan, peningkatan kredibilitas pemerintah dengan informasi yang akurat dan terpercaya, dan lainnya.

## BAB 4 Domain Arsitektur Proses Bisnis

### 4.1 Domain Arsitektur Proses Bisnis Pemerintah Kota Bandung

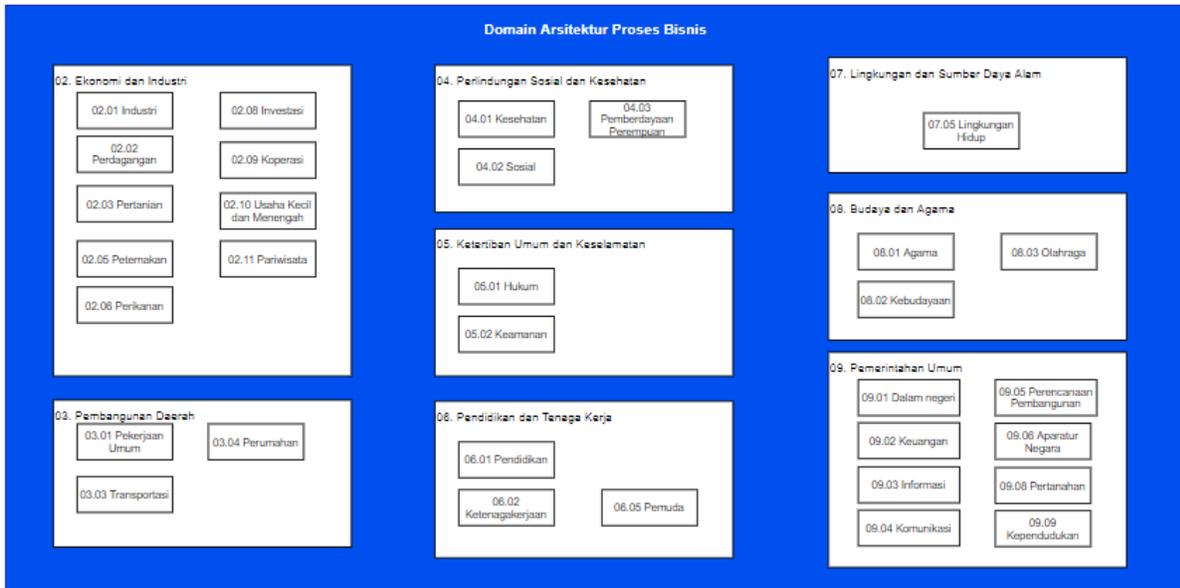
Dengan mengacu kepada RAB SPBE Nasional, maka Pemerintah Kota Bandung menyusun Arsitektur Proses Bisnisnya mengikuti Strategi Penyediaan Layanan Pemerintahan Terintegrasi sebagaimana terlihat pada gambar 8 di bawah ini.



Gambar 8 Strategi Penyediaan Layanan Pemerintah Terintegrasi

Berdasarkan gambar tersebut di atas, Pemerintah Kota Bandung menyediakan layanan pemerintah terintegrasi dalam tahapan mikro. Penyediaan layanan tersebut didukung oleh proses bisnis dari masing-masing perangkat daerah di Pemerintah Kota Bandung. Menyelaraskan dengan pedoman dari RAB, maka arsitektur bisnis Pemerintah Kota Bandung disusun berdasarkan taksonomi yang sudah ada, lalu dipetakan dengan urusan pemerintahan daerah di Pemerintah Kota Bandung.

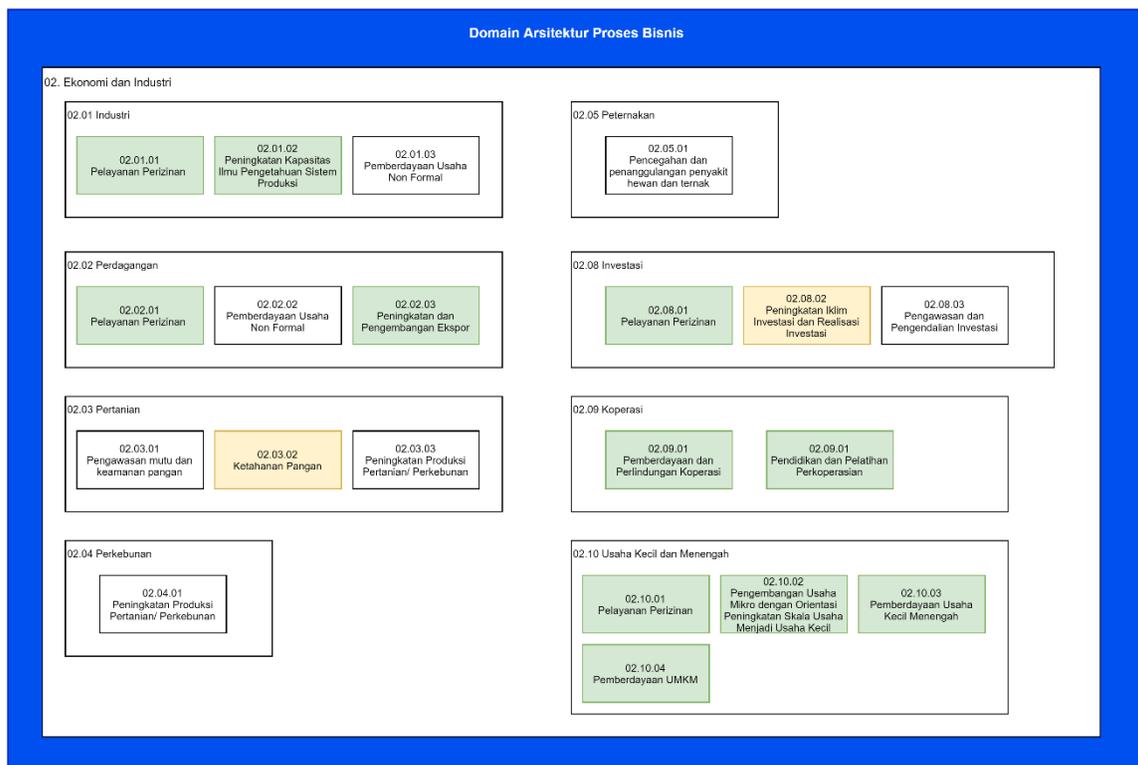
Adapun pemetaan proses bisnis Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 9 Domain Arsitektur Proses Bisnis Pemerintah Kota Bandung

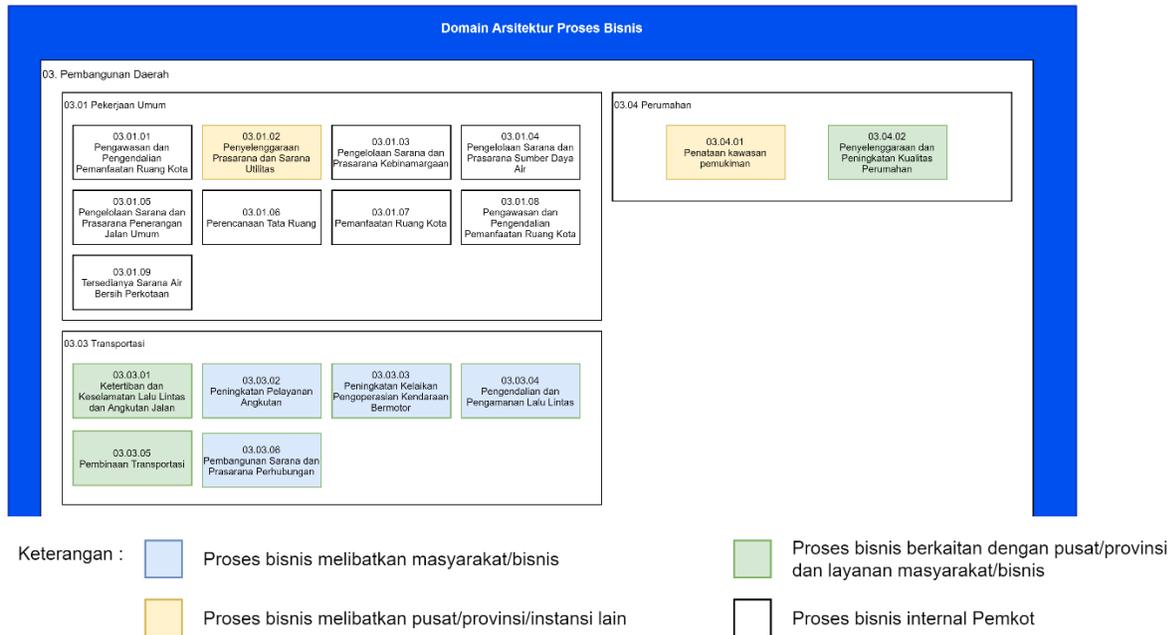
Dari taksonomi RAB SPBE Nasional yang terdiri dari 9 sektor pemerintahan di tingkat 1, ada 8 sektor pemerintahan yang dilaksanakan di Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan dari 46 urusan pemerintahan di tingkat 2, 32 urusan pemerintahan dilaksanakan di Pemerintah Kota Bandung.

Proses bisnis tersebut dapat dijabarkan menjadi lebih detail sebagai berikut.

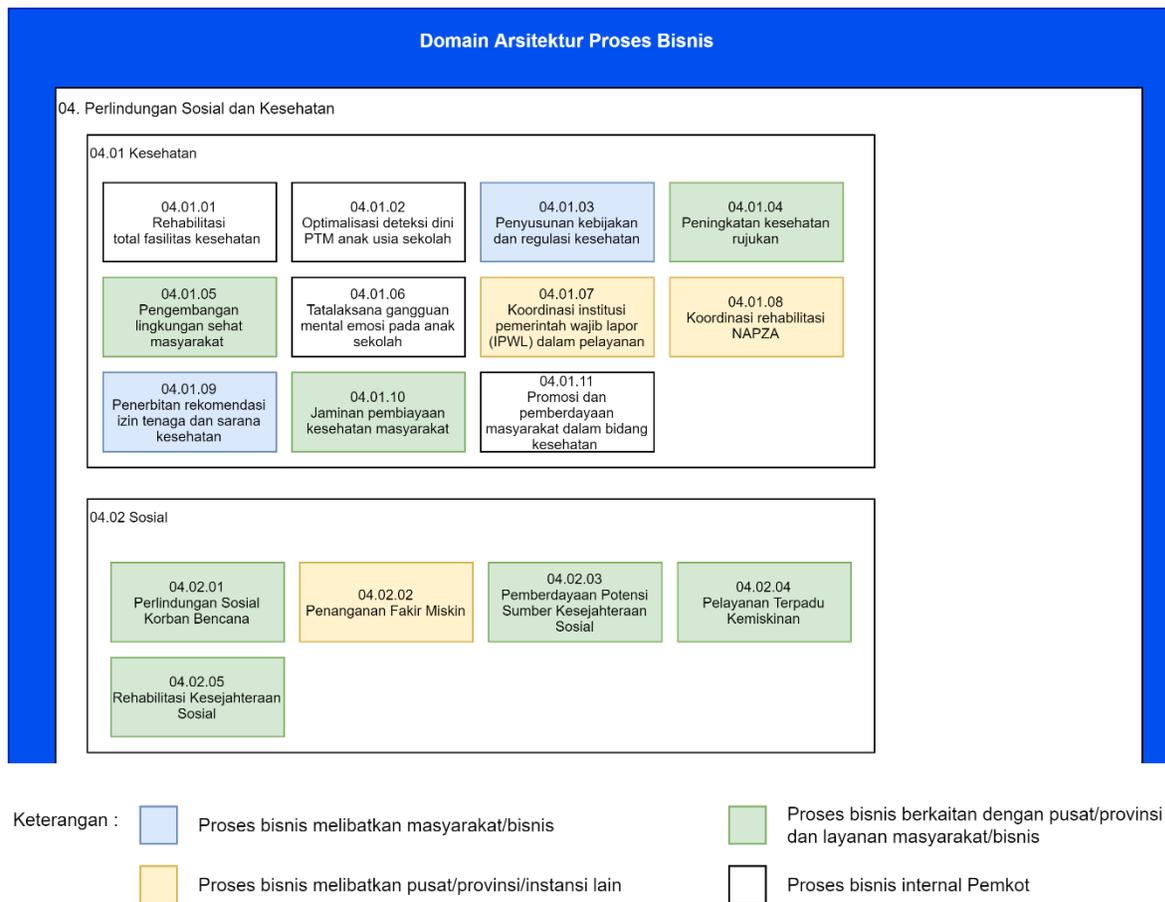


Keterangan :  Proses bisnis melibatkan masyarakat/bisnis  Proses bisnis berkaitan dengan pusat/provinsi dan layanan masyarakat/bisnis  
 Proses bisnis melibatkan pusat/provinsi/instansi lain  Proses bisnis internal Pemkot

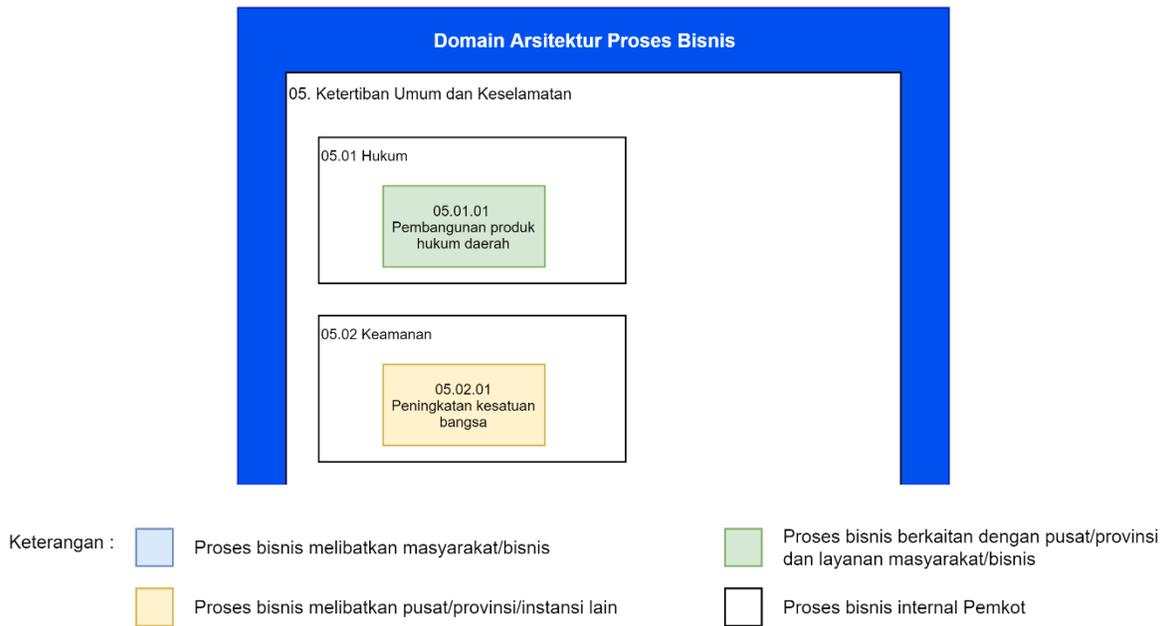
Gambar 10 Domain Arsitektur Proses Bisnis Detil Ekonomi dan Industri



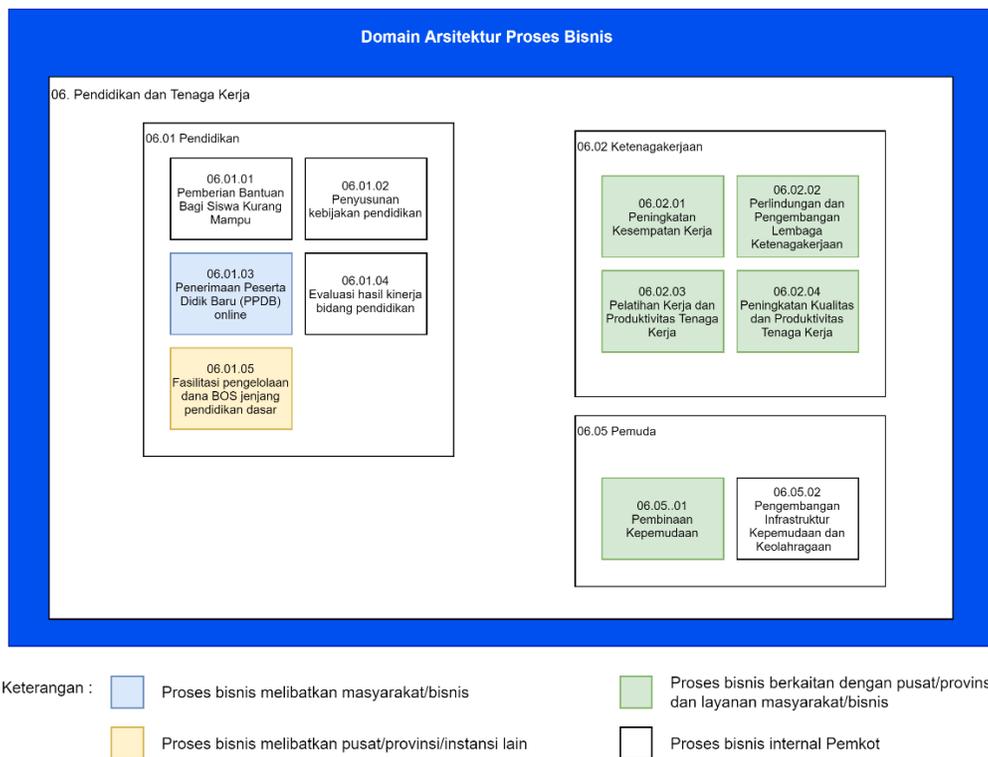
Gambar 11 Domain Arsitektur Proses Bisnis Detil Pembangunan Daerah



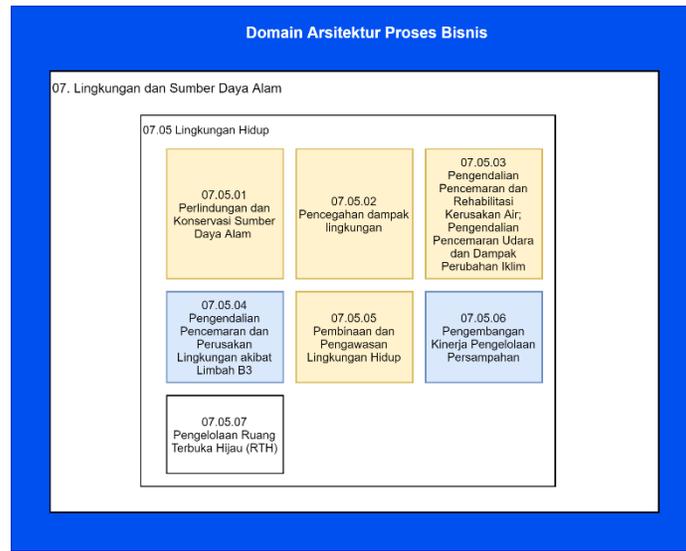
Gambar 12 Domain Arsitektur Proses Bisnis Detil Perlindungan Sosial dan Kesehatan



Gambar 13 Domain Arsitektur Proses Bisnis Detil Ketertiban Umum dan Keselamatan

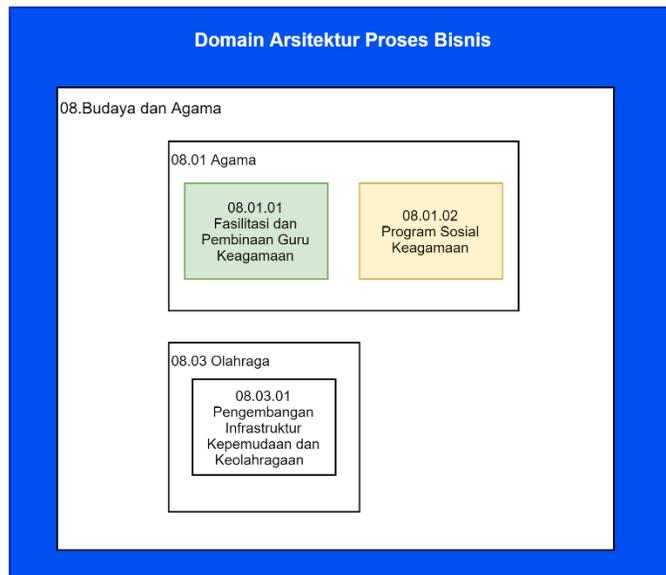


Gambar 14 Domain Arsitektur Proses Bisnis Detil Pendidikan dan Tenaga Kerja



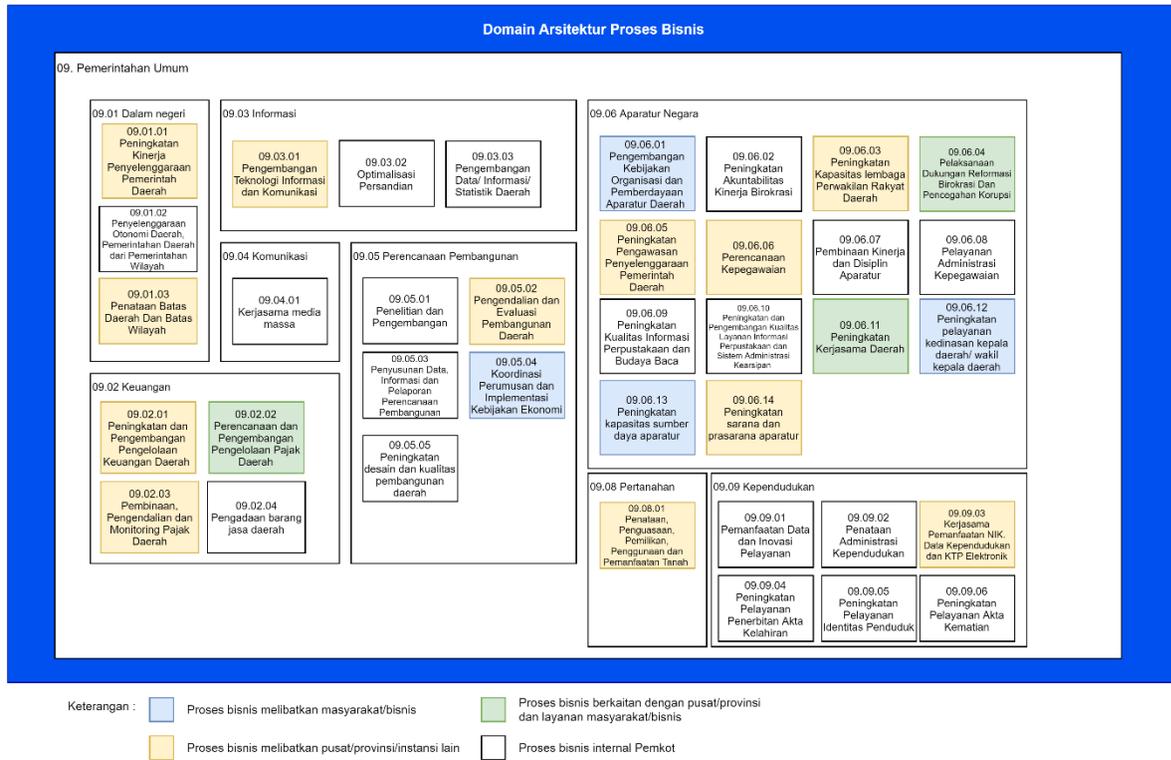
Keterangan : ■ Proses bisnis melibatkan masyarakat/bisnis ■ Proses bisnis berkaitan dengan pusat/provinsi dan layanan masyarakat/bisnis  
■ Proses bisnis melibatkan pusat/provinsi/instansi lain □ Proses bisnis internal Pemkot

Gambar 15 Domain Arsitektur Proses Bisnis Detil Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam



Keterangan : ■ Proses bisnis melibatkan masyarakat/bisnis ■ Proses bisnis berkaitan dengan pusat/provinsi dan layanan masyarakat/bisnis  
■ Proses bisnis melibatkan pusat/provinsi/instansi lain □ Proses bisnis internal Pemkot

Gambar 16 Domain Arsitektur Proses Bisnis Detil Budaya dan Agama



Gambar 17 Domain Arsitektur Proses Bisnis Detil Pemerintahan Umum

Untuk masing-masing proses bisnis dipetakan terhadap beberapa kondisi, yaitu:

- Proses bisnis yang melibatkan masyarakat ataupun bisnis
- Proses bisnis yang melibatkan instansi pusat/provinsi/instansi lain
- Proses bisnis yang melibatkan masyarakat ataupun bisnis serta instansi pusat/provinsi/instansi lain
- Proses bisnis yang dilaksanakan secara internal

Pemetaan tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam penentuan layanan serta integrasi yang dibutuhkan.

## 4.2 Kondisi Saat Ini

Urusan pemerintahan Pemerintah Kota Bandung beserta perangkat daerah yang bertanggung jawab diatur dalam Perda Kota Bandung no. 3 tahun 2021 tentang Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Berikut ini adalah pembagian urusan di Pemerintah Kota Bandung saat ini.

Perda 3 tahun 2021		
Nama	Urusan	Tipe
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah	A
Dinas Pendidikan	urusan pemerintahan bidang pendidikan	A
Dinas Kesehatan	urusan pemerintahan bidang kesehatan;	A
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor sumber daya air dan bina marga	A
Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor cipta karya, bina konstruksi, tata ruang dan pemukiman;	A
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan pertamanan;	A
Dinas Sosial	urusan pemerintahan bidang sosial;	A
Dinas Ketenagakerjaan	urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;	A
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;	A
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;	A
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian dan perikanan	A
Dinas Lingkungan Hidup	urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	A
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;	A
Dinas Perhubungan	urusan pemerintahan bidang perhubungan	A
Dinas Komunikasi dan Informatika	urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;	A
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;	A
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;	A
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;	A
Dinas Pemuda dan Olahraga	urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;	A
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;	A
Dinas Arsip dan Perpustakaan	urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;	A
Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana;	A
Satuan Polisi Pamong Praja	urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.	A
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	fungsi penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;	A
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;	A
Badan Keuangan dan Aset Daerah	fungsi penunjang keuangan;	A
Badan Pendapatan Daerah	fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;	A
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.	A

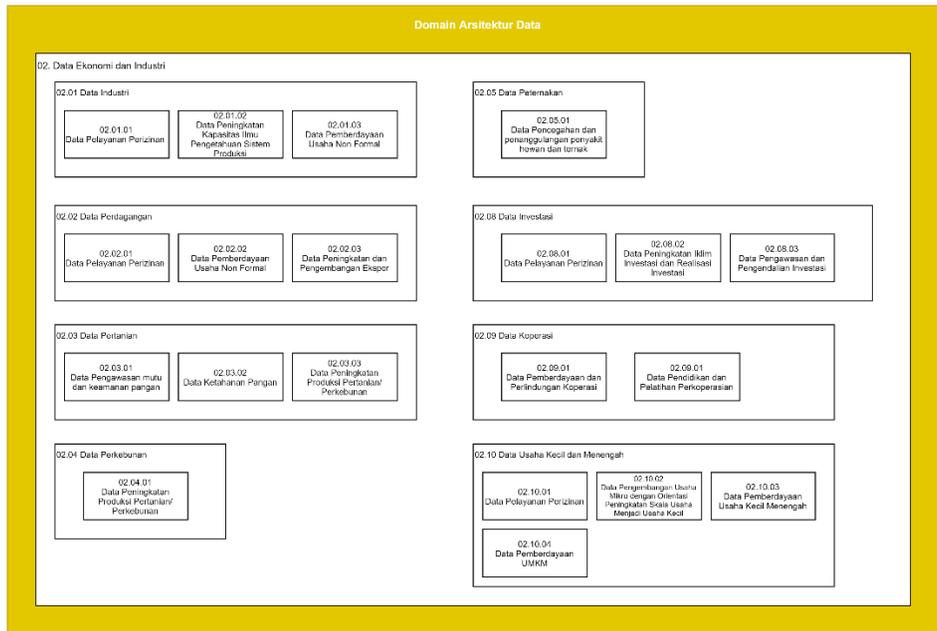
### 4.3 Analisis Gap

Terdapat beberapa taksonomi proses bisnis yang ada pada RAB tetapi tidak dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut karena beberapa hal, diantaranya:

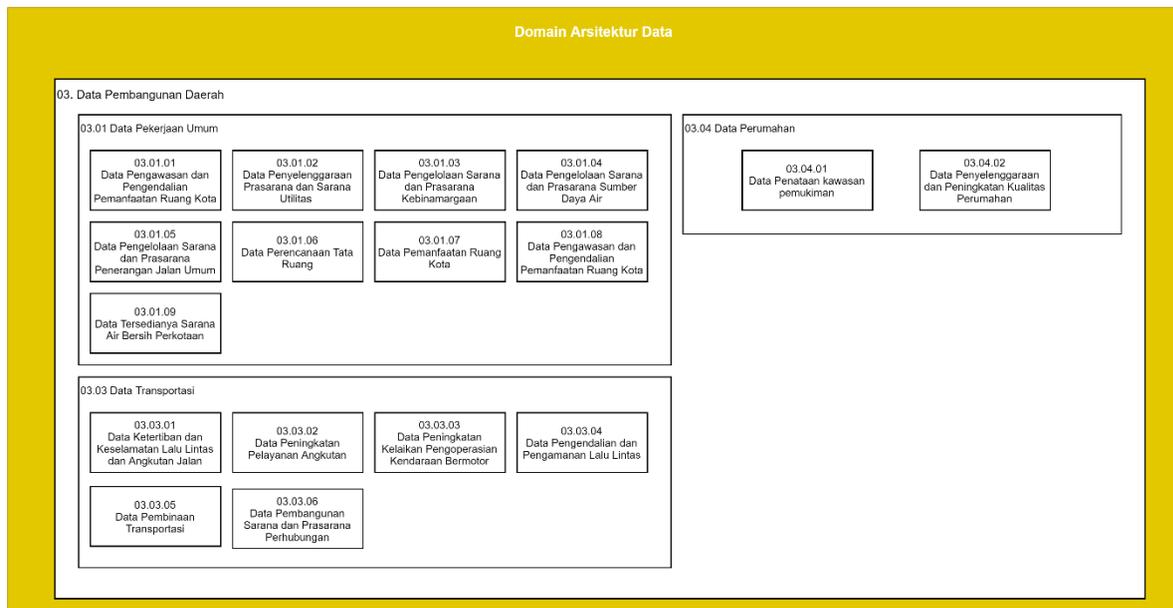
- Ada proses bisnis pada RAB yang merupakan kewenangan pusat, seperti: pertahanan, hubungan luar negeri, dan lain-lain.
- Ada proses bisnis pada RAB yang memang tidak dilaksanakan di Kota Bandung, seperti: pertambangan, kelautan, dan lain-lain.

Meskipun demikian, untuk saat ini untuk proses bisnis pemerintahan kota Bandung dirasakan sudah melingkupi seluruh kebutuhan layanan masyarakat, sehingga dapat dikatakan sudah mencukupi dan tidak membutuhkan pengembangan. Selain itu, seluruh proses bisnis tersebut telah dilaksanakan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan Perda yang berlaku.

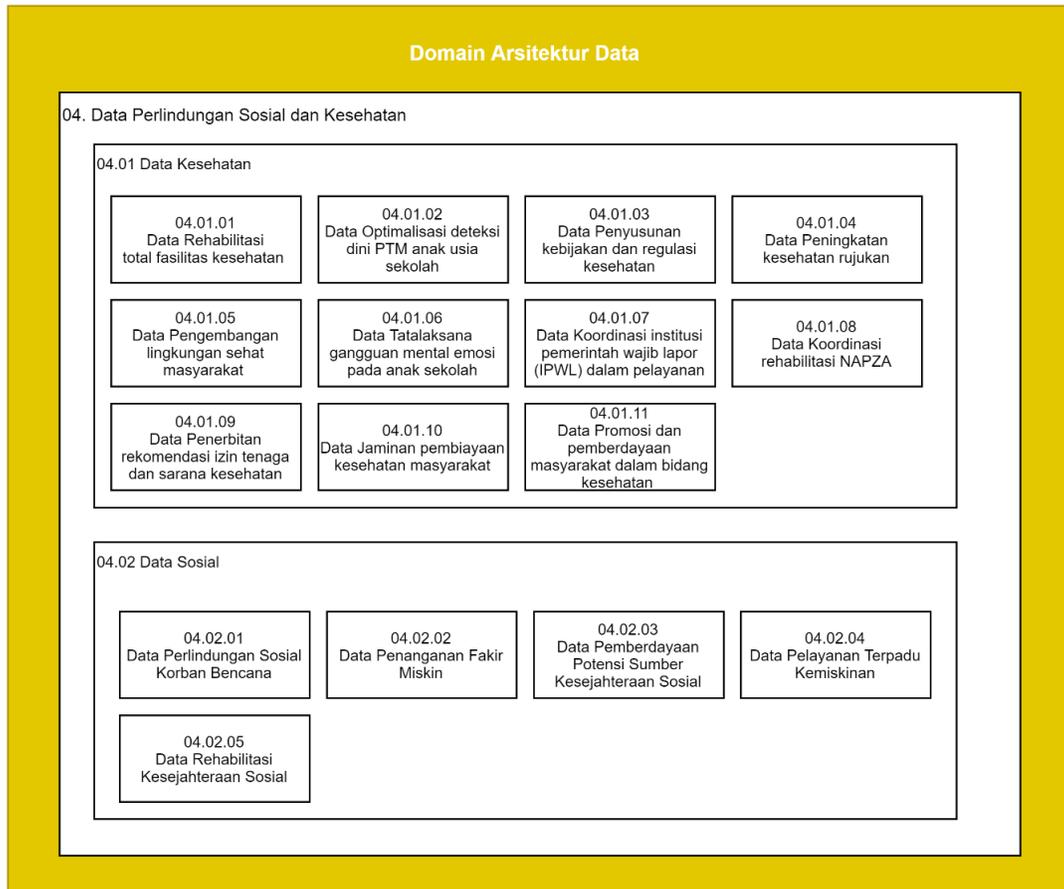




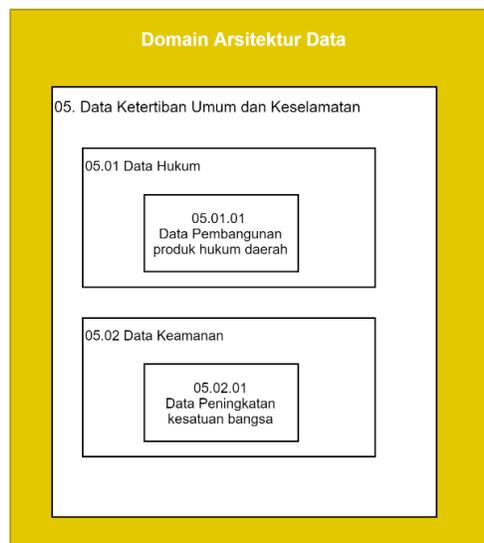
Gambar 19 Domain arsitektur data untuk data tematik Ekonomi dan Industri



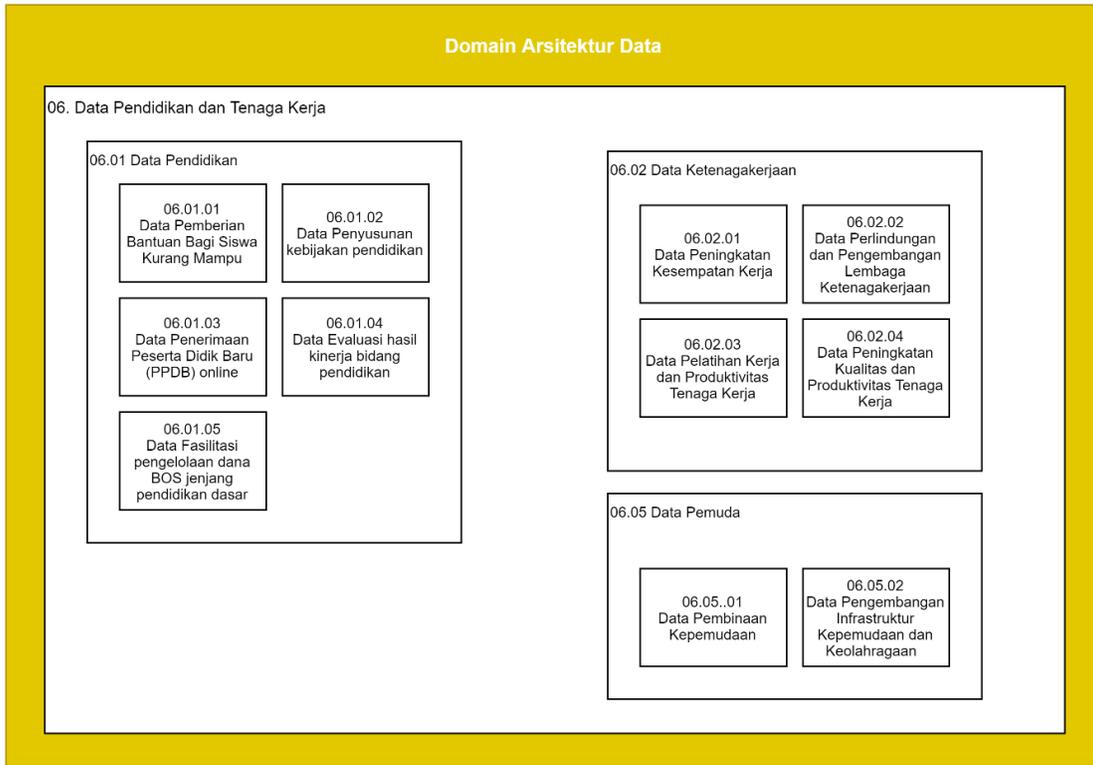
Gambar 20 Domain arsitektur data untuk data tematik Pembangunan Daerah



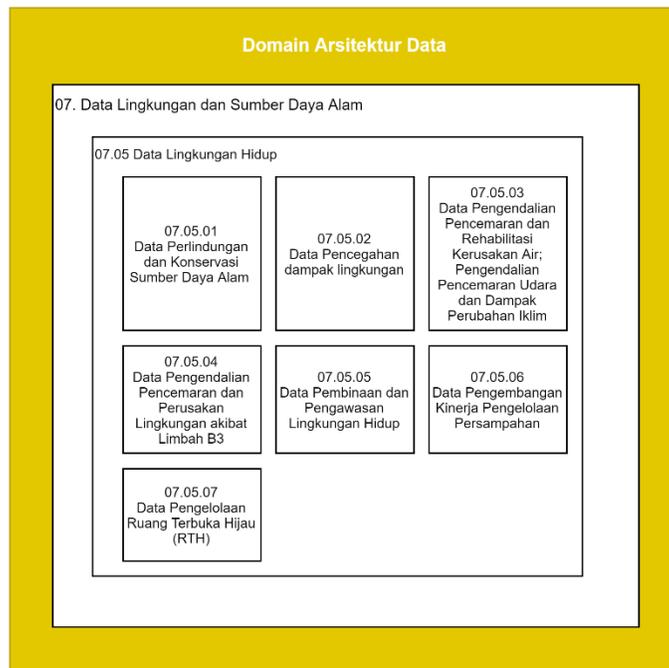
Gambar 21 Domain arsitektur data untuk data tematik Perlindungan Sosial dan Kesehatan



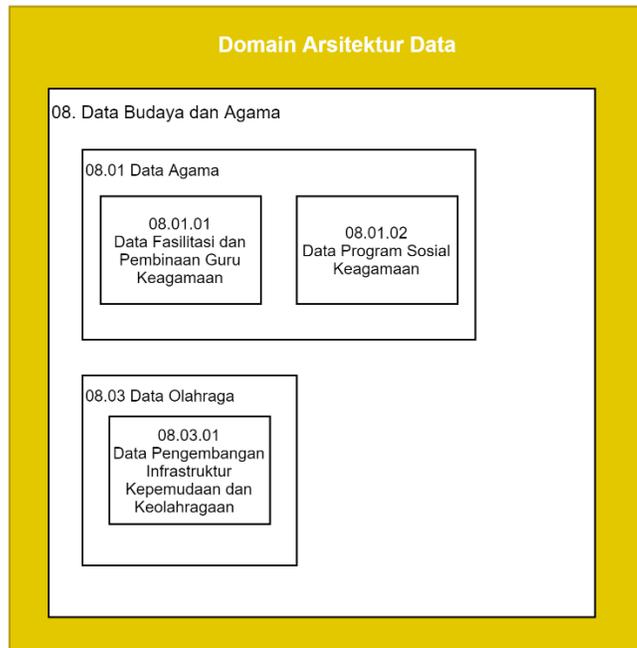
Gambar 22 Domain arsitektur data untuk data tematik Ketertiban Umum dan Keselamatan



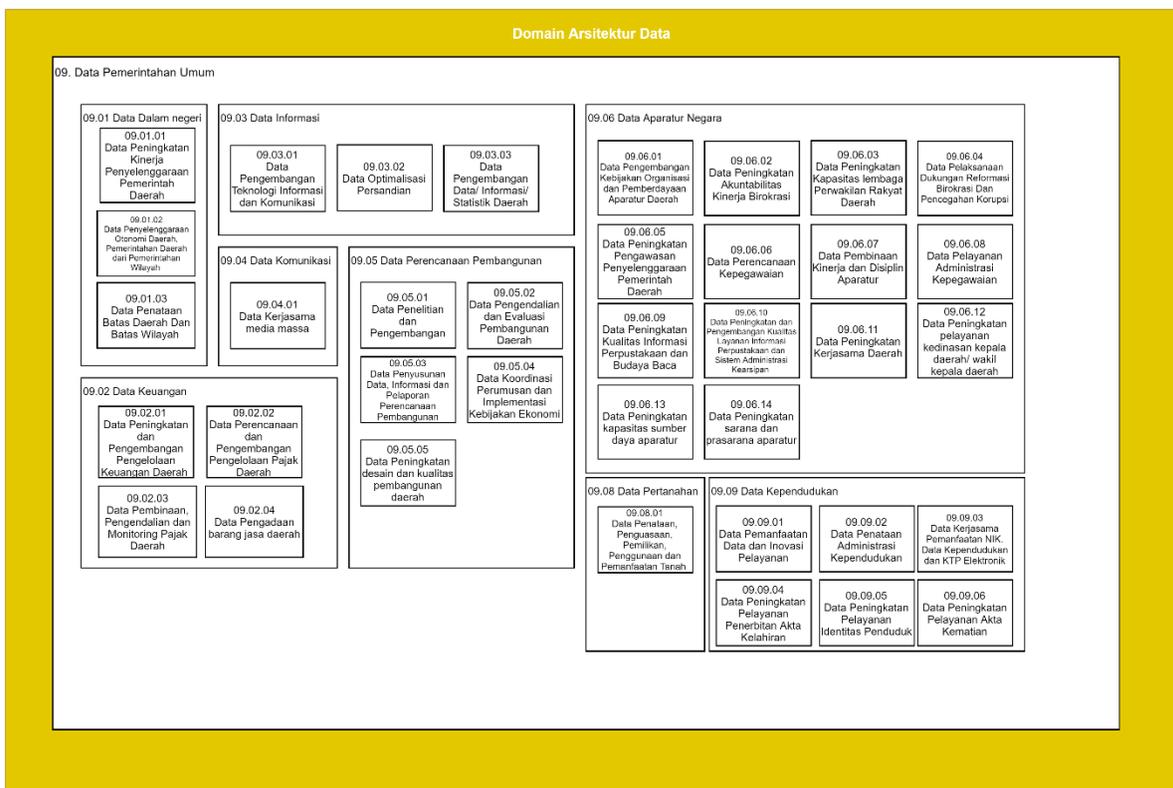
Gambar 23 Domain arsitektur data untuk data tematik Pendidikan dan Tenaga Kerja



Gambar 24 Domain arsitektur data untuk data tematik Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam



Gambar 25 Domain arsitektur data untuk data tematik Budaya dan Agama



Gambar 26 Domain arsitektur data untuk data tematik Pemerintahan Umum

## 5.2 Kondisi saat ini

Data yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung (melalui berbagai dinas di dalamnya) merupakan input dan hasil dari pelaksanaan proses bisnis yang sudah dijelaskan pada arsitektur proses bisnis. Saat ini,

data dan informasi yang ada diproses di Pemerintah Kota Bandung sudah menjadi referensi ataupun sumber bagi pemrosesan data lainnya, sehingga dapat dikatakan sudah sebagian terintegrasi dan saat ini dalam proses pengintegrasian secara menyeluruh.

Saat ini sudah ada Perwal Manajemen Data yang sudah disahkan tahun 2018, dan dalam proses realisasi secara keseluruhan. Dengan mengimplementasikan Perwal Manajemen Data tersebut, sudah tersusun identifikasi data dan penanggung jawabnya pada masing-masing Perangkat Daerah dalam bentuk RACI Matrix yang disampaikan pada lampiran.

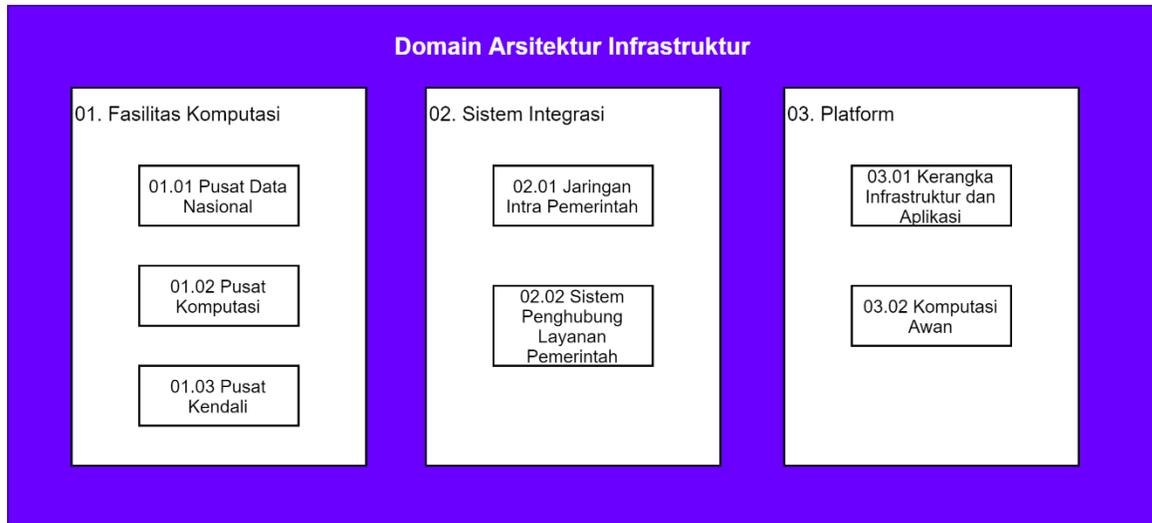
### **5.3 Analisis Gap**

Perwal Manajemen Data perlu untuk ditingkatkan realisasi dan implementasinya. Selain itu, perlu untuk mereview Perwal Manajemen Data sehingga sesuai dengan Peraturan Manajemen Data SPBE yang dikeluarkan oleh Bappenas maupun pedoman teknis dari BPS.

## BAB 6 Domain Arsitektur Infrastruktur

### 6.1 Domain Arsitektur Infrastruktur Pemerintah Kota Bandung

Dengan merujuk pada Referensi Arsitektur Infrastruktur, maka komponen untuk domain arsitektur infrastruktur dapat dilihat pada Gambar 1 Gambar 27.



Gambar 27 Domain Arsitektur Infrastruktur

Keterangan dari komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pusat Data Nasional adalah fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data
2. Pusat Komputasi adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu
3. Pusat Kendali adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem
4. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/organisasi
5. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan
6. Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi adalah Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi

7. Komputasi Awan adalah Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi cloud untuk lingkungan kerja aplikasi

Berdasarkan komponen-komponen tersebut, maka Pemerintah Kota Bandung menyusun rancangan domain arsitektur infrastruktur yang berbasis Gov Cloud. Gov Cloud merupakan teknologi yang merujuk kepada seluruh produk dan solusi berbasis komputasi awan (*cloud computing*) dan virtualisasi yang dikembangkan khusus untuk institusi dan lembaga pemerintahan. Teknologi *cloud* merupakan konsep untuk memungkinkan akses yang praktis, nyaman, dan luas terhadap sebuah kumpulan sumber daya komputasi bersama yang dapat dikonfigurasi (contoh : jaringan, server, storage, aplikasi, dan layanan) dan dapat digunakan dengan usaha, manajemen, atau interaksi dengan penyedia layanan yang minim. Hal ini juga memudahkan pengguna layanan untuk menjaga datanya dengan mudah dan aman.

Beberapa karakteristik dari teknologi cloud :

- Layanan mandiri yang sesuai kebutuhan  
Setiap layanan yang dibutuhkan bisa diakses sendiri dengan interaksi minim ke penyedia dan konfigurasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing (contoh : kecepatan CPU, memori, *storage*). Dalam pemerintahan ini bisa diartikan bahwa setiap satuan kerja dapat mengakses dan mengkonfigurasi sendiri kelayanan dengan mudah sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- Akses jaringan luas  
Dapat diakses dengan mudah melalui jaringan dari berbagai perangkat dan juga tempat. Dalam pemerintahan ini berarti jaringan pemerintah dapat diakses dengan mudah baik oleh aparatur (untuk internal) dan publik (untuk layanan publik) dari berbagai perangkat dan tempat.
- Penyatuan sumber daya  
Sumber daya komputasi yang ada disatukan dan akses dapat dilakukan dengan mudah tanpa perlu mengkonfigurasi aset atau sistem yang ada dibelakang pintu akses. Semua pengguna, walau terisolasi satu sama lain, sebenarnya mengakses sebuah kumpulan sumber daya yang sama, dan manajemen dilakukan oleh sistem *cloud* sehingga konsumsi sumber daya bisa diatur oleh sistem menjadi lebih efisien (jika tidak digunakan bisa dimatikan otomatis, dsb). Dalam pemerintahan hal ini berarti pemerintah cukup memiliki sebuah kumpulan sumber daya yang dapat

diakses dan digunakan oleh berbagai satuan kerja dalam pekerjaannya sehingga mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan.

- **Elastisitas yang mudah/cepat**  
Perubahan layanan baik dari konfigurasi, ukuran, maupun detail lain dapat dilakukan dengan cepat dan mudah serta transparan dari pengguna. Pengguna dapat menentukan konfigurasi dan perubahan pada layanan yang dikonsumsi dan *cloud* akan melakukan perubahan dengan cepat. Dalam pemerintahan ini berarti bahwa ketika ada perubahan kebutuhan, setiap satuan kerja dapat dengan cepat dan mudah mengubah layanan yang digunakannya sesuai kebutuhan, tanpa perlu setup dan penyesuaian ulang.
- ***Measured service***  
Setiap layanan dapat diukur dan diketahui penggunaannya oleh sistem, sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi di kemudian hari. Konsep ini juga meminimalisir interaksi pengguna dan penyedia ketika transaksi, karena penggunaan sudah dapat diketahui dan bahkan dapat dimanfaatkan untuk otomatisasi layanan. Dalam pemerintahan ini berarti bahwa penggunaan dan transaksi proses bisnis pemerintahan dapat dengan mudah dimonitor sehingga kinerja pemerintahan dapat dimonitor dan dievaluasi dengan mudah.

Secara fundamental, Gov Cloud memungkinkan tata kelola teknis infrastruktur IT yang mudah, cepat, dan efisien baik dalam biaya maupun tenaga. Beberapa kapabilitas *cloud* yang sangat mendukung pemerintahan antara lain :

- ***Multi-tenancy***  
Setiap satuan kerja dapat mengembangkan dan menggunakan aplikasi yang di-host di *Cloud central*, dengan tetap menjaga independensi dan isolasi data, aplikasi, dan informasi lain yang tidak dibutuhkan oleh satuan kerja lain atau publik
- ***Elasticity and Load Balancing***  
*Platform Cloud* dapat mengalokasikan sumberdaya komputasi ke satuan kerja yang membutuhkan secara dinamis, sehingga penggunaan sumberdaya menjadi lebih efisien dan investasi IT tepat sasaran.
- ***Identity management***

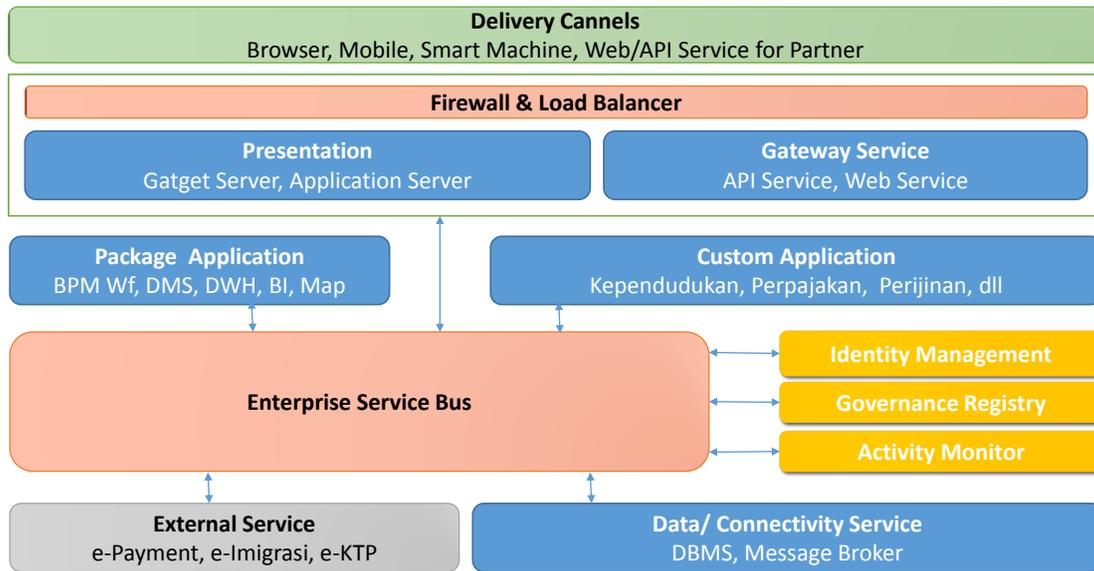
Manajemen identitas yang didasarkan pada tupoksi dan kebijakan menjamin hanya pengguna yang terotorisasi sajalah yang dapat mengakses data, layanan, atau aplikasi yang telah ada pada *cloud*.

- *Data services* (penyebaran data melalui *Web services*)  
Data dapat ditransaksikan dengan mudah dan aman dari berbagai sistem apabila dibutuhkan.
- *API management*  
Pemerintah dapat menyampaikan informasi, proses, atau data kepada satuan kerja lain atau publik dengan aman dan mudah, serta dalam bentuk yang mempermudah pihak lain untuk mengembangkan aplikasi dari informasi tersebut.
- *Monitoring and billing*  
Pemerintah dapat mengukur penggunaan dan tagihan masyarakat, satuan kerja, atau pihak lain dengan mudah melalui kapabilitas *platform cloud*.
- *Governance*  
Tidak hanya mengatur siklus penggunaan aplikasi *cloud*, tetapi pemerintah juga dapat memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan oleh satuan kerja atau pihak lain sudah mengikuti aturan hukum, kebijakan, dan tata kelola pemerintah.

Sejalan dengan konsepnya yang menyatukan sumber daya dan mendistribusikannya sebagai layanan, maka Gov Cloud memiliki arsitektur khusus yang mampu mendukung tujuannya tersebut. Dalam arsitektur ini terdapat komponen-komponen dengan kapabilitas khusus yang memungkinkan Gov Cloud memberikan layanannya. Dengan interaksi berbagai komponen didalam Gov Cloud ini maka sebuah sistem yang mampu memberikan layanan bagi seluruh satuan pemerintahan dapat dicapai.

GovCloud merupakan *Software platform* berbasis *cloud* yang diusulkan untuk Pemerintah Kota Bandung. *Platform* ini berjalan di atas infrastruktur *cloud-computing*. Dengan demikian dapat dijamin integritas dan reliabilitasnya.

*Software platform* ini juga dirancang untuk memenuhi 10 tren teknologi informasi untuk sektor pemerintah. Lebih lanjut arsitektur dari Gov Cloud dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 28 Arsitektur Sistem Gov Cloud Pemerintah Kota Bandung

Berikut adalah penjelasan dari Gambar 28 Arsitektur Sistem Gov Cloud Pemerintah Kota Bandung:

### 6.1.1 Delivery Channels

*Delivery Channels*, merupakan *channel* akses bagi user pengguna aplikasi Pemerintah Kota Bandung. *Channel* ini diusulkan mendukung kriteria ke-2 (*Multichannel Citizen Engagement*) dari tren teknologi informasi 2016. Dengan model ini, setiap pengguna dapat mengakses layanan aplikasi melalui *browser* pada perangkat *desktop/ laptop* atau *mobile*, perangkat *mobile*, *smart machine* (mesin khusus) maupun melalui layanan antar muka aplikasi lain yang dikembangkan dalam bentuk *service*. Artinya masyarakat atau organisasi lain yang mengembangkan aplikasi sendiri pun dapat mengakses layanan aplikasi/ data yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung.

### 6.1.2 Firewall and Load Balancer

Lapisan ini diperlukan untuk menangani masalah akses yang besar dan keamanan. *Firewall* digunakan untuk memfilter akses dari lokasi-lokasi yang diijinkan saja untuk aplikasi tertentu. Misalnya: untuk akses publik dari mana saja diijinkan untuk layanan tertentu saja yang dinyatakan terbuka. Sedangkan layanan khusus yang sifatnya terbatas (seperti: *smart machine* untuk *electronic parking system – EPS*, hanya dari lokasi tertentu saja, demikian juga layanan berbasis *web service* dan API hanya dari *host* yang telah memperoleh ijin/ bekerjasama saja). Sedangkan *load balancer* untuk menangani beban akses yang tinggi dan jaminan ketersediaan layanan tersebut. Dengan demikian layanan yang dapat diakses melalui *delivery*

*channels* telah memenuhi aspek ketersediaan (*availability*) dan keamanan (*security*) sebagaimana terdapat dalam tren no 10 (*Risk Based Security*).

### **6.1.3 Presentation**

Pada bagian ini terdapat 2 layanan, yaitu: *application server* yang menyediakan presentasi berbasis *web* dan *gadget server* yang menyediakan presentasi berbasis *mobile*. Semua aplikasi ke *end user* diberikan dalam bentuk 2 tampilan ini. Oleh karena itu, setiap aplikasi yang dikembangkan harus mendukung konsep *responsive design*, di mana tampilan (*presentation*) aplikasi kompatibel dengan mode *web desktop* maupun perangkat *mobile*.

### **6.1.4 Gateway Service**

Bagian ini khusus melayani permintaan informasi atau akses melalui layanan *web service* ataupun *application programming interface* (API) tertentu. Layanan ini diberikan kepada pihak lain atau masyarakat yang ingin memanfaatkan data (*open data/ analytic anywhere*) menggunakan mesin otomatis/ server ataupun untuk mengembangkan layanan cerdas berbasis *internet of things* (IOT) dan *smart machine*. Akses yang diberikan melalui *web service* ataupun API ini tetap berbasis otentifikasi/ otorisasi pada layanan *identity management* sehingga tetap bertanggung jawab.

### **6.1.5 Package Application**

Pada layer ini dijalankan aplikasi-aplikasi paket yang siap disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kota Bandung. Aplikasi paket ini, antara lain:

(a) *Business Process Management/ Workflow* (BPM/WF) yang digunakan untuk integrasi aplikasi proses bisnis sehingga sangat fleksibel untuk menangani perubahan alur data/ informasi antar proses yang melibatkan banyak unit kerja/ lintas fungsi.

(b) *Document Management System* (DMS) dapat digunakan untuk mengelola dokumen maupun pengetahuan, sehingga memudahkan proses dokumentasi dan akses dalam bentuk pencarian yang *full-text*.

(c) *Data Ware House dan Business Intelligence* (DWH & BI), digunakan untuk mengintegrasikan data menggunakan prinsip *extract-transform-load* (ETL) dan menyimpan data historis dan agregat ke dalam *data warehouse*. Bagian-bagian *data warehouse* untuk *subject* tertentu dapat disimpan dalam *data mart* yang dapat ditampilkan dalam bentuk *dashboard* maupun laporan multidimensi. Data ini juga dapat dianalisis menggunakan *analytical tools business*

*intelligence*. Data yang terintegrasi dan hasil analisis dapat digunakan untuk mendukung program *open data* dan *analytic anywhere*.

(d) *Map server* yang dapat digunakan untuk mengelola peta kota Bandung yang terintegrasi sehingga dapat mewujudkan kebijakan satu peta (*one map policy*).

#### **6.1.6 Custom Applications**

Yaitu semua aplikasi yang dikembangkan secara mandiri oleh Pemerintah Kota Bandung, maupun aplikasi-aplikasi khusus dari instansi pemerintah pusat. Semua aplikasi ini harus dapat mengakses layanan lain melalui *middleware* berupa *enterprise service bus* (ESB). Aplikasi ini seperti: aplikasi kependudukan, kepegawaian, perijinan, dan aplikasi lainnya.

#### **6.1.7 Enterprise Service Bus (ESB)**

Merupakan komponen utama dari arsitektur Gov Cloud ini. ESB merupakan mediator (*middleware*) untuk mengintegrasikan seluruh komponen. Melalui ESB ini antar komponen aplikasi, data, layanan luar dan manajemen berinteraksi bertukar pesan menggunakan *service oriented architecture* (SOA). ESB ini merupakan *core service* dari *software defined architecture* (SDA) sehingga dapat mempercepat proses penyediaan layanan atas dasar layanan-layanan dasar aplikasi yang telah ada sebelumnya.

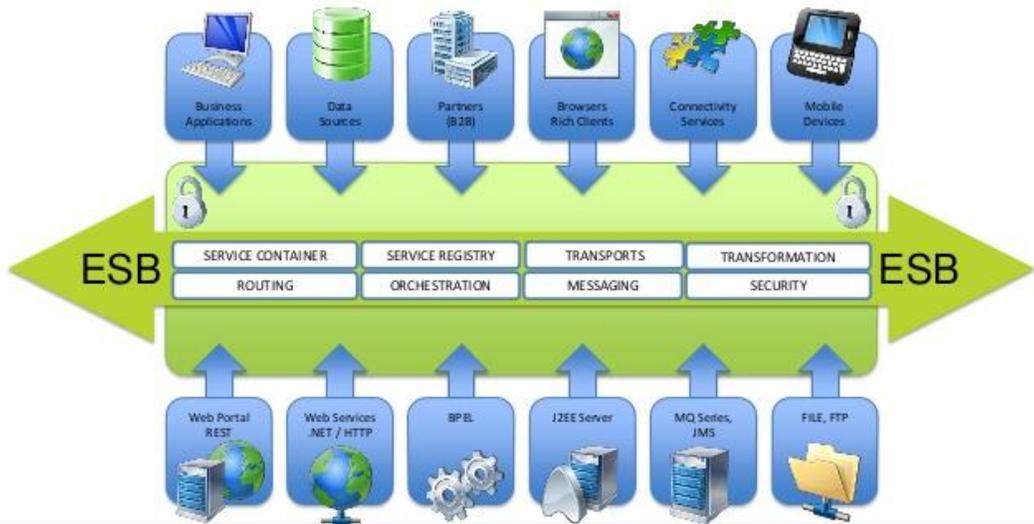
ESB adalah sebuah model arsitektur yang digunakan untuk mendesain dan mengimplementasikan komunikasi diantara aplikasi-aplikasi di dalam sebuah *service oriented architecture* (SOA). ESB digunakan pada lanskap aplikasi dan sistem yang kompleks, dalam sistem tersebar, atau biasanya pada ekosistem aplikasi *enterprise*. ESB memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menangani komunikasi antar aplikasi, memanfaatkan komponen aplikasi yang biasanya disebut *service*. Dengan adanya ESB, maka ketergantungan antar aplikasi dan sistem dalam sebuah organisasi dapat dikurangi dan komunikasi serta keterhubungan dapat ditingkatkan.

Fungsi utama ESB adalah

- Memonitor dan mengontrol lalu lintas pertukaran pesan antar *service*
- Menyelesaikan pertentangan atau masalah yang muncul antara *service-service* yang berkomunikasi/bertukar pesan
- Mengontrol *deployment* dan *versioning* dari *service*

- Mengelola *service-service* seperti *event handling*, *data transformation and mapping*, *message sequencing*, dan memastikan kualitas komunikasi antar *service* berjalan lancar.

ESB dapat membuat abstraksi yang memudahkan keterhubungan antar aplikasi, karena semua aplikasi dapat berkomunikasi melalui layanan yang terkoneksi dengan ESB, sehingga aplikasi-aplikasi dapat menjaga independensinya.



Gambar 29 Contoh ESB

### 6.1.8 External Services

Merupakan layanan eksternal sebagai bagian dari *government platform*, seperti: layanan pembayaran (e-payment), layanan pengecekan identitas tunggal (e-KTP), layanan pengecekan paspor (e-Imigrasi), layanan pengecekan nomor pajak (e-Pajak). Dengan adanya layanan ini, integrasi dengan sistem elektronik lainnya ditingkat nasional dan perbankan dapat diwujudkan.

### 6.1.9 Data/ Connectivity Services

Merupakan layanan basis data, seperti DBMS, atau layanan berbasis pesan, seperti: *email*, SMS, dan ke mediator berbasis pesan lainnya (*message broker*). Dengan adanya layanan ini memungkinkan setiap aplikasi dapat mengakses data atau pesan melalui ESB. Dampak lain adalah memungkinkan menyediakan layanan *broadcast* pesan sekaligus via SMS, *email*, media sosial (FB, Twitter, WhatsApp, dan sejenisnya), sehingga dapat mewujudkan *multi channel services* kepada seluruh warga.

### 6.1.10 Identity Management

Bagian ini menyediakan manajemen *user/ identity*, termasuk di dalamnya layanan *authentication* dan *authorization*. Komponen ini juga menyediakan layanan *single sign on* (SSO).

### 6.1.11 Governance Registry

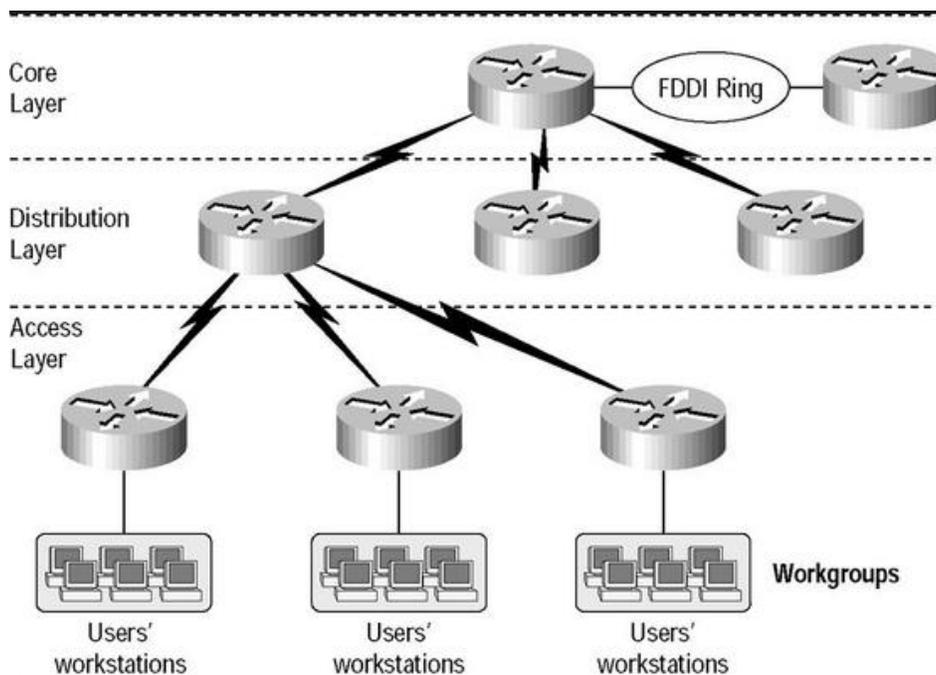
Merupakan komponen yang mencatat status dari setiap komponen aplikasi, khususnya yang diintegrasikan ataupun berjalan di atas platform ini serta memastikan bahwa seluruh komponen kompatibel dengan interkoneksi melalui ESB, serta memenuhi semua persyaratan integrasi pada *platform* ini.

### 6.1.12 Activity Monitor

Merupakan komponen yang bertugas untuk memonitor semua aktivitas yang berjalan di dalam *platform* ini. Komponen ini juga dapat berfungsi sebagai *dashboard* dan *resource monitor* atas semua proses yang sedang berjalan, sehingga jika ada aplikasi yang tidak berfungsi dapat memberikan *alert* kepada *administrator*.

### 6.1.13 Jaringan

#### 6.1.13.1 Three-Layered Hierarchical Model



Gambar 30 Three Layered Model Hierarchical via tech-faq.com

Dalam membangun jaringan IT, dikenal suatu model yang disebut model tiga layer. Model ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin suatu

jaringan handal, *scalable*, dan sederhana. Adapun tiga layer yang dimaksud antara lain:

1. Core Layer

Layer ini membahas tentang *backbone* dari suatu jaringan yang biasanya identik dengan perangkat berkecepatan tinggi seperti *high-end switch* dan *high-end cables* seperti serat fiber. Layer ini hanya berfokus pada kecepatan dan jaminan pengiriman paket yang ada tanpa melakukan manipulasi terhadap paket yang dikirimkan.

2. Distribution Layer

Distribution layer meliputi router dan switch pada layer 3 pada OSI layer yang bertanggung jawab untuk me-routing paket yang ada ke suatu subnet atau yang biasa dikenal dengan *workgroup*.

3. Access Layer

Layer ini adalah layer terakhir dan paling dekat dengan pengguna. Layer ini bertanggung jawab untuk menghubungkan perangkat dari client ke sebuah jaringan dan memastikan paket sampai ke perangkat pengguna.

#### **6.1.14 Subnetting**

Semakin banyak perangkat yang terhubung ke dalam jaringan berarti semakin besar dan kompleks jaringan tersebut. *Trouble* adalah hal yang tidak dapat dihindari walaupun dapat diminimalkan. *Troubleshooting* pada jaringan yang besar akan menjadi masalah baru karena banyaknya perangkat yang terhubung dan kompleksnya jaringan yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan pembuatan sub jaringan yang sering disebut subnetting.

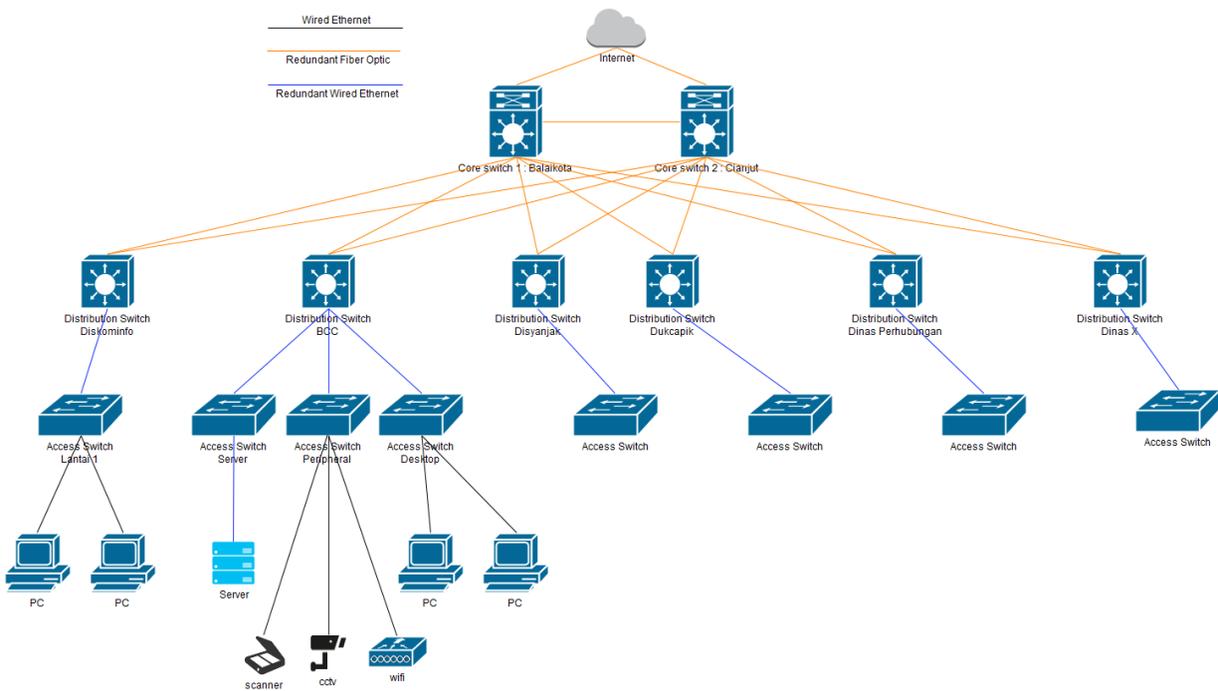
Subnetting adalah aksi membuat jaringan dalam sebuah jaringan dengan membuat batasan logical melalui manipulasi netmask. Suatu jaringan besar dapat terdiri dari berbagai jaringan kecil. Adapun keuntungan subnetting antara lain:

1. Subnetting membuat jaringan lebih mudah dikelola
2. Subnetting mengurangi traffic dengan mengurangi tumbukan dan broadcast traffic
3. Subnetting memungkinkan penerapan kebijakan keamanan yang berbeda
4. Subnetting menghemat biaya karena dapat mengoptimalkan rentang IP

### 6.1.15 Wide Area Network – GovNet

Melihat kondisi Kota Bandung dengan banyak SKPD yang membutuhkan interkoneksi ke SKPD lain maupun ke internet maka diajukan beberapa rancangan jaringan sesuai kebutuhan dan kondisi SKPD. Berikut adalah rancangan jaringan Kota Bandung menerapkan subnetting dan Three Layered Hierarchical Model pada berbagai skenario.

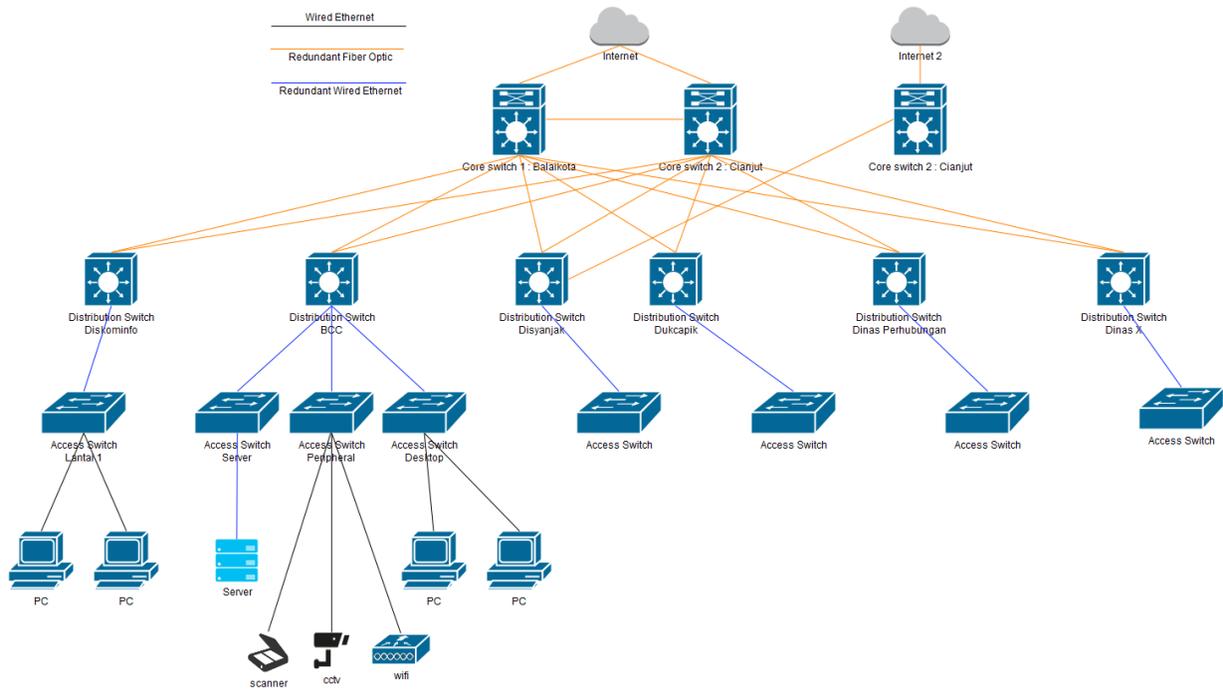
1. SKPD membutuhkan koneksi ke SKPD lain dan hanya memiliki satu koneksi internet.



Gambar 31 Skenario 1

Skenario pertama menjelaskan bagaimana SKPD dapat saling terhubung satu sama lain dalam satu jaringan internal (WAN – GovNet) untuk berbagai kebutuhan dengan tetap dapat terhubung ke internet melalui satu pintu. Dalam hal ini, paket yang ada akan dirouting oleh distribution swith dan core switch ke manakah paket tersebut harus diteruskan. Bila paket dari SKPD ditujukan ke SKPD lain maka paket tidak akan dilewatkan internet melainkan core switch dan distribution switch SKPD lain.

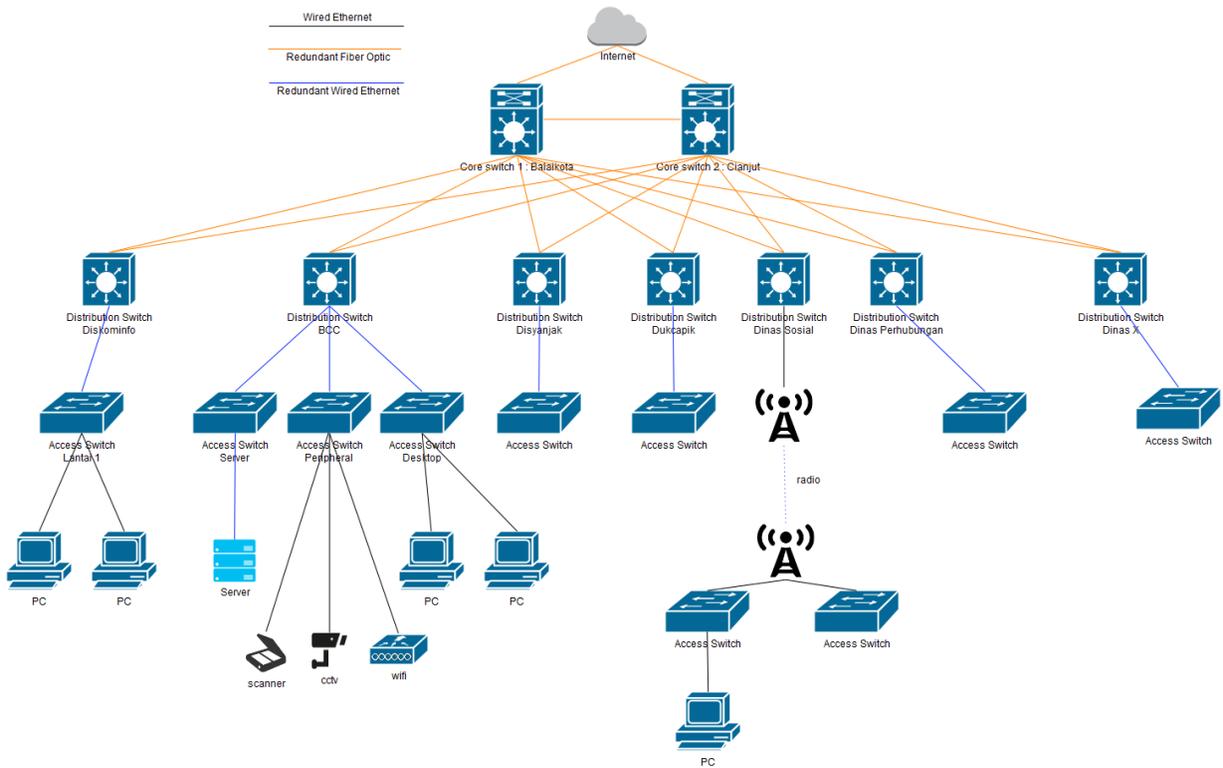
2. SKPD membutuhkan koneksi ke SKPD lain dan memiliki lebih dari satu koneksi internet.



Gambar 32 Skenario 2

Skenario kedua menggambarkan kemungkinan kepemilikan beberapa konektivitas oleh suatu SKPD. Sebagai contoh, pada Dukcapil terdapat koneksi khusus untuk mengakses SIAK maka dengan demikian distribution switch pada dukcapil akan memegang peranan melakukan forwarding paket siak hanya melalui siak dan paket non siak melalui distribution switch dan core switch lain untuk diteruskan ke SKPD lain atau internet.

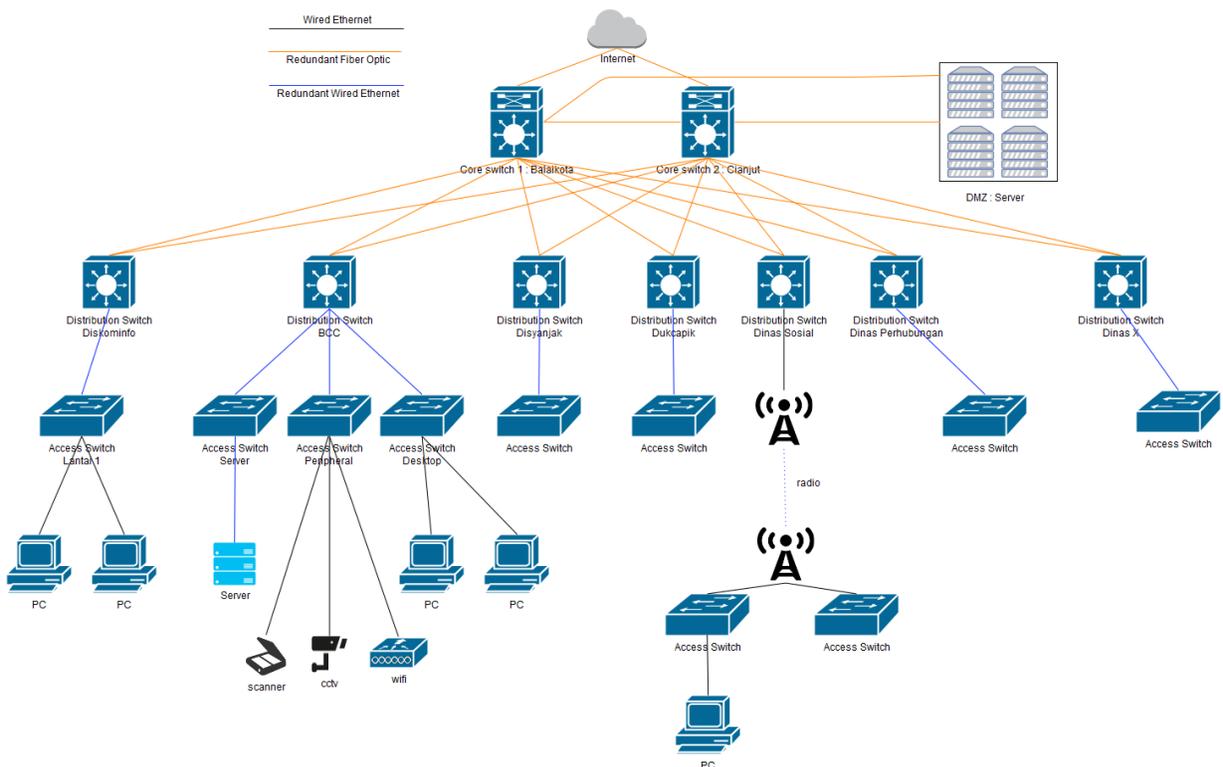
3. SKPD membutuhkan koneksi ke SKPD lain, memiliki satu koneksi internet, dan terdapat koneksi menggunakan radio link.



Gambar 33 Skenario 3

Ada kasus ketika konektivitas SKPD tidak dapat melalui media kabel karena satu dan lain hal. Pada skenario ini digambarkan bahwa SKPD masih dapat saling terhubung menggunakan radio link untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan kabel yang masih terbatas.

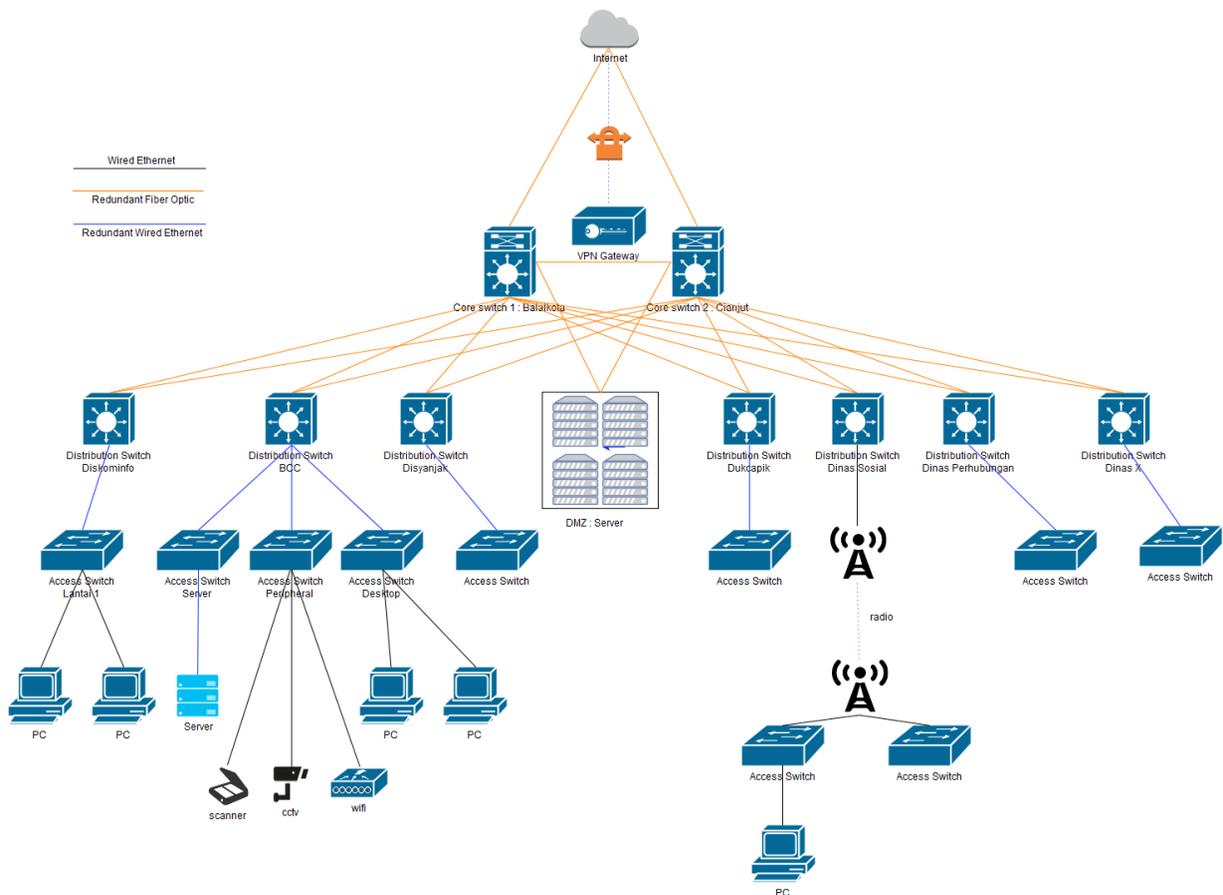
4. Terdapat server yang dapat diakses oleh semua SKPD dan pengguna di internet



Gambar 34 Skenario 4

Pada skenario 4 digambarkan adanya server terpusat yang dapat diakses oleh semua SKPD sehingga akses tidak lagi dari ujung SKPD ke ujung SKPD lain melainkan dari SKPD ke kompleks server yang ada untuk menghemat waktu tempot paket dan kemudahan dalam laintenance.

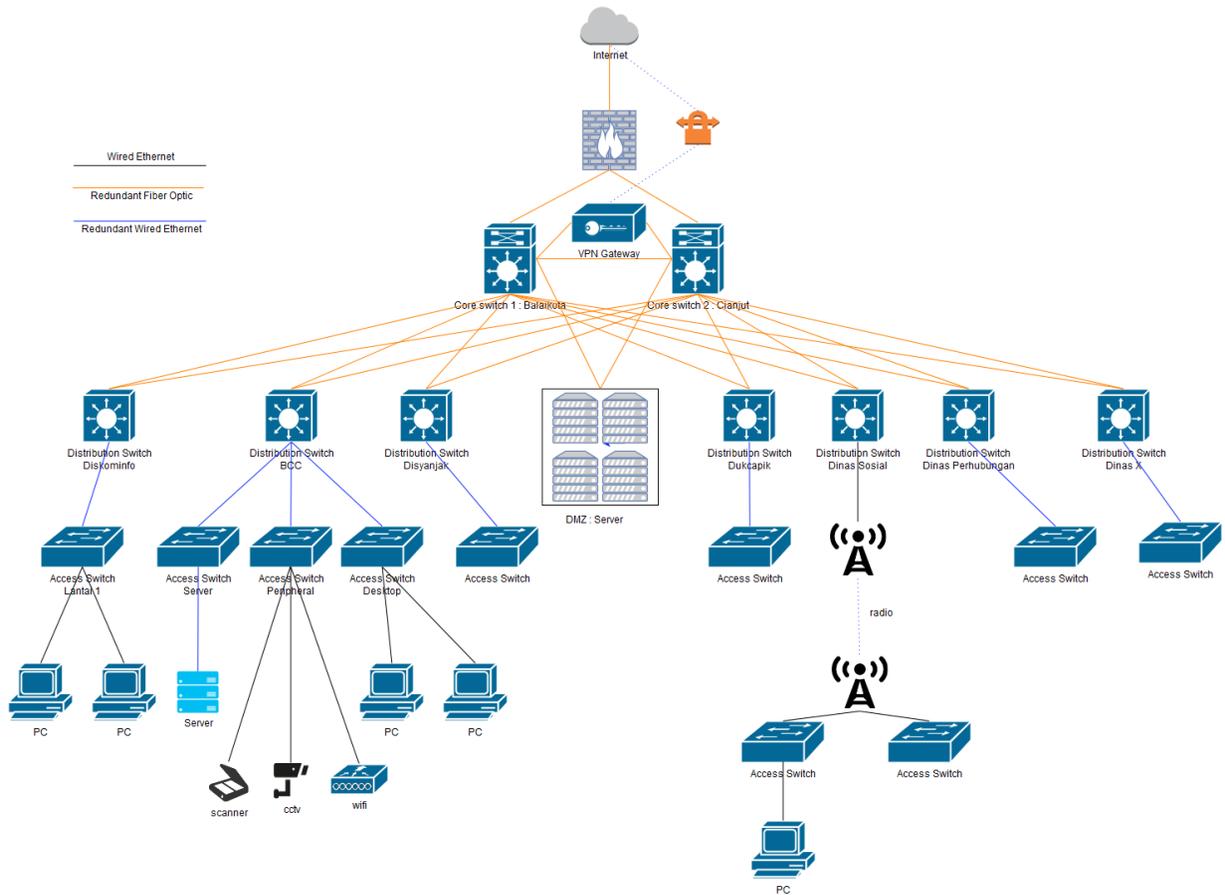
5. Terdapat VPN yang dapat mengakses resources dalam GovNet



Gambar 35 Skenario 5

Pada dasarnya, tidak ada pengguna internet yang boleh mengakses resource dalam SKPD. Namun, akan ada pengecualian yakni dengan membuat virtual private server sehingga orang-orang di internet seolah-olah dalam jaringan sehingga diperbolehkan untuk mengakses resource yang ada.

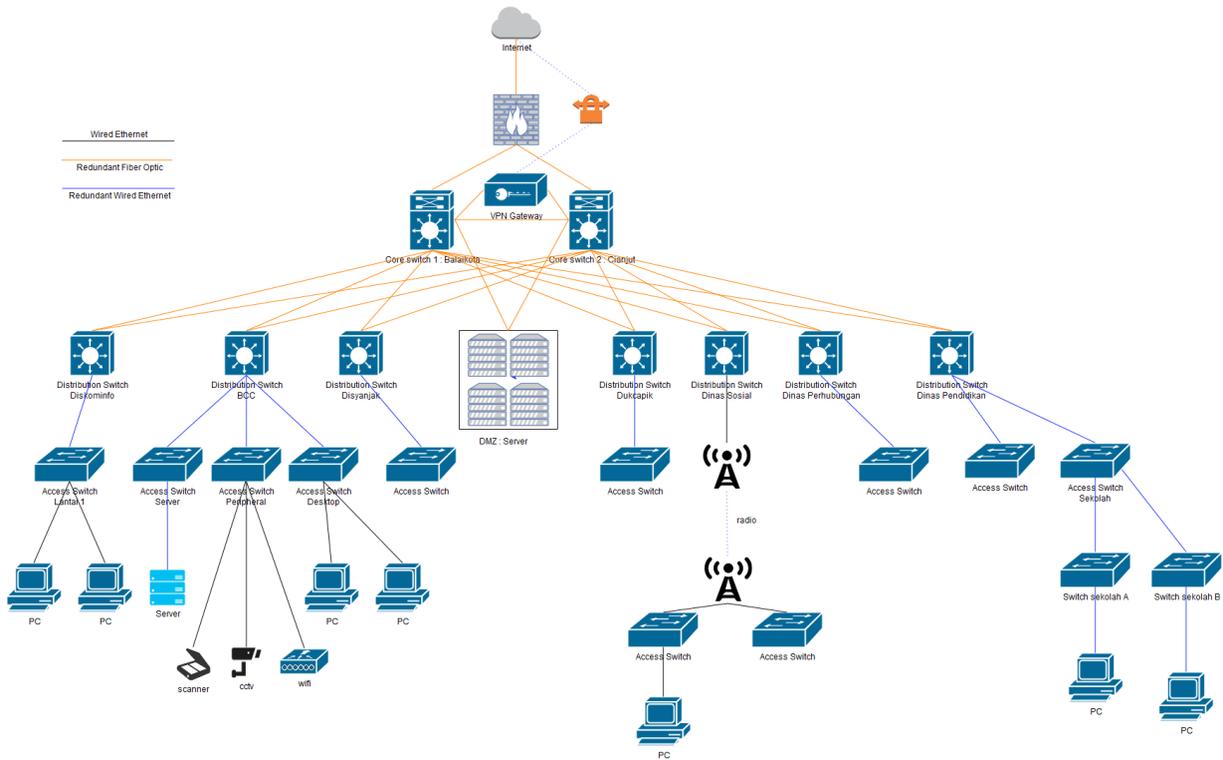
6. Terdapat DMZ untuk pengamanan dalam GovNet



Gambar 36 Skenario 6 – DMZ

Setiap request yang masuk ke jaringan GovNet akan difilter oleh firewall sebagai bentuk pengamanan. Hanya request ke kompleks server dari internet yang diteruskan. Selain itu request akan ditolak. Hal ini dilakukan guna menjaga keamanan resource yang ada di dalam jaringan internal dan membatasi akses pengguna.

7. Terdapat jaringan internal luar pemerintahan



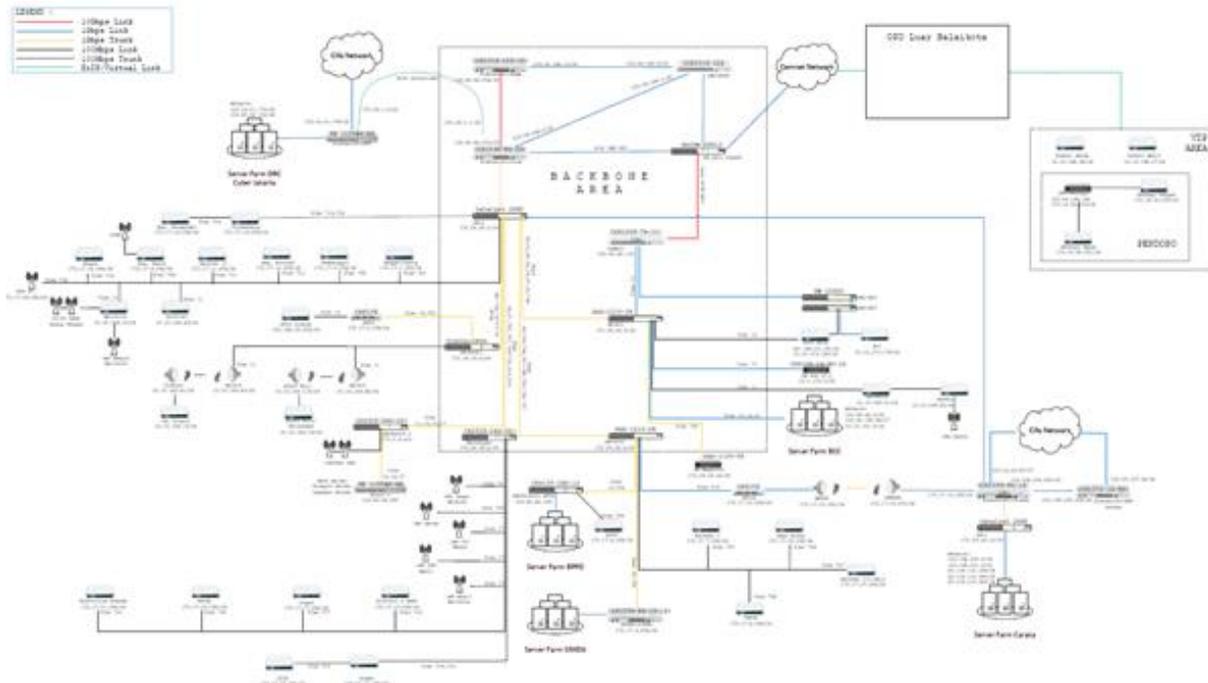
Gambar 37 Skenario 7

Pada praktiknya, dimungkinkan suatu SKPD memiliki jaringan dengan pihak-pihak lain seperti rumah sakit dan sekolah. Pada skenario 7 digambarkan bagaimana suatu SKPD mendistribusikan link yang dimilikinya ke pihak lain. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah satu layer lagi yakni setelah access switch.

## 6.2 Kondisi Saat Ini

Di Pemerintah Kota Bandung pada saat ini sudah terhubung dengan jaringan internal secara keseluruhan, sehingga seluruh SKPD sudah terkoneksi satu sama lain. Skema topologi jaringan internal Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 38.

Dari skema tersebut dapat dilihat juga bahwa infrastruktur pengolahan data seperti server, masih tersebar pada beberapa lokasi, karena kondisi sebelumnya dimana pengadaan TIK belum dilakukan secara terpusat, sehingga masih terdapat SKPD yang memiliki infrastruktur pengolahan data yang mandiri.



Gambar 38 Skema topologi network eksisting

Pengelolaan server tidak seluruhnya dilakukan oleh Diskominfo, adapun status pengelolaannya antara lain:

- 1) Server dikelola Diskominfo
- 2) Server dikelola masing-masing SKPD yang memilikinya
- 3) Server yang dikelola secara cloud maupun hosting dengan skema sewa
- 4) Server yang dimiliki pihak ketiga tetapi disimpan di SKPD
- 5) Server yang dikelola oleh instansi pusat

Jumlah perangkat keras/*hardware* yang terdapat pada unit-unit kerja pada umumnya telah mencukupi. Tetapi diperlukan adanya standardisasi atas spesifikasi *hardware* sehingga memudahkan dalam *maintenance* alat.

### 6.3 Analisis Gap

Berdasarkan hasil perbandingan kondisi saat ini dengan arsitektur kedepan, terdapat beberapa kesimpulan mengenai analisis gap yang dapat diidentifikasi. Untuk jumlah dan kapasitas, baik komputasi maupun jaringan, saat ini sudah cukup memadai, tetapi untuk kedepannya perlu untuk dilakukan analisis kapasitas lebih lanjut untuk mendetilkkan kebutuhan masa depan. Yang dapat dikembangkan lebih lanjut adalah mengenai penerapan teknologi terkini, seperti mobile dan IoT supaya dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional. Selain itu, teknologi infrastruktur yang perlu dikembangkan

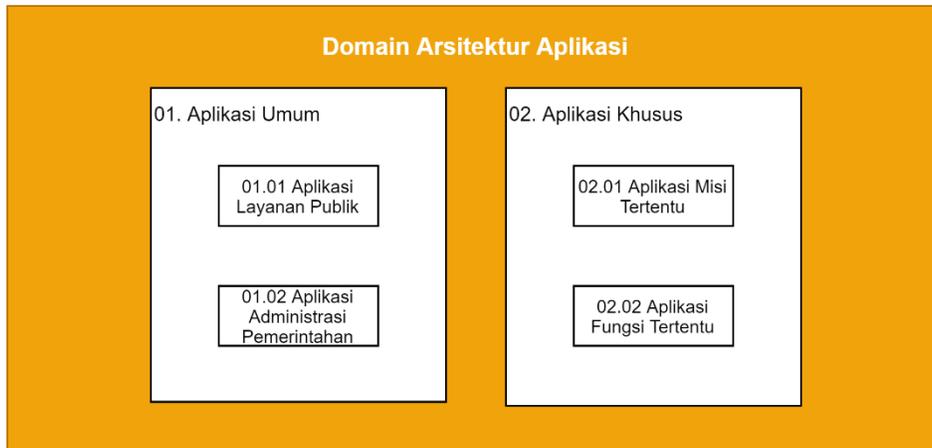
adalah yang terkait dengan dukungan untuk integrasi aplikasi maupun layanan. Mengembangkan sistem penghubung layanan untuk integrasi dengan instansi pusat dan daerah.

Untuk pengelolaan infrastruktur dapat disesuaikan dengan kebijakan pengelolaan, tetapi untuk jenis dan spesifikasi infrastruktur maupun hardware yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung, sebaiknya distandarkan untuk memudahkan dalam pengelolaan dan perawatan.

## BAB 7 Domain Arsitektur Aplikasi

### 7.1 Domain Arsitektur Aplikasi Pemerintah Kota Bandung

Penggambaran domain arsitektur aplikasi Pemerintah Kota Bandung berdasarkan pemetaan arsitektur adalah sebagai berikut.



Gambar 39 Domain arsitektur aplikasi

Menurut arahan dari kebijakan pemerintah, sebaiknya aplikasi yang digunakan dalam proses layanan publik dan administrasi pemerintahan menggunakan aplikasi umum, sehingga memudahkan dalam proses integrasi. Sedangkan untuk aplikasi yang saat ini digunakan, tetapi bukan merupakan aplikasi umum, maka dapat digunakan dengan kondisi:

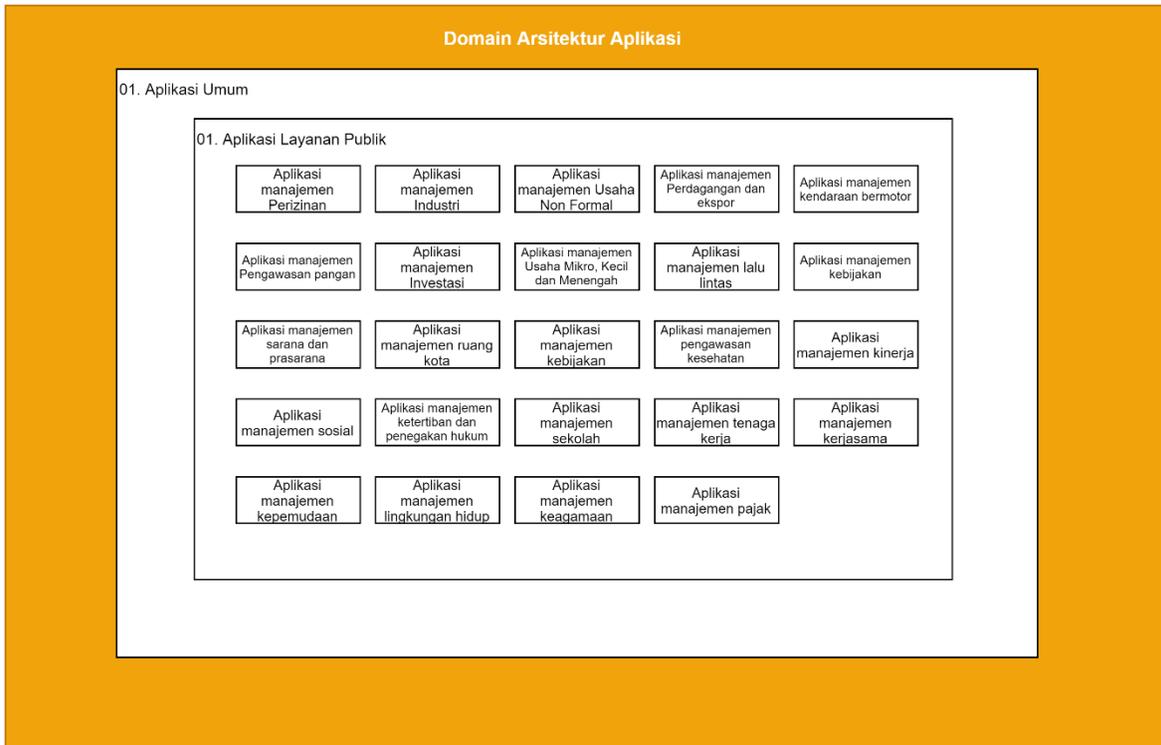
- Telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan
- Melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis
- Melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum

Untuk aplikasi khusus, pembangunan masih diperbolehkan dengan beberapa kondisi:

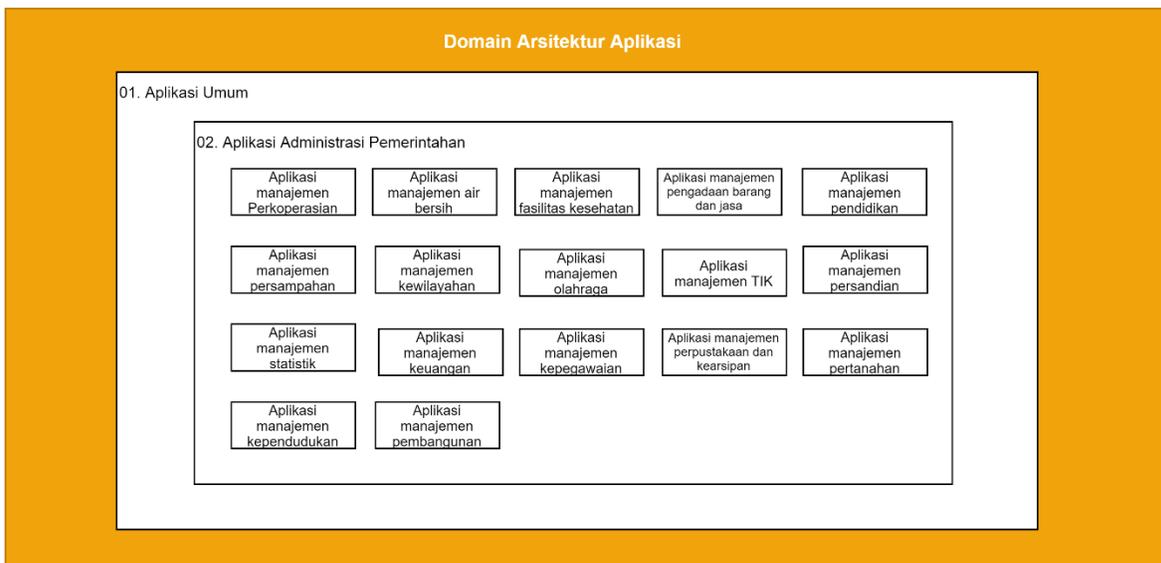
- Pembangunan dan Pengembangan berdasarkan Arsitektur SPBE masing-masing instansi

- Mendapatkan pertimbangan dari Menteri PANRB
- Pembangunan dan pengembangan harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus

Adapun komponen-komponen domain arsitektur secara lebih detail dapat dilihat pada Gambar 40 dan Gambar 41.

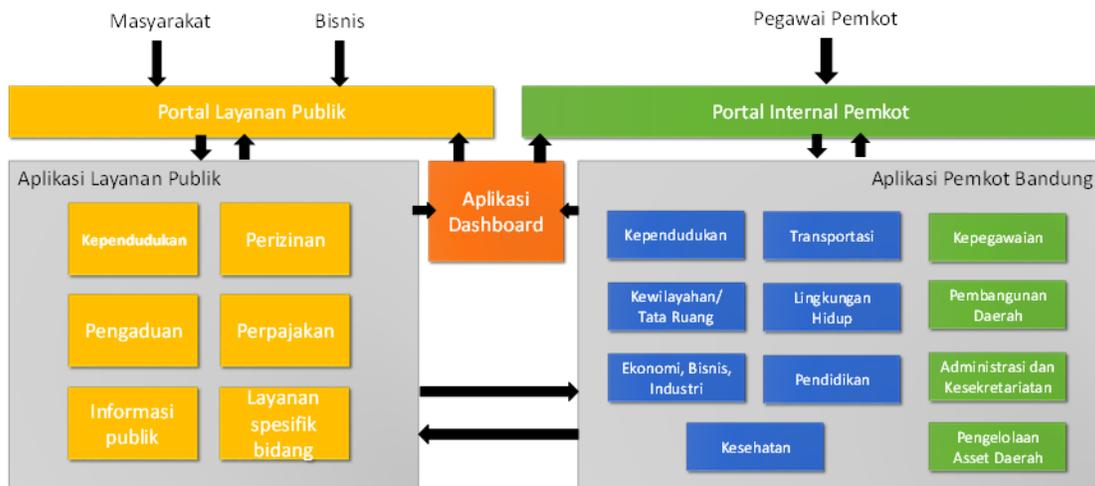


Gambar 40 Domain arsitektur aplikasi untuk layanan publik



Gambar 41 Domain arsitektur aplikasi untuk administrasi pemerintahan

Bila digambarkan berdasarkan hubungan aplikasi, layanan dan pengguna, maka arsitektur Aplikasi Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 42 Arsitektur Aplikasi Pemerintah Kota Bandung

Pada arsitektur aplikasi tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat 3 jenis pengguna, yaitu:

- Masyarakat sebagai personal
- Bisnis atau masyarakat sebagai entitas bisnis, dan
- Pegawai Pemerintah Kota Bandung

Dalam mengakses berbagai layanan sistem Pemerintah Kota Bandung, ketiga pengguna tersebut hanya perlu mengakses sebuah portal aplikasi yang menjembatani dan mengelola akses pengguna menuju layanan yang dituju. Pengguna hanya dapat mengakses sistem sesuai dengan hak akses nya, yaitu layanan publik atau internal Pemerintah Kota.

Portal layanan publik diakses oleh pengguna masyarakat dan bisnis untuk mengakses layanan publik. Sedangkan portal internal Pemerintah Kota dapat diakses hanya oleh pegawai Pemerintah Kota, dan mengatur akses baik aplikasi layanan publik maupun aplikasi administrasi pemerintahan Pemerintah Kota Bandung.

Untuk mendukung pengaksesan sistem Pemerintah Kota Bandung oleh pengguna melalui portal, diperlukan mekanisme

- Citizen Single Sign On
- Business Single Sign On
- Officer Single Sign On

Untuk dapat mengetahui kondisi kota Bandung secara umum, dihadirkan fitur Dashboard. Dengan fitur Dashboard, pengguna dapat mengetahui kondisi

secara cepat untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat. Untuk Dashboard, perlu dilakukan analisis dan perancangan yang lebih mendalam, untuk mengetahui informasi apa saja yang perlu untuk ditampilkan, sumber data, dan mekanisme pengolahan datanya.

Aplikasi/SI yang dibangun akan membutuhkan dan mengakses data dari database yang tersedia. Perlu diperhatikan bahwa beberapa database akan bersifat sebagai 'database utama'. Artinya, data yang dikelola di dalam database ini akan banyak berfungsi sebagai data master dan menjadi referensi bagi database lainnya. Beberapa contoh untuk database utama ini seperti database kependudukan, kepegawaian, dan kewilayahan. Misalnya database sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial dapat mengacu kepada data penduduk yang dikelola di dalam database kependudukan. Di dalam pengelolaan data ini, penting sekali memiliki mindset 'Satu Data' yang berarti memastikan bahwa hanya terdapat single entry data dan selalu memastikan integritas data serta tidak melakukan duplikasi yang tidak diperlukan.

## **7.2 Kondisi Saat Ini**

Saat ini Pemerintah Kota Bandung sudah memiliki berbagai aplikasi yang digunakan untuk mendukung operasional layanan dan pekerjaan administratif. Sebagian aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung sudah didaftarkan ke Kementerian Kominfo di PSE.

Sebagian besar aplikasi tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan untuk mendukung pekerjaan. Hanya saja terdapat beberapa permasalahan, seperti:

- Meskipun sebagian besar SKPD sudah melakukan implementasi IT, namun pertukaran data antar SKPD atau antar bagian di SKPD masih belum terintegrasi. Mayoritas masalah adalah perbedaan antar format laporan dan input data yang berulang mengurangi efektifitas dan efisiensi pekerjaan yang saling berkaitan.
- Terdapat beberapa aplikasi dengan fungsionalitas yang sama seperti aplikasi kepegawaian, aplikasi disposisi surat dan aplikasi SIMPUS dikembangkan sendiri oleh masing-masing internal SKPD sehingga terjadi perbedaan format dan tidak terjadi integrasi data.

Adapun daftar aplikasi yang saat ini sudah dioperasikan adalah sebagai berikut:

- Aplikasi umum layanan publik

Nama Aplikasi	Taksonomi Arsitektur Aplikasi SPBE	
	Level 1	Level 2
SIAK	Aplikasi Umum	Layanan Publik
e-SKA	Aplikasi Umum	Layanan Publik
BLU-e	Aplikasi Umum	Layanan Publik
Warung UP2K	Aplikasi Umum	Layanan Publik
INACBG	Aplikasi Umum	Layanan Publik
Layanan Pengadaan secara Elektronik (SPSE)	Aplikasi Umum	Layanan Publik
Katalog Nasional	Aplikasi Umum	Layanan Publik
Katalog Daerah	Aplikasi Umum	Layanan Publik

- Aplikasi umum administrasi pemerintahan

Nama Aplikasi	Taksonomi Arsitektur Aplikasi SPBE	
	Level 1	Level 2
SAPK	Aplikasi Umum	Administrasi Pemerintahan
e-Prescription	Aplikasi Umum	Administrasi Pemerintahan
Aplikasi DAPODIK	Aplikasi Umum	Administrasi Pemerintahan
SIRUP	Aplikasi Umum	Administrasi Pemerintahan

- Aplikasi khusus

Nama Aplikasi	Taksonomi Arsitektur Aplikasi SPBE
SIMDEK	Aplikasi Khusus
Semut	Aplikasi Khusus
Indo Hub	Aplikasi Khusus
Moovit	Aplikasi Khusus
Simadun	Aplikasi Khusus
Portal Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Aplikasi Khusus
Integrated Library System (INLIS Lite)	Aplikasi Khusus
SI INTAN	Aplikasi Khusus
e-Pustaka	Aplikasi Khusus
Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS)	Aplikasi Khusus
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	Aplikasi Khusus
Master Data	Aplikasi Khusus
E-Arjuna Bagian dari SIKS	Aplikasi Khusus
website	Aplikasi Khusus
Website Dinas Sosial Pemkot Bandung	Aplikasi Khusus
Aplikasi Kesejahteraan Sosial Excellent (Aksen)	Aplikasi Khusus
JPS Online	Aplikasi Khusus
Website & Aplikasi BIMMA	Aplikasi Khusus
BIMMA Bursa Kerja	Aplikasi Khusus
e-Audit	Aplikasi Khusus
saber pungli	Aplikasi Khusus
Website Antapani	Aplikasi Khusus
Website Arcamanik	Aplikasi Khusus
Mobile disposisi	Aplikasi Khusus
Website Kecamatan Astana Anyar	Aplikasi Khusus
Sistem Registrasi Pelayanan (SIRAPEL)	Aplikasi Khusus
Website Kecamatan Bandung Kulon	Aplikasi Khusus
Profil Kecamatan Bandung Wetan	Aplikasi Khusus
Papperless Bandung Wetan	Aplikasi Khusus
Website Kecamatan Batu Nunggal	Aplikasi Khusus
Web Kecamatan Buah Batu	Aplikasi Khusus
Web Kecamatan Cibeunying Kaler	Aplikasi Khusus
Aplikasi Manajemen Surat	Aplikasi Khusus
Aplikasi No Antrian Layanan	Aplikasi Khusus
SIPADU	Aplikasi Khusus
Web Kecamatan Cibeunying Kidul	Aplikasi Khusus
Web Kecamatan Cibiru	Aplikasi Khusus
Website kecamatan cicendo	Aplikasi Khusus
SAMPURASUN	Aplikasi Khusus
Website Kecamtan Cinambo	Aplikasi Khusus

Nama Aplikasi	Taksonomi Arsitektur Aplikasi SPBE
Website BKPP	Aplikasi Khusus
SIMPEG	Aplikasi Khusus
ERK	Aplikasi Khusus
SIAP	Aplikasi Khusus
SIFOR	Aplikasi Khusus
SIM Arsip	Aplikasi Khusus
SIMEKAR	Aplikasi Khusus
Idol(SIKOM)	Aplikasi Khusus
SIMPEG ADM	Aplikasi Khusus
Portal Integrasi	Aplikasi Khusus
Mang Asep	Aplikasi Khusus
SIMPEG MOBILE	Aplikasi Khusus
Website BPKA	Aplikasi Khusus
Website Sabilulungan	Aplikasi Khusus
SIMANTAP	Aplikasi Khusus
E-SIP	Aplikasi Khusus
Sistem Elektronik Manajemen Aset Kendaraan	Aplikasi Khusus
Website BPPD	Aplikasi Khusus
MPD (Modul Pajak Daerah)	Aplikasi Khusus
SIPP	Aplikasi Khusus
e-Satria	Aplikasi Khusus
Payment Gateway Pembayaran Pajak	Aplikasi Khusus
Sistem Informasi Retribusi Daerah (SiPanda)	Aplikasi Khusus
Tapping Online	Aplikasi Khusus
Website Bappelitbang	Aplikasi Khusus
E-Reses	Aplikasi Khusus
SIRA	Aplikasi Khusus
E-Musrenbang	Aplikasi Khusus
E-LKPJ	Aplikasi Khusus
E-Office	Aplikasi Khusus
E-Monev	Aplikasi Khusus
E-RPJMD	Aplikasi Khusus
SiTaruna	Aplikasi Khusus
SiKaku	Aplikasi Khusus
Paduserasi	Aplikasi Khusus
E-litbang	Aplikasi Khusus
Website Dinas	Aplikasi Khusus
SIJABUNG	Aplikasi Khusus
SIGAP (Sistem Informasi Gabungan Pelaporan)	Aplikasi Khusus
Website Disbudpar	Aplikasi Khusus

Nama Aplikasi	Taksonomi Arsitektur Aplikasi SPBE
Cinambo Smart	Aplikasi Khusus
Website Kecamatan Coblong	Aplikasi Khusus
Website Kecamatan Gedebage	Aplikasi Khusus
Bandung e-District	Aplikasi Khusus
SILOKA	Aplikasi Khusus
SIPENJOL	Aplikasi Khusus
SIPEDIT	Aplikasi Khusus
Web Kecamatan Mandalajati	Aplikasi Khusus
IBS Mobile	Aplikasi Khusus
Wargapedia	Aplikasi Khusus
panyileukan online	Aplikasi Khusus
Website Kecamatan Rancasari	Aplikasi Khusus
Web Kecamatan Regol	Aplikasi Khusus
Web Kecamatan Sukasari	Aplikasi Khusus
SIPAKU	Aplikasi Khusus
Kecamatan Sumur Bandung	Aplikasi Khusus
Web Kecamatan Ujung Berung	Aplikasi Khusus
Integrated Banking System (IBS) Version 05.08.001 Realese 16/12/2014 1 (PT.USSI)	Aplikasi Khusus
Sistem Informasi Debitur (BI Checking)	Aplikasi Khusus
LB-BPR (Laporan Berkala Bank Perkreditan Rakyat)	Aplikasi Khusus
SLIK-Client (Sistem Layanan Informasi Keuangan)	Aplikasi Khusus
SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	Aplikasi Khusus
E-Channel	Aplikasi Khusus
Website BPR Kota Bandung	Aplikasi Khusus
Folder Public	Aplikasi Khusus
Antrian Nasabah	Aplikasi Khusus
HRIS (Human Resource Information System)	Aplikasi Khusus
Sahabat Pasar	Aplikasi Khusus
Website PD Kebersihan	Aplikasi Khusus
Equal	Aplikasi Khusus
PDK Billing System	Aplikasi Khusus
Sistem Informasi Pengawasan Pengangkutan Terinterasi	Aplikasi Khusus
Sistem Informasi Pengangkutan Sampah	Aplikasi Khusus
Sistem Informasi Manajemen Keuangan	Aplikasi Khusus
SPSE	Aplikasi Khusus
Website	Aplikasi Khusus
Sistem Online Payment Point (SOPP)	Aplikasi Khusus
Sistem Informasi Tagihan dan Rekening (Sinagrek)	Aplikasi Khusus
Sistem Informasi Mutasi Pelanggan (Mutasi)	Aplikasi Khusus
Sistem Informasi Laporan Pencatatan Meter (Sicamer-web)	Aplikasi Khusus
Sistem Informasi Reduksi (ATI)	Aplikasi Khusus
Overbooking Information System (OVb, Obis)	Aplikasi Khusus
Sistem Informasi Pelanggan (Infolang)	Aplikasi Khusus
FTP dengan Mitracomm	Aplikasi Khusus
Pembatalan Transaksi Pembayaran Rekening Via PT Pos (Delpos)	Aplikasi Khusus
Sistem Informasi Pencatatan Meter Update (Sicamer update)	Aplikasi Khusus
FTP dengan Pos	Aplikasi Khusus
Billing Info System Web (BISW)	Aplikasi Khusus
Network Monitoring I (admintirtawening)	Aplikasi Khusus
Network Monitoring II	Aplikasi Khusus
Sistem Informasi Monitoring Penerimaan KAS (Sipana)	Aplikasi Khusus
Sistem Informasi Realisasi Penerimaan Berdasarkan SPT (Sirama)	Aplikasi Khusus

Nama Aplikasi	Taksonomi Arsitektur Aplikasi SPBE
Ekonomi Kreatif/BCH	Aplikasi Khusus
Portal Patrakomala	Aplikasi Khusus
Talent Digital	Aplikasi Khusus
Website Disdukcapil	Aplikasi Khusus
e-SPasi	Aplikasi Khusus
e-Punten Web	Aplikasi Khusus
e-Punten Mobile	Aplikasi Khusus
Salaman Web	Aplikasi Khusus
Salaman Mobile	Aplikasi Khusus
Pemuda Web	Aplikasi Khusus
Pemuda Mobile	Aplikasi Khusus
Adu Cepat	Aplikasi Khusus
Web Dinas Kesehatan	Aplikasi Khusus
SIKDA Kota Bandung	Aplikasi Khusus
DSS Kesehatan	Aplikasi Khusus
DW Kesehatan	Aplikasi Khusus
e-Promotion	Aplikasi Khusus
e-Licensing	Aplikasi Khusus
Clouddinkes	Aplikasi Khusus
Jarkom Rumah Sakit	Aplikasi Khusus
Pelaporan Kesehatan Rutin Bersumber Puskesmas berbasis Web	Aplikasi Khusus
Sistem Informasi Surveilans Kota Bandung	Aplikasi Khusus
Simkes Kota Bandung	Aplikasi Khusus
Simpus Tomi / Puskesmas Online	Aplikasi Khusus
SPGDT Kota Bandung	Aplikasi Khusus
Pendaftaran Pasien online / SMS	Aplikasi Khusus
Sicalakan (Sistem Informasi Pencatatan Kecelakaan)	Aplikasi Khusus
Simanis (Sistem pencatatan dan pelaporan imunisasi)	Aplikasi Khusus
Sijuara	Aplikasi Khusus
Monitoring Pelaporan Elektronik Kesling ( Mepeling )	Aplikasi Khusus
Open Data	Aplikasi Khusus
Website Portal Bandung	Aplikasi Khusus
Website PPID	Aplikasi Khusus
Website Ekonomi Kreatif	Aplikasi Khusus
PMO (Project Management Office)	Aplikasi Khusus
Monitoring CCTV	Aplikasi Khusus
Bandung Smartcity	Aplikasi Khusus
Bandung Command Center	Aplikasi Khusus
Repository	Aplikasi Khusus
Aplikasi LAPOR!	Aplikasi Khusus
Infografis Media Sosial	Aplikasi Khusus
Aplikasi Manajemen Integrasi dan Pertukaran Data (MANTRA)	Aplikasi Khusus
Surat Online	Aplikasi Khusus
Surat KPP	Aplikasi Khusus
Whitsel Blower System (WBS)	Aplikasi Khusus
Jadwal KPP	Aplikasi Khusus
Tata Naskah	Aplikasi Khusus
Arsip	Aplikasi Khusus
Inventori Aplikasi	Aplikasi Khusus
Mobile android disposisi	Aplikasi Khusus
ASB (Analisis Standar Belanja)	Aplikasi Khusus
Aplikasi POROS (Performance Recognition System)	Aplikasi Khusus

Nama Aplikasi	Taksonomi Arsitektur Aplikasi SPBE
Sistem Informasi Cicilan (ICS)	Aplikasi Khusus
Sistem Informasi Pelanggan Potensial	Aplikasi Khusus
Winbox	Aplikasi Khusus
Management Komputer	Aplikasi Khusus
Aplikasi Monitoring Rwnet Bukopin	Aplikasi Khusus
Aplikasi Transaksi Rwnet Bukopin	Aplikasi Khusus
Simulasi target bulan berjalan	Aplikasi Khusus
Aplikasi Cicilan PB	Aplikasi Khusus
Aplikasi Sistem Akuntansi Terintegrasi (Simaster)	Aplikasi Khusus
Aplikasi Pengaduan via Twitter (Webmaster)	Aplikasi Khusus
Aplikasi Monitoring Anggaran	Aplikasi Khusus
Aplikasi Yantap	Aplikasi Khusus
Aplikasi monitoring AMR Kenda	Aplikasi Khusus
Aplikasi monitoring Data Logger	Aplikasi Khusus
QuantumGIS	Aplikasi Khusus
Aplikasi Non Rekening	Aplikasi Khusus
Aplikasi monitoring meter induk Kenda	Aplikasi Khusus
Aplikasi Siaskes	Aplikasi Khusus
Aurora Cater Android	Aplikasi Khusus
Aplikasi penomoran pb otomatis	Aplikasi Khusus
Aplikasi Non rekening	Aplikasi Khusus
Aplikasi Closing	Aplikasi Khusus
Penggajian	Aplikasi Khusus
Aplikasi Tata Naskah	Aplikasi Khusus
Aplikasi Cek Pencatatan	Aplikasi Khusus
Aplikasi Sistem perhitungan Rekening	Aplikasi Khusus
PDPAL	Aplikasi Khusus
Aplikasi Sipegasus PDAM, Langganan Aktif	Aplikasi Khusus
Online Sambungan Baru	Aplikasi Khusus
Aplikasi Order Pencabutan Sambungan	Aplikasi Khusus
Aplikasi GoMBR Web	Aplikasi Khusus
Aplikasi GoMBR Mobile	Aplikasi Khusus
Aplikasi Mutasi MBR	Aplikasi Khusus
GIS Aset	Aplikasi Khusus
Aurora Dashboard	Aplikasi Khusus
PBJ PDAM Web	Aplikasi Khusus
GIS Infrastruktur Air Limbah	Aplikasi Khusus
e-Budgeting	Aplikasi Khusus
Sistem informasi pengelolaan aset sistem penyediaan air minum	Aplikasi Khusus
Website RSKGM	Aplikasi Khusus
SIMRS	Aplikasi Khusus
RSKGM Online	Aplikasi Khusus
RSKGM Online Mobile	Aplikasi Khusus
SISMADAK	Aplikasi Khusus

Nama Aplikasi	Taksonomi Arsitektur Aplikasi SPBE
Aplikasi Survey Kepuasan Penggunaan Aplikasi Online (SKPA)	Aplikasi Khusus
Retribusi Kebersihan	Aplikasi Khusus
e-Gratifikasi	Aplikasi Khusus
Simonalisa	Aplikasi Khusus
Modul Migrasi	Aplikasi Khusus
WEB Dinas Koperasi UMKM	Aplikasi Khusus
SI UMKM	Aplikasi Khusus
SiPKL	Aplikasi Khusus
Website Data Koperasi - Connecting Cooperation	Aplikasi Khusus
Website DLHK	Aplikasi Khusus
SIMDOKLING (dokumen lingkungan)	Aplikasi Khusus
Dashboard Kualitas Udara	Aplikasi Khusus
Database Dokumen Lingkungan	Aplikasi Khusus
SI ABAH (Sistem Aplikasi Berkah Peduli Sampah)	Aplikasi Khusus
Kang Pisman	Aplikasi Khusus
Simas Pepeling	Aplikasi Khusus
esdash	Aplikasi Khusus
Web dinas pangan dan pertanian	Aplikasi Khusus
e- Program*	Aplikasi Khusus
e - NBM	Aplikasi Khusus
e-Wasmut	Aplikasi Khusus
e- Kampung Berkebun*	Aplikasi Khusus
e - Keswan	Aplikasi Khusus
e - binus	Aplikasi Khusus
Website Dinas	Aplikasi Khusus
SIMKURING	Aplikasi Khusus
e-SPM	Aplikasi Khusus
Website Dinas	Aplikasi Khusus
Puspaga	Aplikasi Khusus
E-partisipasi	Aplikasi Khusus
Website Dispora	Aplikasi Khusus
Layanan & Pengelola SOR, GOR, GT	Aplikasi Khusus
Sistem Informasi Wirausaha Baru(Aksi Prabu)	Aplikasi Khusus
Sistem Informasi Manajemen Surat dan Disposisi Simansurdisisi	Aplikasi Khusus
CCTV SOR,GOR dan UPT	Aplikasi Khusus
Website Dpmpstsp	Aplikasi Khusus
GAMPIL	Aplikasi Khusus
Hayu Bandung	Aplikasi Khusus
Website Distaru	Aplikasi Khusus
Si PETRUK	Aplikasi Khusus
aset bangunan	Aplikasi Khusus
sigiwil	Aplikasi Khusus
BSM Plus	Aplikasi Khusus
sitarung	Aplikasi Khusus

Nama Aplikasi	Taksonomi Arsitektur Aplikasi SPBE
Mesin Antrian	Aplikasi Khusus
ERK-BLUD	Aplikasi Khusus
WEBSITE RSKIA	Aplikasi Khusus
SIMRS RSKIA Kota Bandung	Aplikasi Khusus
CCTV Public	Aplikasi Khusus
CCTV internal	Aplikasi Khusus
Aplikasi Anjungan Informasi	Aplikasi Khusus
Aplikasi Antrian	Aplikasi Khusus
SIMKUP RSKIA Kota Bandung	Aplikasi Khusus
Pendaftaran Online	Aplikasi Khusus
Website RSUD	Aplikasi Khusus
SIM-RS	Aplikasi Khusus
Website SatpolPP	Aplikasi Khusus
Perisai	Aplikasi Khusus
Website Setwan	Aplikasi Khusus
e perjalanan dinas	Aplikasi Khusus
e aspirasi	Aplikasi Khusus
e arsip	Aplikasi Khusus
JDIH KOTA BANDUNG	Aplikasi Khusus
BARIS	Aplikasi Khusus
SIPERA	Aplikasi Khusus
Portal Berita	Aplikasi Khusus
Arsip Kliping	Aplikasi Khusus
Website Bagian Kerjasama Setda Kota Bandung	Aplikasi Khusus
Selalu Bersama	Aplikasi Khusus
Laporan kerjasama	Aplikasi Khusus
Aplikasi Database Non- Muslim	Aplikasi Khusus
Data Penyandang Disabilitas	Aplikasi Khusus
Website Orpad	Aplikasi Khusus
SILAKIP	Aplikasi Khusus
e-Standar Pelayanan	Aplikasi Khusus
Sinabak	Aplikasi Khusus
SIP Bdg Juara	Aplikasi Khusus
LPPD Bandung	Aplikasi Khusus
SiBalap	Aplikasi Khusus
BIRMS	Aplikasi Khusus
SIPBRADER	Aplikasi Khusus
Web WUB	Aplikasi Khusus
Web TJSL	Aplikasi Khusus
Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (SismonTEPRA)	Aplikasi Khusus
Sistem Informasi Desain Pembangunan	Aplikasi Khusus
Sistem Informasi Kualitas Pembangunan	Aplikasi Khusus
SIMONEL Web	Aplikasi Khusus
SIMONEL Mobile	Aplikasi Khusus
SIMPAR	Aplikasi Khusus
Web Babakan Ciparay	Aplikasi Khusus
Website Kecamatan Bandung Kidul	Aplikasi Khusus
Website Rapot Posyandu	Aplikasi Khusus

Nama Aplikasi	Taksonomi Arsitektur Aplikasi SPBE
aplikasi siteplan	Aplikasi Khusus
aplikasi greenbuilding	Aplikasi Khusus
aplikasi pendataan bangunan(SIMBG)	Aplikasi Khusus
SISEMAR	Aplikasi Khusus
KRK	Aplikasi Khusus
VHU	Aplikasi Khusus
cctv	Aplikasi Khusus
Database Pemakaman	Aplikasi Khusus
Peta batas wilayah administrasi rt dan rw swk gedebage, kordon, bojonegara, tegalega	Aplikasi Khusus
Smartmap pemakaman tpu cikadut, rancacili, nagrog	Aplikasi Khusus
bangunan 3d city model se-kota bandung	Aplikasi Khusus
pengembangan sistem informasi geospasial berbasis 3d city untuk perhitungan pbb dan potensi pad	Aplikasi Khusus
peta sebaran covid 19 kota bandung	Aplikasi Khusus
Website Disdik	Aplikasi Khusus
Data Dapodik Bandung	Aplikasi Khusus
Sekolah Juara	Aplikasi Khusus
Surat Online	Aplikasi Khusus
MONIKA - Monitoring Anggaran dan Kegiatan	Aplikasi Khusus
Tableau Dashboard System	Aplikasi Khusus
RKAS dan Laporan Keuangan Online - CEKAS	Aplikasi Khusus
Toong Siswa	Aplikasi Khusus
Layanan Disdik	Aplikasi Khusus
MUDIK - Monitoring dan Evaluasi Dinas Pendidikan	Aplikasi Khusus
Tableau Dashboard System	Aplikasi Khusus
Pemetaan Guru	Aplikasi Khusus
RMP	Aplikasi Khusus
Puber	Aplikasi Khusus
Sikasep	Aplikasi Khusus
Website Dinas	Aplikasi Khusus
SIKEREN	Aplikasi Khusus
Website Disdagin	Aplikasi Khusus
Smart Reporting	Aplikasi Khusus
Website Dishub	Aplikasi Khusus
Area Traffic Control System	Aplikasi Khusus
E-Parking	Aplikasi Khusus
E- Payment Trans Metro Bandung	Aplikasi Khusus
GIS Marka Jalan, GIS Traffic Light, GIS Rambu Lalu Lintas	Aplikasi Khusus
Sipuji	Aplikasi Khusus
Boseh	Aplikasi Khusus
Bemo	Aplikasi Khusus
E-payemnt Qris BJB	Aplikasi Khusus
Flowbird.	Aplikasi Khusus
Website Kiaracondong	Aplikasi Khusus
Website Sukajadi	Aplikasi Khusus
E-SPJ	Aplikasi Khusus
Pelaporan Gaji	Aplikasi Khusus
Portal Sukajadi	Aplikasi Khusus
Aplikasi e-Surat Batununggal	Aplikasi Khusus

### 7.3 Analisis Gap

Dengan melihat kepada kondisi saat ini dan arsitektur yang menjadi tujuan, sebagian besar tujuan arsitektur aplikasi sudah dapat terwujud untuk saat ini. Walaupun implementasi aplikasi umum masih sangat sedikit, karena implemetasi dari pusat masih terbatas.

Kekurangan terbesar adalah untuk masalah integrasi antar aplikasi, supaya dapat lebih mudah untuk interoperabilitas, mengurangi redudansi, mengurangi kesalahan input dan pengolahan data. Untuk mewujudkan integrasi antar aplikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan bentuk super aplikasi. Beberapa fungsi super aplikasi tersebut diantaranya:

- Portal aplikasi yang terintegrasi, setiap pengguna hanya perlu untuk mengakses satu alamat saja
- User management yang terintegrasi, setiap pengguna hanya perlu satu username untuk mengakses seluruh aplikasi yang dapat diakses dan dibutuhkannya
- Master data yang terintegrasi, setiap master data hanya memiliki satu sumber saja untuk dibagi pakai oleh setiap aplikasi yang membutuhkannya

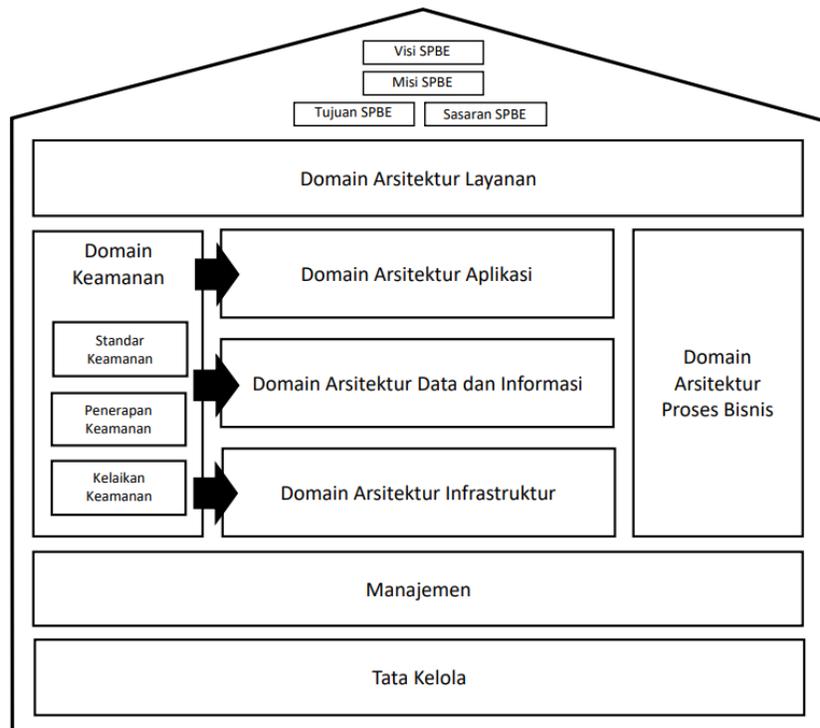
Perlu melanjutkan proses pendaftaran aplikasi yang belum terdaftar di Kominfo.

## **BAB 8 Domain Arsitektur Keamanan**

### **8.1 Domain Arsitektur Keamanan Pemerintah Kota Bandung**

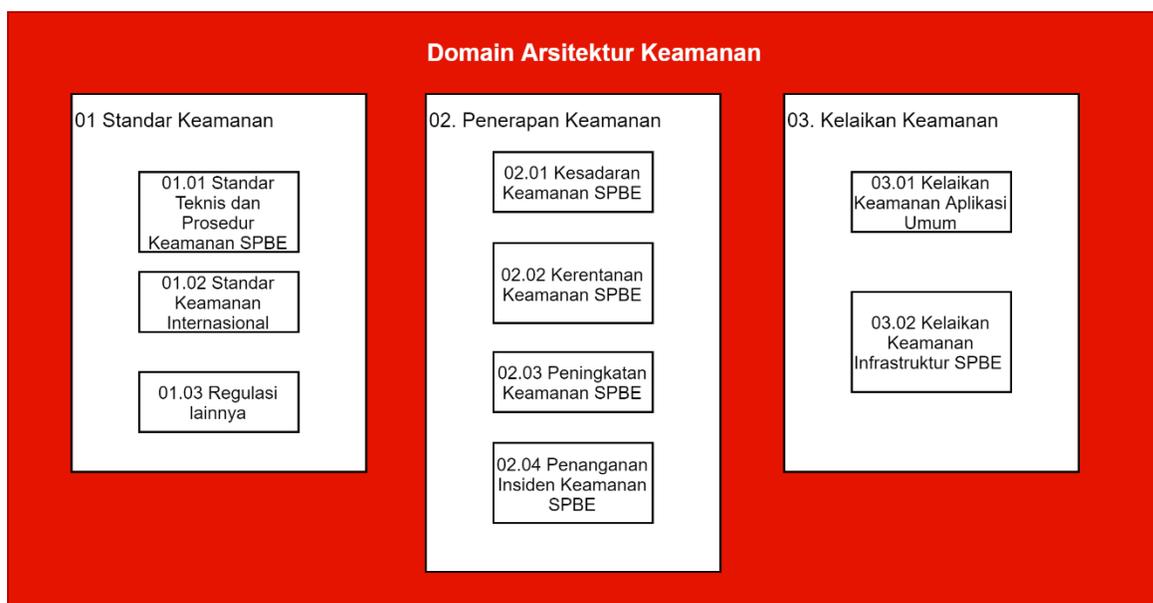
Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan.

Domain arsitektur keamanan adalah domain arsitektur yang mendeskripsikan kerangka dasar keamanan terkait data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Dalam kerangka kerja arsitektur SPBE, keberadaan domain arsitektur keamanan berbeda dengan domain arsitektur lainnya. Keberadaan Domain arsitektur keamanan digambarkan dalam bentuk vertikal melintasi semua domain arsitektur lainnya secara horisontal, sebagaimana terlihat pada Gambar 43.



Gambar 43 Keterkaitan keamanan pada kerangka kerja SPBE

Domain arsitektur keamanan selanjutnya perlu didukung oleh pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE, dimana manajemen dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE yang ditetapkan.



Gambar 44 Komponen Domain Arsitektur Keamanan

Berdasarkan Gambar 44, terdapat beberapa komponen yang mendukung keamanan, yaitu:

1) Standar Keamanan

Standar keamanan merupakan acuan persyaratan minimal keamanan dalam bentuk standar nasional, internasional serta regulasi peraturan terkait keamanan SPBE yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Standar Keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan secara nasional ataupun internasional. Standar keamanan yang dapat diacu meliputi:

- a) standar dan/atau Peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan; Beberapa diantaranya adalah Peraturan BSSN no. 4 tahun 2021 dan Indeks KAMI.
- b) standar internasional terkait keamanan informasi; Diantaranya adalah ISO 27001.
- c) regulasi lainnya.

Selain itu untuk mendefinisikan dan mengetahui kebijakan keamanan apa yang telah diterapkan, setiap IPPD harus mengidentifikasi standar keamanan yang menjadi acuan saat ini dalam penerapan fungsi keamanan pada aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur.

2) Penerapan Keamanan

Penerapan keamanan merupakan serangkaian proses dalam bentuk program kerja Keamanan SPBE yang harus dilaksanakan oleh setiap IPPD sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko Keamanan SPBE. Program kerja Keamanan SPBE disusun berdasarkan kategori risiko terhadap aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur dari setiap IPPD masing-masing. Target pelaksanaan program kerja Keamanan SPBE ditetapkan berdasarkan kebutuhan setiap IPPD. Program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi:

- a) edukasi kesadaran Keamanan SPBE;
- b) penilaian kerentanan Keamanan SPBE;
- c) peningkatan Keamanan SPBE; dan
- d) penanganan insiden Keamanan SPBE.

Ketentuan lebih lanjut terkait program kerja Keamanan SPBE diantaranya sebagai berikut:

- a) edukasi kesadaran keamanan

Edukasi kesadaran Keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan keahlian dalam penerapan keamanan aplikasi dan keamanan infrastruktur TIK.

b) penilaian kerentanan keamanan

Penilaian kerentanan Keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan untuk menginventarisasi seluruh aset SPBE, mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE serta mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE.

c) peningkatan keamanan

Peningkatan Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan. Peningkatan keamanan dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan untuk menerapkan standar teknis dan prosedur keamanan dan menguji kontrol keamanan yang telah diterapkan terhadap terhadap aplikasi dan Infrastruktur.

d) penanganan insiden keamanan

Penanganan insiden keamanan sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan:

- mengidentifikasi sumber serangan;
- analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;
- memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi; - mendokumentasi bukti insiden yang terjadi;
- memitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE, dan
- melakukan penghapusan konten yang bersifat destruktif dan/atau terkait malware.

3) Kelaikan keamanan

Kelaikan keamanan dilakukan melalui proses penilaian kerentanan dan risiko keamanan terhadap aplikasi umum dan infrastruktur. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap self assessment tersebut sebagai tahapan untuk mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

## **8.2 Kondisi Saat Ini**

Untuk TIK, Pemerintah Kota Bandung sudah menerapkan keamanan pada beberapa bagian, seperti aplikasi, server, dan jaringan. Implementasi keamanan belum dilakukan secara menyeluruh, karena masih terdapat beberapa bagian yang belum menerapkan keamanan TIK. Selain itu, penerapan keamanan TIK masih dilakukan masing-masing, belum terintegrasi.

## **8.3 Analisis Gap**

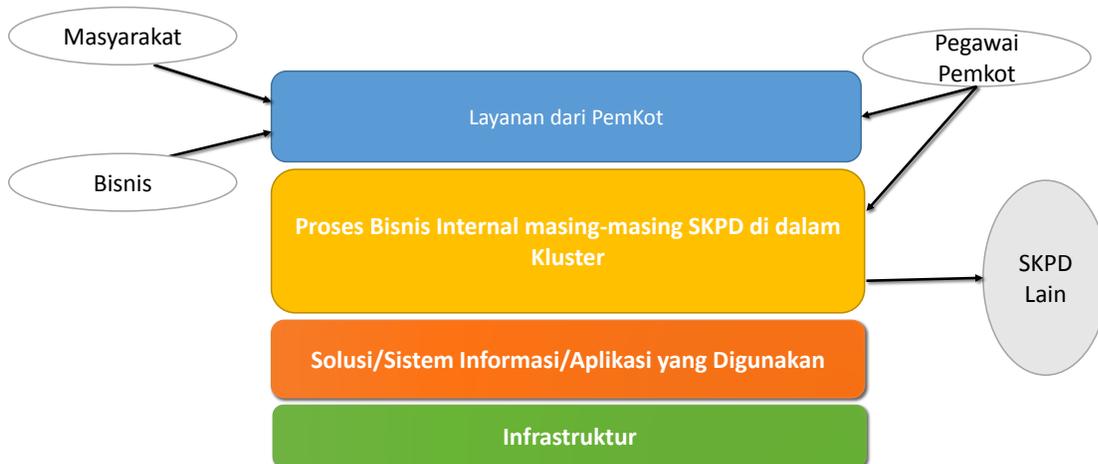
Berdasarkan kondisi saat ini dan arsitektur yang akan dituju, maka masih diperlukan peningkatan dalam hal keamanan TIK. Peningkatannya meliputi penyusunan kebijakan, standar, serta persebaran implementasinya sehingga semua perangkat baik perangkat lunak maupun perangkat keras diterapkan standar keamanan. Selain itu, juga perlu diperhatikan keamanan TIK dari segi integrasinya.

## BAB 9 Domain Arsitektur Layanan

### 9.1 Domain Arsitektur Layanan Pemerintah Kota Bandung

Arsitektur Layanan Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 45. Dapat dilihat di sini bahwa setidaknya terdapat tiga entitas utama yang mengadakan interaksi dengan sistem, yakni masyarakat, masyarakat yang mewakili entitas bisnis/usaha (selanjutnya cukup disebut dengan 'bisnis'), dan pegawai Pemerintah Kota. Antara masyarakat, bisnis, dan pegawai Pemerintah Kota memiliki sudut pandang yang berbeda.

Masyarakat dan bisnis akan memandangi sistem dari luar saja. Yang diketahui hanyalah layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota melalui jalur komunikasi yang telah disediakan masing-masing kepada masyarakat dan bisnis. Masyarakat dan bisnis akan masuk ke sistem melalui 'gerbang' single sign-on yang telah dirancang khusus sesuai dengan peruntukannya (masyarakat melalui citizen single sign-on dan bisnis melalui business single sign-on).



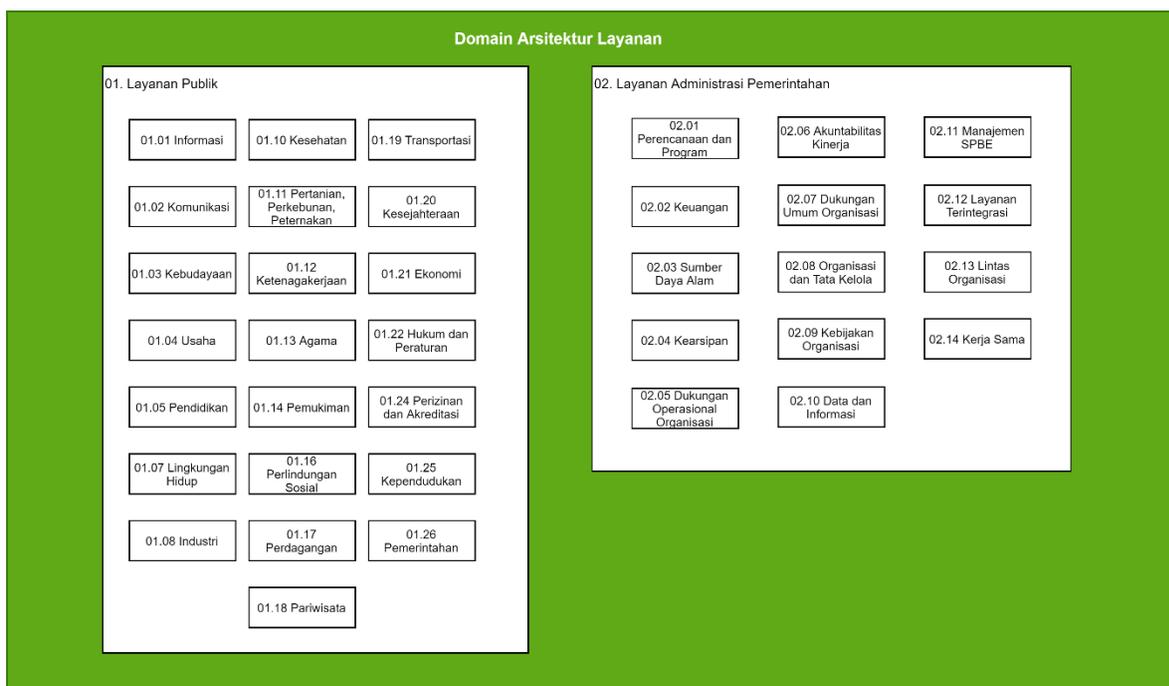
Gambar 45 Arsitektur Layanan Pemerintah Kota Bandung

Berbeda dengan pegawai Pemerintah Kota yang akan memandangi sistem secara lebih menyeluruh. Pegawai Pemerintah Kota Bandung dapat mengakses layanan kepada masyarakat karena terdapat beberapa layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota tidak diakses langsung oleh masyarakat namun melalui perantara pegawai Pemerintah Kota terlebih dahulu. Di sisi lain, jelas bahwa pegawai Pemerintah Kota akan dapat mengakses internal sistem terkait dengan proses bisnis di SKPD/unit tempat ia berada. Pegawai Pemerintah Kota akan masuk ke sistem melalui officer single sign-on.

Untuk dapat menjalankan layanan kepada masyarakat, masing-masing SKPD/unit di dalam lingkungan Pemerintah Kota akan menjalankan proses bisnisnya masing-masing. Proses bisnis ini memang ada yang bertujuan dalam rangka menyediakan layanan bagi masyarakat, namun ada juga yang bersifat internal hanya di dalam SKPD/unit tersebut saja. Namun juga tidak menutup kemungkinan akan terdapat proses bisnis yang melibatkan lintas SKPD, baik di dalam satu kluster maupun dengan kluster lainnya.

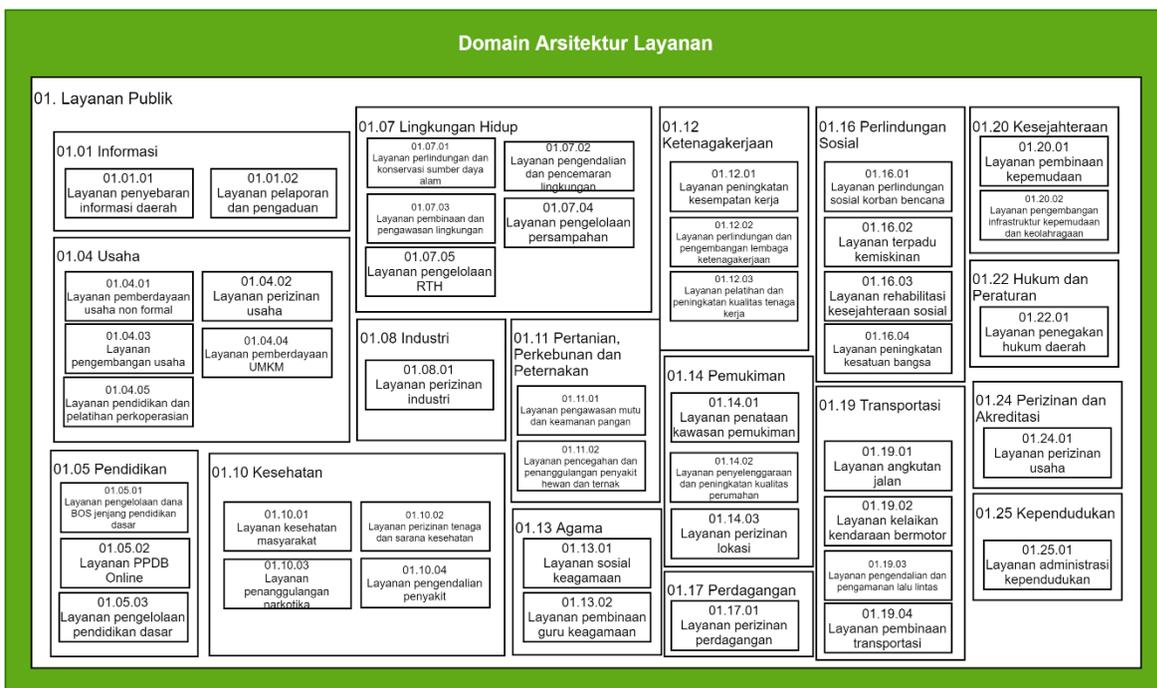
Posisi aplikasi/sistem informasi di sini adalah sebagai solusi untuk membantu berjalannya proses bisnis dan juga sebagai sarana komunikasi/interaksi dengan masyarakat/bisnis untuk mengakses layanan dari Pemerintah Kota. Yang perlu diperhatikan di sini adalah integrasi solusi. Saat ini secara umum solusi yang dibangun masih terpisah-pisah dan sangat bersifat reaktif dengan perencanaan yang minim. Ke depannya diharapkan akan terdapat satu solusi backbone yang terintegrasi dan dapat menunjang keseluruhan proses bisnis di Pemerintah Kota Bandung secara end-to-end.

Berdasarkan pemetaan dari referensi arsitektur layanan, dapat dipetakan layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung seperti pada gambar berikut.

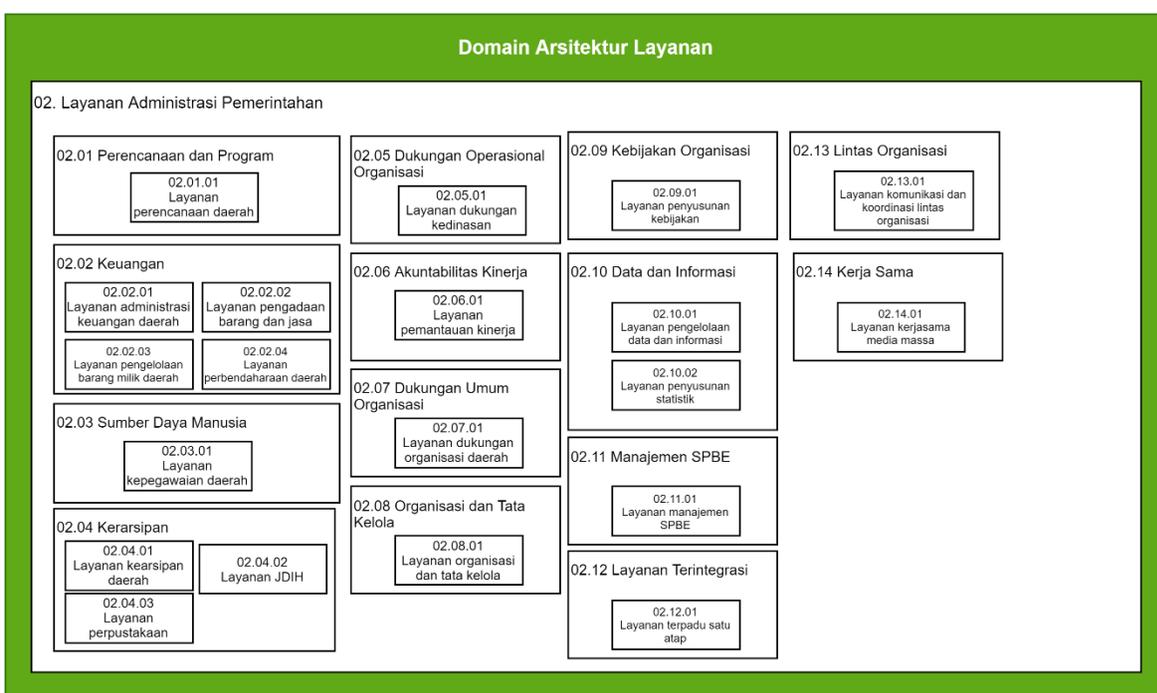


Gambar 46 Domain arsitektur layanan Pemerintah Kota Bandung

Untuk masing-masing area layanan, dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi kategori layanan seperti pada gambar berikut.



Gambar 47 Domain Arsitektur Layanan Publik



Gambar 48 Domain Arsitektur Layanan Administrasi Pemerintahan

## 9.2 Kondisi Saat Ini

Saat ini Pemerintah Kota Bandung sudah memiliki berbagai layanan baik untuk kepentingan publik maupun untuk kepentingan internal. Daftar layanan yang dimiliki antara lain:

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur	Layanan Pemkot Bandung	Deskripsi
		Layanan Publik (01)		
01:04	Usaha	Kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait dunia usaha antara lain manajemen bisnis, investasi, kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, koperasi dan usaha mikro, serta pajak dan cukai.	Warung UP2K	Aplikasi Penjualan online (pemberdayaan PKK)
			SIPENJOL	Aplikasi Penjualan online (pemberdayaan PKK)
01:07	Lingkungan Hidup	Kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait lingkungan hidup antara lain meteorologi, klimatologi, dan geofisika.	Website DLHK	Menampilkan profil DLHK
			SIMDOKLING (dokumen lingkungan)	Sistem informasi untuk pendaftaran dokumen lingkungan
			Dashboard Kualitas Udara	Sistem informasi menampilkan hasil pengukuran kualitas udara
			SI ABAH (Sistem Aplikasi Berkah Peduli Sampah)	Pendaftaran nasabah bank sampah, dan diambil sampahnya
			Simas Pepeling	Sistem Informasi pelayanan lingkungan hidup
			IBS Mobile	Aplikasi bank sampah mandiri
01:10	Kesehatan	Kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan antara lain farmasi dan alat kesehatan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan tenaga kesehatan, penanggulangan narkotika, pengawasan obat dan makanan, pengendalian penyakit, pengujian bahan adiktif, dan rehabilitasi.	Web Dinas Kesehatan	Media informasi mengenai profil Dinas Kesehatan Kota Bandung dan informasi kesehatan lainnya berbasis web
			SPGDT Kota Bandung	Penanganan kondisi kegawatdaruratan secara terpadu kepada masyarakat yang melibatkan langsung nakes dan sarana kesehatan tingkat lanjut.
			SIMRS	Sistem Manajemen Rumah Sakit (Pelayanan + Manajemen Pasien + Obat)
			RSKGM Online	Sistem Pendaftaran Online
			RSKGM Online Mobile	Sistem Pendaftaran Online
			Mesin Antrian	Pendaftaran pasien di lokasi

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur	Layanan Pemkot Bandung	Deskripsi
Layanan Publik (01)				
01:12	Ketenagakerjaan	Kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan ketenagakerjaan antara lain jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan kerja, pengelolaan ketenagakerjaan, pengelolaan pekerja migran Indonesia, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan penempatan tenaga kerja.	Website Dinas Sosial Pemkot Bandung	Informasi tentang kedinasan
			Aplikasi Kesejahteraan Sosial Excellent (Aksen)	Informasi data terpadu program penanganan fakir miskin dan PMKS
			JPS Online	Mengetahui Penerima Bantuan Sosial
			Website & Aplikasi BIMMA	Semua informasi tentang ketenagakerjaan
			BIMMA Bursa Kerja	BIMMA Mobile
01:14	Pemukiman	Kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pemukiman antara lain infrastruktur permukiman, kawasan permukiman, pertahanan, perumahan rakyat, serta sarana dan prasarana strategis.	SIMKURING	SI Manajemen Kegiatan UPT dan Monitoring
			Sistem Registrasi Pelayanan (SIRAPEL)	Pencatatan pelayanan publik warga
			Website Kecamatan Cinambo	Website Informasi
			Cinambo Smart	Aplikasi Berbasis Mobile, Informasi
			sigiwil	informasi peta wilayah
01:18	Pariwisata	Kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kepariwisataan.	Website Disbudpar	website profile dan informasi kebudayaan dan pariwisata
01:19	Transportasi	Kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait transportasi antara lain keamanan dan keselamatan transportasi.	GIS Marka Jalan, GIS Traffic Light, GIS Rambu Lalu Lintas	Sistem informasi geografis, database untuk marka jalan, traffic light dan rambu lalu lintas
			Sipuji	Sistem Informasi status kendaraan untuk pengujian kendaraan bermotor
			Boseh	Aplikasi Bike Sharing
			E-payemnt Qris BJB	Payemnt cashless transportasi umum
			Flowbird.	pendapatan mesin parkir
01:20	Kesejahteraan	Kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kesejahteraan masyarakat antara lain kesetaraan gender, olahraga, perlindungan anak, perlindungan hak perempuan, dan pemberdayaan pemuda.	CCTV SOR,GOR dan UPT	Pemantau Kondisi SOR,GOR dan UPT
			Website Dispora	Website Profile & Berita Dispora
			Sistem Informasi Wirausaha Baru(Aksi Prabu)	Aplikasi untuk pendaftaran wirausaha baru
01:24	Perizinan dan Akreditasi	Kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kependudukan.	SI AK	sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia, sistem ini meliputi pendataan penduduk dan pencacatan sipil
			e-SPasi	Pengambilan nomor antrian melalui SMS
			e-Punten Web	Mengetahui jumlah penduduk non permanen, pindah datang dari luar kota bandung, dan layanan WNA
			e-Punten Mobile	Mengetahui jumlah penduduk non permanen, pindah datang dari luar kota bandung, dan layanan WNA
			Salaman Web	Selesai Dalam Genggaman
			Salaman Mobile	Selesai Dalam Genggaman
			Pemuda Web	Aplikasi Pemutakhiran Data Penduduk
			Pemuda Mobile	Aplikasi Pemutakhiran Data Penduduk
			Wargapedia	Pendataan Penduduk dengan elemen lebih detail
01:26	Pemerintahan	Kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara umum antara lain pembangunan nasional, otonomi daerah, hubungan masyarakat, pengayoman masyarakat, dan program prioritas nasional.	Website	Portal Informasi
Layanan Administrasi Pemerintahan (02)				
02:01	Perencanaan dan Program	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perencanaan dan program	SPSE	Sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik khusus di PD.Pasar
02:02	Keuangan	Kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait keuangan negara antara lain pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan barang milik negara, dan perbendaharaan.	e-SPM	Pencairan Berkas Keuangan. Output: Berkas kontrak didokumentasikan
02:03	Sumber Daya Manusia	Kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait sumber daya aparatur sipil negara.	SIMPEG	Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian
			ERK	Remunerasi Kinerja berbasis elektronik
			SIAP	Sistem Informasi Administrasi Presensi
			SIFOR	Sistem informasi e Formasi
			SIM Arsip	Sistem informasi manajemen kearsipan pegawai
			SIMEKAR	Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Karir
			Idol(SIKOM)	Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi
			SIMPEG ADM	Sistem Informasi manajemen administratif kepegawaian
			Portal Integrasi	Portal untuk bridging data pegawai antara SIMPEG dan SAPKBKN
			SAPK	Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Kepegawaian
			Mang Asep	Membangun ASN Bernuansa Global melalui Aplikasi Sinkronisasi Elektronik Pegawai

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur	Layanan Pemkot Bandung	Deskripsi
Layanan Administrasi Pemerintahan (02)				
02:04	Kearsipan	Kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kearsipan dan persandian.	Aplikasi Manajemen Surat	Arsip surat kecamatan
02:05	Dukungan Operasional Organisasi	Kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan yang mendukung operasional organisasi/instansi.	Aplikasi No Antrian Layanan	Aplikasi no antrian pelayanan
			Adu Cepat	Aplikasi penanganan pengaduan data kependudukan bermasalah lembaga pengguna, memonitoring dan mengevaluasi konektivitas jaringan lembaga pengguna, serta laporan secara periodik kepada lembaga pengguna
			Mobile disposisi	untuk disposisi surat masuk dan keluar
02:06	Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja	Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (SismonTEPRA)	Aplikasi TEPRA adalah aplikasi yang dapat menjadi alat guna mempercepat penyerapan anggaran, dan memastikan APBN/APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, TEPRA juga diharapkan dapat meminimalisir masalah dan hambatan yang menghambat penyerapan anggaran di kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
			Sistem Informasi Desain Pembangunan	Mendata perangkat daerah yang akan melaksanakan pembangunan infrastruktur (preliminary design) untuk pengesahan desain
			Sistem Informasi Kualitas Pembangunan	Monitoring progress infrastruktur
			SIMONEL Web	Monitoring Realisasi Anggaran setiap OPD
			SIMONEL Mobile	Monitoring Realisasi Anggaran setiap OPD
			E-SPJ	Sistem Pengolahan Data Anggaran dan Realisasi Kecamatan Sukajadi
			Pelaporan Gaji	Sistem Pelaporan Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai Kecamatan Sukajadi
			Portal Sukajadi	Sistem Pelaporan dan Pendataan setiap bidang pekerjaan di kecamatan sukajadi

### 9.3 Analisis Gap

Dengan membandingkan layanan yang ada saat ini dengan arsitektur layanan yang disusun, sebagian besar layanan sudah terpenuhi. Untuk peningkatan kedepan, yang diperlukan adalah penyesuaian layanan untuk mendukung integrasi dan sinkronisasi.

## BAB 10 Penutup

Gambaran domain arsitektur SPBE yang telah disusun merupakan hasil analisis dari peraturan yang berlaku baik peraturan nasional maupun peraturan daerah, kebutuhan bisnis Pemerintah Kota Bandung yang berasal dari rencana wali kota, serta kondisi saat ini yang dapat diidentifikasi. Domain arsitektur ini dapat diperbaiki ataupun diperbarui bila terdapat perubahan dari referensi maupun perkembangan kebutuhan bisnis. Sehingga perlu melakukan proses review secara berkala.

Domain arsitektur SPBE ini dapat menjadi rujukan untuk penyusunan peta rencana SPBE Pemerintah Kota Bandung. Serta menjadi rujukan untuk perencanaan maupun pelaksanaan yang lebih teknis.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL



## Lampiran RACI Matrix Data Pemerintah Kota Bandung

### 1. Dinas Kesehatan

No	Judul Data	Dinas Kesehatan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Disduk	Disnaker	Dinsos	Kewilayahan	DPKPKB	Disdik
1	Jumlah Kematian Bayi (Umur < 1 Tahun)	R/A	I	C	I					
2	Jumlah Bayi Lahir Hidup	R/A	I	C	I					
3	Jumlah Kematian Balita (Umur < 5 Tahun)	R/A	I	C	I					
4	Jumlah Kematian Bayi (Umur < 1Bulan)	R/A	I	C	I					
5	Jumlah Kematian Ibu Hamil, Bersalin Dan Nifas	R/A	I	C	I					
6	Jumlah Posyandu	R/A	I	C						
7	Jumlah Puskesmas	R/A	I	C						
8	Jumlah Tenaga Medis	R/A	I	C	C	I				
9	Jumlah Anak Usia 1 Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak	R/A	I	C						
10	Jumlah Penderita Pneumonia Balita	R/A	I	C						
11	Jumlah Penderita Baru Tbc Bta	R/A	I	C						
12	Jumlah Kasus Tbc (Baru + Lama)	R/A	I	C						
13	Jumlah Penderita Dbd	R/A	I	C						
14	Jumlah Penderita Diare	R/A	I	C						
15	Jumlah Pasien Hiv/Aids	R/A	I	C						
16	Jumlah Kunjungan Pasien Miskin Di Sarana Kesehatan	R/A	I	C			I			
17	Jumlah Rumah Sakit	R/A	I	C						
18	Jumlah Pasien Tb Yang Meninggal	R/A	I	C	I					
19	Jumlah Pasien Tb Yang Mendapat Pengobatan	R/A	I	C						
20	Jumlah Pasien Tb Yang Sembuh	R/A	I	C						
21	Jumlah Balita Gizi Buruk Berdasarkan Kecamatan	R/A	I	C				I		
22	Jumlah Kasus Malaria	R/A	I	C						
23	Jumlah Kematian Akibat Malaria	R/A	I	C	I					
24	Jumlah Bayi Yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan	R/A	I	C						
25	Jumlah Ibu Hamil Yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan	R/A	I	C						
26	Jumlah Ibu Nifas Yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan	R/A	I	C						
27	Jumlah Fasilitas Kesehatan	R/A	I	C						
28	Jumlah Kasus Sfp Non Polio	R/A	I	C						
29	Jumlah Anak Balita Yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida	R/A	I	C						
30	Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memakai Kondom	R/A	I	C					C	
31	Jumlah Penduduk Usia 15-4 Tahun Yang Mempunyai Pengetahuan Komprehensif Tentang Bahaya Penyakit	R/A	I	C						
32	Jumlah Neonatus Dengan Komplikasi Yang Tertangani	R/A	I	C						
33	Jumlah Balita Yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan	R/A	I	C						
34	Jumlah Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Yang Mendapat Mp-Asi	R/A	I	C			C			
35	Jumlah Murid SD Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	R/A	I	C						C
36	Jumlah Pelayanan Gawat Darurat	R/A	I	C						
37	Jumlah Klb Yang Ditangani >24 Jam	R/A	I	C						

### 2. Dinas Pendidikan

No	Judul data	Dinas Pendidikan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kewilayahan
1	Jumlah Siswa SD/MI	R/A	I	C	
2	Jumlah Siswa SMP/MTS	R/A	I	C	
3	Jumlah Siswa SMA/MA/SMK	R/A	I	C	
4	Jumlah Siswa Lulus Sekolah Dasar	R/A	I	C	
5	Jumlah Siswa Lulus Sekolah Menengah Pertama	R/A	I	C	
6	Jumlah Siswa Lulus Sekolah Menengah Atas	R/A	I	C	
7	Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang SMP	R/A	I	C	
8	Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang SMA	R/A	I	C	
9	Jumlah Sekolah Dengan Kondisi Bangunan Baik	R/A	I	C	R
10	Jumlah SD Di Kota Bandung	R/A	I	C	R
11	Jumlah SMP Di Kota Bandung	R/A	I	C	R
12	Jumlah SMA Di Kota Bandung	R/A	I	C	R
13	Jumlah SD Dengan Kondisi Bangunan Baik	R/A	I	C	R
14	Jumlah SMP Dengan Kondisi Bangunan Baik	R/A	I	C	R
15	Jumlah Guru SD	R/A	I	C	
16	Jumlah Guru SMP	R/A	I	C	
17	Jumlah Guru SMA	R/A	I	C	
18	Jumlah Guru Berijazah Kualifikasi S1/D4	R/A	I	C	
19	Jumlah Siswa TK	R/A	I	C	
20	Jumlah Guru SD	R/A	I	C	
21	Jumlah Guru SMP	R/A	I	C	
22	Jumlah Guru SMA	R/A	I	C	
23	Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Melek Huruf	R/A	I	C	R
24	Jumlah Siswa Putus Sekolah Dasar	R/A	I	C	R
25	Jumlah Siswa Putus Sekolah Menengah Pertama	R/A	I	C	R
26	Jumlah Siswa Putus Sekolah Menengah Atas	R/A	I	C	R
27	Jumlah SMA Dengan Kondisi Bangunan Baik	R/A	I	C	R

### 3. Disdukcapil

No	Judul Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Komunikasi dan Informatika	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kewilayahan
1	Jumlah Penduduk Usia > 17 Tahun Yang Mempunyai KTP	R/A	I	C	R
2	Jumlah Penduduk Usia >= 17 Tahun	R/A	I	C	R
3	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akte Kelahiran	R/A	I	C	R
4	Jumlah Penduduk Usia 0-1 Tahun	R/A	I	C	R
5	Jumlah Penduduk Yang Berstatus Kawin	R/A	I	C	R
6	Jumlah Pasangan Yang Memiliki Akte Nikah	R/A	I	C	R

### 4. BKPP

No	Judul data	BKPP	Diskominfo	Bappelitbang	Semua OPD
1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil	R/A	I	C	R
2	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	R/A	I	C	R
3	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	R/A	I	C	R
4	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	R/A	I	C	R
5	Jumlah Pegawai Yang Mendapat Pelatihan Formal	R/A	I	C	R
6	Jumlah Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural	R/A	I	C	R

### 5. Dinas Arsip dan Perpustakaan

No	Judul data	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Diskominfo	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	BKPP
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	R/A	I	C	
2	Jumlah Koleksi Judul Buku Di Perpustakaan	R/A	I	C	
3	Jumlah Perpustakaan Di Kota Bandung	R/A	I	C	
4	Jumlah Seluruh Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai	R/A	I	C	
5	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Yang Bersertifikat	R/A	I	C	
6	Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku	R/A	I	C	
7	Data Kegiatan Pelatihan Pustakawan Di Lingkungan Dispusip	R/A	I	C	C

### 6. DPU

No	Judul Data	DPU	Diskominfo	Bappelitbang	Satpol PP	Disperindag	DKUMKM	Distaru	DPMPSTSP	DPKP3
1	Data panjang jalan	R/A	I	C						
2	Data panjang jalan dengan kondisi baik	R/A	I	C						
3	Data jalan yang memiliki trotoar	R/A	I	C						
4	Data jalan yang memiliki drainasi	R/A	I	C						
5	Data panjang jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	R/A	I	C	I	R	I	I	I	
6	Data panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	R/A	I	C						
7	Data panjang sempadan sungai	R/A	I	C						
8	Data panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air	R/A	I	C						
9	Data luas daerah yang tergenang	R/A	I	C						I
10	Data jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	R/A	I	C						
11	Data wilayah rawan longsor	R/A	I	C						
12	Data panjang saluran irigasi	R/A	I	C						
13	Data saluran irigasi dalam kondisi baik	R/A	I	C						

## 7. DPKP

No	Judul data	DPKP	Dinas Komunikasi dan Informatika	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PDAM Tirta Wening	Badan Pertanahan Nasional	Pengadilan Negeri
1	Data Penduduk berakses air minum	R/A	I	C			
2	Data jumlah rumah layak huni	R/A	I	C			
3	Data luas pemukiman	R/A	I	C			
4	Data jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni	R/A	I	C			
5	Data jumlah rumah tangga MBR	R/A	I	C			
6	Data luas area permukiman tertata	R/A	I	C			
7	Data jumlah rumah di wilayah perkotaan	R/A	I	C			
8	Data jumlah lingkungan perumahan	R/A	I	C			
9	Data jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terdistribusi dan berkelanjutan	R/A	I	C	R		
10	Data luas kawasan kumuh	R/A	I	C			
11	Data luas pemukiman layak huni	R/A	I	C			
12	Data jumlah seruan rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	R/A	I	C			
13	Data jumlah rumah di suatu wilayah kerja	R/A	I	C			
14	Data luas pemukiman kumuh yang tertangani	R/A	I	C			
15	Data jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	R/A	I	C			
16	Data jumlah lingkungan yang didukung PSU	R/A	I	C			
17	Data jumlah luas lahan bersertifikat	R	I	C		A	
18	Data jumlah kasus tanah negara yang terdaftar	R	I	C			A
19	Data jumlah kasus tanah negara yang diselesaikan	R	I	C			A

## 8. Satpol PP

No	Judul Data	Satpol PP	Diskominfo	Bappelitbang
1	Data pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP	R/A	I	C
2	Data pelanggaran K3 yang terselesaikan	R/A	I	C
3	Data pelanggaran Perda	R/A	I	C
4	Data penyelesaian penegakkan Perda	R/A	I	C
5	Data petugas Linmas di Kota Bandung	R/A	I	C

## 9. Dinsos

No	Judul data	Dinsos	Diskominfo	Bappelitbang	Kewilayahan	DiskarPB
1	Data jumlah PMKS	R/A	I	C	R	
2	Data jumlah panti sosial di Kota Bandung	R/A	I	C	R	
3	Data jumlah PMKS yang sudah diberi bantuan dalam 1 tahun	R/A	I	C	R	
4	Data jumlah PMKS yang tertangani	R/A	I	C	R	
5	Data jumlah PMKS yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	R/A	I	C	R	
6	Data jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	R/A	I	C	R	
7	Data jumlah WKBSM (Wahana Kesejahteraan Sosial Masyarakat) di Kota Bandung	R/A	I	C	R	
8	Data jumlah WKBSM (Wahana Kesejahteraan Sosial Masyarakat) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	R/A	I	C	R	
9	Data jumlah korban bencana di Kota Bandung	R/A	I	C	R	R
10	Data jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	R/A	I	C	R	
11	Data jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	R/A	I	C	R	R
12	Data jumlah penyandang cacat fisik dan mental (dengan kondisi tidak potensial) di Kota Bandung	R/A	I	C	R	
13	Data jumlah lansia (dengan kondisi tidak potensial) di Kota Bandung	R/A	I	C	R	
14	Data jumlah penyandang cacat fisik dan mental (dengan kondisi tidak potensial) yang menerima jaminan sosial	R/A	I	C	R	
15	Data jumlah lansia (dengan kondisi tidak potensial) yang menerima jaminan sosial	R/A	I	C	R	
16	Data Jumlah Penduduk Miskin	R/A	I	C	R	
17	Data jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	R/A	I	C	R	

## 10. Disnaker

No	Judul data	Disnaker	Diskominfo	Bappelitbang	BPJS	Kecamatan	Disdagin	BAKESBANGPOL
1	Data jumlah pekerja di Kota Bandung	R/A	I	C				
2	Data jumlah pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	R/A	I	C	I			
3	Data pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	R/A	I	C				
4	Data tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	R/A	I	C				
5	Data pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	R/A	I	C		C		
6	Data tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis masyarakat	R/A	I	C		C		
7	Data pendaftar pelatihan kewirausahaan	R/A	I	C		C		
8	Data tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	R/A	I	C		C		
9	Data pencari kerja yang terdaftar	R/A	I	C				
10	Data pencari kerja yang ditempatkan	R/A	I	C				
11	Data jumlah perusahaan	R/A	I	C		I	C	
12	Data jumlah sengketa pengusaha pekerja	R/A	I	C			I	
13	Data kasus yang dicatatkan	R/A	I	C				
14	Data kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	R/A	I	C				
15	Data jumlah perusahaan yang sudah menerapkan K3	R/A	I	C			C	
16	Data jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda	R/A	I	C				I
17	Data jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda	R/A	I	C				
18	Data jumlah perusahaan yang telah diperiksa	R/A	I	C			C	
19	Data peralatan perusahaan yang telah terdaftar	R/A	I	C			I	
20	Data peralatan perusahaan yang telah diuji	R/A	I	C			I	

## 11. DP3AM

No	Judul data	DP3APM	Diskominfo	Bappelitbang	Disnaker	Dinkes	Setwan	BPSDM	Disdukcapil	Dinsos
1	Data jumlah KDRT terhadap perempuan	R/A	I	C						
2	Data jumlah laporan kekerasan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	R/A	I	C						
3	Data jumlah pekerja perempuan	R/A	I	C	R					
4	Data pekerja perempuan di lembaga pemerintah	R/A	I	C				R		
5	Data jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	R/A	I	C			R			
6	Data jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	R/A	I	C			R			
7	Data jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	R/A	I	C	R					
8	Data jumlah pekerja usia 5 tahun keatas	R/A	I	C	R				I	
9	Data jumlah pekerja anak usia 5-14 tahun	R/A	I	C	R				I	
10	Data jumlah laporan kekerasan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	R/A	I	C						
11	Data jumlah seluruh korban kekerasan yang terdata di Puskesmas dan RS	R/A	I	C		R				
12	Data jumlah seluruh korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan di Puskesmas dan RS	R/A	I	C		R				
13	Data jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial	R/A	I	C						R
14	Data jumlah korban kekerasan yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial	R/A	I	C						R
15	Data jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	R/A	I	C						
16	Data jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	R/A	I	C						
17	Data jumlah korban kekerasan yang membutuhkan bantuan hukum	R/A	I	C						
18	Data jumlah korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	R/A	I	C						
19	Data jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	R/A	I	C						
20	Data jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan	R/A	I	C						
21	Data jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	R/A	I	C						R
22	Data jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	R/A	I	C						
23	Data mahasiswa laki-laki di tingkat perguruan tinggi (usia 19-24 tahun)	R/A	I	C					R	
24	Data mahasiswi perempuan di tingkat perguruan tinggi (usia 19-24 tahun)	R/A	I	C					R	

## 12. Dispangtan

No	Judul data	Dispangtan	Diskominfo	Bappelitbang	Bag Ek	PD Pasar	Disdagin
1	Data jumlah ketersediaan pangan utama (kg)	R/A	I	C	R	R	R
2	Data ketersediaan pangan/kapita/hari	R/A	I	C	R	R	R

## 13. DLHK

No	Judul data	DLHK	Diskominfo	Bappelitbang	BKPP	DPMPSTSP	Kec/Kel
1	Data jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) yang dilatih/dibina	R/A	I	C	R		
2	Data jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	R/A	I	C			
3	Data jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan	R/A	I	C			R
4	Data jumlah volume sampah per hari	R/A	I	C			R
5	Data jumlah volume sampah yang tertangani oleh bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan	R/A	I	C			
6	Data luas area pelayanan pengelolaan sampah (km <sup>2</sup> /ha)	R/A	I	C			R
7	Data jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan	R/A	I	C		R	
8	Data jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit	R/A	I	C		R	
9	Data jumlah pengelolaan sampah oleh swasta yang taat peraturan	R/A	I	C			

#### 14. Dishub

No	Judul Data	Dishub	Diskominfo	Bappelitbang	Bappenda Provinsi
1	Data jumlah terminal bis	R/A	I	C	
2	Data jumlah bandara	R/A	I	C	
3	Data jumlah angkutan darat	R/A	I	C	
4	Data jumlah pemasangan rambu-rambu	R/A	I	C	
5	Data jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah	R/A	I	C	
6	Data jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	R/A	I	C	
7	Data uji KIR	R/A	I	C	
8	Data jumlah penumpang angkutan darat	R/A	I	C	
9	Data jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	R/A	I	C	
10	Data jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	R/A	I	C	
11	Data jumlah kendaraan	R	I	C	A
12	Data jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	R/A	I	C	
13	Data jumlah orang/barang melalui terminal	R/A	I	C	
14	Data jumlah orang/barang melalui bandara	R/A	I	C	

#### 15. Distaru

No	Judul data	DISTARU	BAPPELITBANG	DISKOMINFO	DPKP3	DLHK
1	Data luas ruang terbuka hijau	R/A	C	I	R	I
2	Data luas RTH publik yang tersedia	R/A	C	I	R	I
3	Data ruang publik yang berubah fungsi (ha)	R/A	C	I	R	I
4	Data luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara	R/A	C	I		I

#### 16. DPPKB

No	Judul data	DPPKB	Diskominfo	Bappelitbang	Dinas Kesehatan	Dinas Kependudukan R/C/I	DP3A	Dinas Pendidikan	Dinas Tenaga Kerja	Kecamatan
1	Data jumlah pasangan usia subur	R/A	I	C	I		I			
2	Data jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Kota Bandung	R/A	I	C	I		I	I		
3	Data jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kota Bandung	R/A	I	C	I		I	I		
4	Data jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kota Bandung	R/A	I	C	I					
5	Data jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	R/A	I	C	I					
6	Data jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	R/A	I	C	I					
7	Data jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB	R/A	I	C	I					
8	Data jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber-KB	R/A	I	C	I					
9	Jumlah alat kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang alat kontrasepsi	R/A	I	C	I					
10	Data jumlah kelahiran berdasarkan kelompok umur (15-19, 20-24,.....,45-49)	R/A	I	C	I	R/C/I				
11	Data jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	R/A	I	C	I					
12	Data jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk	R/A	I	C	I	C/I			I	
13	Data jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan dataprofil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	R/A	I	C	I	I			I	
14	Data jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	R/A	I	C	I		I	I		
15	Data akseptor KB	R/A	I	C	I	I				
16	Data jumlah kelahiran dari perempuan kelompok umur 15-19 tahun	R/A	I	C	I	I	I			
17	Data jumlah pasangan usia subur dengan istri yang berumur kurang dari 20 tahun	R/A	I	C	I	R				
18	Data jumlah PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani	R/A	I	C	I					
19	Data jumlah akseptor KB yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KMJP)	R/A	I	C	I					
20	Data jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) berdasarkan kecamatan	R/A	I	C	I	I	I			C/I
21	Data jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	R/A	I	C	I	I	I	R		
22	Data jumlah anggota kelompok UPPKS	R/A	I	C	I		I			
23	Data jumlah anggota UUPKS yang ber KB mandiri	R/A	I	C	I					
24	Data jumlah petugas pembantu pembina KB di kelurahan	R/A	I	C	I	I				I
25	Data jumlah faskes dan jejaring yang bekerja sama dengan BPJS	R/A	I	C	I					
26	Data jumlah informasi data mikro keluarga	R/A	I	C	I	I	C			
27	Data jumlah remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS)	R/A	I	C	I					
28	Data jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	R/A	I	C	I		I			
29	Data jumlah keluarga yang memiliki balita dan anak	R/A	I	C		C	I			
30	Data jumlah wanita menurut usia kawin pertama	R/A	I	C	I	C	I			
31	Data jumlah anggaran untuk PPKB	R/A	I	C	I		C/I			

## 17. Diskominfo

No	Judul data	Diskominfo	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Perusahaan Telekomunikasi
1	Data jumlah KIM	R/A	C	
2	Data cakupan layanan telekomunikasi	R/A	C	R
3	Data jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	R/A	C	

## 18. DPMPSTP

No	Judul data	DPMPSTP	Diskominfo	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
1	Data jumlah bangunan ber IMB	R/A	I	C
2	Data jumlah bangunan	R/A	I	C
3	Data jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	R/A	I	C
4	Data permohonan ijin lokasi	R/A	I	C
5	Data jumlah ijin lokasi	R/A	I	C

## 19. Dispora

No	Judul data	DISPORA	BAPPELITBANG	DISKOMINFO	DINAS PENDIDIKAN	BAKESBANGPOL	DINAS KUMKM
1	Data jumlah atlit yang menang kejuaraan tingkat nasional dan internasional	R/A	C	I	I		
2	Data jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan	R/A	C	I	I		
3	Data jumlah cabang olahraga yang dibina	R/A	C	I			
4	Data jumlah cabang olahraga yang terdaftar	R/A	C	I			
5	Data jumlah pelatih	R/A	C	I			
6	Data jumlah pelatih yang bersertifikat	R/A	C	I			
7	Data jumlah seluruh atlit pelajar	R/A	C	I	C		
8	Data jumlah atlit pelajar yang dibina	R/A	C	I	C		
9	Data jumlah organisasi pemuda	R/A	C	I		C	
10	Data jumlah wirausaha	R/A	C	I			R
11	Data jumlah wirausaha muda	R/A	C	I			R

## 20. Kesbangpol

No	Judul data	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Diskominfo	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
1	Data rumah ibadah	R/A	I	C

## 21. Disbudpar

No	Judul data	Disbudpar	Diskominfo	Bappelitbang	Bag Kerjasama	Distaru	DLHK	Dispusip	Disdik	Kec/Kel
1	Data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	R/A	I	C		R	R	R	R	R
2	Data jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	R/A	I	C	R				R	
3	Data jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	R/A	I	C				R		R
4	Data jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	R/A	I	C			R			R

## 22. DKUMKM

No	Judul data	DKUMKM	Diskominfo	Bappelitbang	BPR
1	Data jumlah usaha mikro dan kecil	R/A	I	C	
2	Data jumlah koperasi di Kota Bandung	R/A	I	C	
3	Data jumlah UKM non BPR/LKM	R/A	I	C	R
4	Data jumlah seluruh BPR/LKM	R/A	I	C	R

## 23. Disdagin

No	Judul data	DISDAGIN	BAPPELITBANG	DISKOMINFO	DKUMKM
1	Ekspor Bersih Perdagangan	R/A	C	I	
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	R/A	C	I	I
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	R/A	C	I	I

## 24. Damkar

No	Judul data	Damkar	Diskominfo	Bappelitbang
1	Data jangkauan luas wilayah kebakaran	R/A	I	C
2	Data kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	R/A	I	C

## 25. BPKA

No	Judul data	BPKA	Diskominfo	Bappelitbang	TAPD	Prodekbang	Bagian Layanan Pengadaan	Disdik	Dinkes
1	Data jumlah anggaran APBD	R/A	I	C	R				
2	Data program dalam APBD yang tidak dilaksanakan	R/A	I	C	R	I	C		
3	Data seluruh program dalam APBD	R/A	I	C	R	I			
4	Data jumlah belanja bidang urusan pendidikan	R/A	I	C				R	
5	Data jumlah belanja bidang urusan kesehatan	R/A	I	C					R
6	Data jumlah belanja langsung	R/A	I	C	R				
7	Data jumlah belanja tidak langsung	R/A	I	C	R				
8	Data jumlah belanja bagi hasil	R/A	I	C	R				